

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**FUNGSI BAHASA DAN PENANDA KESANTUNAN
TUTURAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM SURAT KABAR *KOMPAS*
BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2010**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah



Disusun Oleh:

Woro Indah Susanti

051224027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**FUNGSI BAHASA DAN PENANDA KESANTUNAN
TUTURAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM SURAT KABAR *KOMPAS*
BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2010**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah



Disusun Oleh:

Woro Indah Susanti

051224027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
FUNGSI BAHASA DAN PENANDA KESANTUNAN
TUTURAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM SURAT KABAR *KOMPAS*
BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2010

Disusun Oleh:

Woro Indah Susanti

NIM: 051224027

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Tanggal 5 Maret 2012



Prof. Dr. Pranowo, M.Pd.

Dosen Pembimbing II

Tanggal 5 Maret 2012



Dr. B. Widharyanto, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
FUNGSI BAHASA DAN PENANDA KESANTUNAN
TUTURAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM SURAT KABAR *KOMPAS*
BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2010

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Woro Indah Susanti

NIM: 051224027

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 12 Maret 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dr. Yuliana Setyaningsih
Sekretaris : Rische Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Pranowo, M.Pd.
Anggota : Dr. B. Widharyanto, M.Pd.
Anggota : Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 12 Maret 2012
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan



Rohandi, Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!

(Roma 12:12)

Sekali menabuh genderang, dengan penuh semangat menyerang.

Menyelesaikan suatu hal dengan penuh semangat sampai tuntas.

Bertindak cepat, tepat, bersemangat, dan pantang menyerah
membuat tingkat keberhasilan lebih besar.

(Leman, Chinese Wisdom)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk

Tuhan Yesus dan Bunda Maria

kedua orang tuaku,

Supriyanto, A.Md. dan (Alm) Ngapinten;

adik-adikku,

Woro Metta Viriyanti dan Nyana Pintaka;

sahabatku,

Alvina Nathania Sari, S.Pd.

serta,

Antonius Juni Dwi Hartanto, A.Md.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

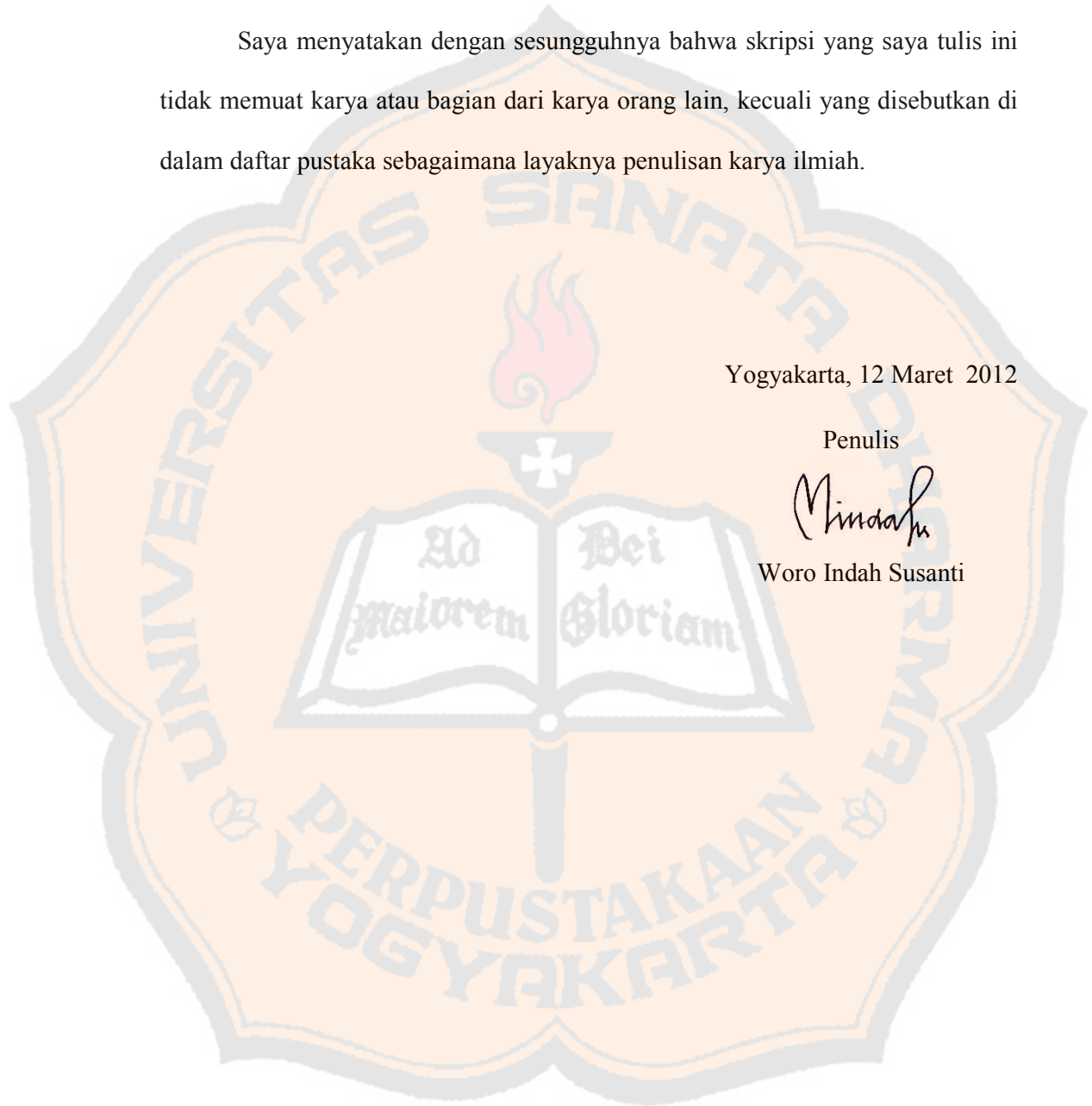
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam daftar pustaka sebagaimana layaknya penulisan karya ilmiah.

Yogyakarta, 12 Maret 2012

Penulis



Woro Indah Susanti



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNUTK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Woro Indah Susanti

No. Mahasiswa : 051224027

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

FUNGSI BAHASA DAN PENANDA KESANTUNAN TUTURAN TOKOH MASYARAKAT DALAM SURAT KABAR *KOMPAS* BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2010

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 12 Maret 2012

Yang menyatakan



Woro Indah Susanti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Susanti, Woro Indah. 2012. *Fungsi Bahasa dan Penanda Kesantunan Tuturan Tokoh Masyarakat dalam Surat Kabar Kompas Bulan Oktober s.d. Desember 2010*. Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, USD.

Penelitian ini berusaha menemukan jawaban terhadap dua persoalan atau masalah utama, yakni: (a) fungsi bahasa apa saja yang terdapat dalam tuturan di surat kabar? dan (b) penanda apa saja yang terdapat dalam tuturan di surat kabar yang menunjukkan tingkat kesantunan tuturan atau ujaran tersebut? Penelitian ini menggunakan sumber data berupa dokumen-dokumen surat kabar *Kompas* bulan Oktober s.d. Desember 2010. Data dalam penelitian ini berwujud kalimat-kalimat, yakni tuturan-tuturan tokoh masyarakat yang ada di dalam surat kabar *Kompas*, dengan jangka waktu Oktober s.d. Desember 2010. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca catat.

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, ada dua hal yang merupakan hasil dari penelitian ini. *Pertama*, ditemukan ada enam fungsi bahasa yang muncul dalam tuturan di surat kabar. Keenam fungsi bahasa tersebut adalah: fungsi bahasa instrumental, representasional, regulatori, personal, interaksional, dan heuristik. Pengungkapan keenam fungsi bahasa tersebut terwujud dalam fungsi-fungsi mikro bahasa yang paling banyak ditemukan dalam tuturan di surat kabar.

Fungsi instrumental memiliki fungsi mikro berwujud tuturan imperatif yang menyatakan tuturan imperatif biasa, imperatif larangan, imperatif permintaan, imperatif ajakan, imperatif harapan, imperatif persilaan, dan imperatif anjuran. Fungsi bahasa representasional memiliki fungsi mikro mempertimbangkan kepastian, kemungkinan, melaporkan, mengingatkan, mengidentifikasi, menyetujui, menolak, dan menjawab. Fungsi bahasa regulatori memiliki fungsi mikro berbentuk pengesahan, pernyataan aturan dan undang-undang. Fungsi bahasa interaksional memiliki fungsi mikro untuk berinteraksi dengan mitra tutur. Fungsi bahasa personal memiliki fungsi mikro yang berhubungan dengan perasaan, emosi, kepribadian. Serta, fungsi bahasa heuristik yang memiliki fungsi mikro untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Kedua, ditemukan juga sembilan jenis penanda tingkat kesantunan tuturan di dalam surat kabar, yakni: analogi, diksi atau pilihan kata, gaya bahasa, penggunaan keterangan atau kata modalitas, keterangan sebab, keterangan akibat, keterangan tujuan, penyebutan subjek yang menjadi tujuan tuturan, dan bentuk tuturan. Sembilan jenis penanda inilah yang memungkinkan mitra tutur memberikan penilaian terhadap tinggi rendahnya (tingkat) kesantunan tuturan di dalam surat kabar dan sebagai strategi berkomunikasi demi mewujudkan tuturan yang lebih santun sehingga komunikasi yang tercipta menjadi lancar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Susanti, Woro Indah. 2012. *Functions of Language and Politeness Markers of Public Figures' Utterances in Kompas Daily Newspaper October - December 2010*. Undergraduate Thesis. Yogyakarta: Department of Indonesian, Local Languages and Literature Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University.

This study aims to answer two problems, they are: (a) what functions of language are included within public figures' utterances in newspaper? (b) what sorts of politeness degree markers are found within public figures' utterances in newspaper? In this study, the data sources are in the form of statements uttered by public figures in *Kompas* daily newspaper published on October-December 2010. This undergraduated thesis is accomplished by using qualitative method with note-reading as the data collection technique.

In accordance with the formulated problems, two results are found in this study. *First*, regarding the public figures' utterances, six functions of language are found. They are: instrumental, representational, regulatory, personal, interactional, and heuristic functions. The disclosure of those functions embodied within micro functions of language which mostly included within utterances in a newspaper.

Related to the micro functions of language, the first one are the micro functions of the instrumental function. They are in the form of imperative utterances which states general imperatives, prohibitive imperatives, petitioned imperatives, inviting imperatives, expectant imperatives, offering imperatives, and suggestive imperatives. The second one are the micro functions of the representational function that are in the form of certainty consideration, possibility, reporting, warning, identifying, agreeing, objecting/disputing, and answering. The third are the micro functions of the regulatory function. They are in the form of endorsements, rule, and law statements. The fourth one is the micro function of the interactional function, which is to interact with the addressee (speaking partner). The fifth are the micro functions of the personal function, which are related to sense, emotion, and personality. The last one is the micro function of the heuristics function is to acquire knowledge.

Second, it is found that there are nine sorts of politeness degree markers. They are: analogy, diction or choice of words, language style, the use of adverbs or modality words, adverb of cause, adverb of effect, adverb of purpose, recognition of the targeted subject, and speech form. It is in these nine types of markers that enable the addressee (speaking partner) to measure the politeness degree of an utterance and to make use of them as communication strategies to convey a more polite utterance as an attempt that lead to a good communication process.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Konteks tuturan juga harus diperhatikan dalam berkomunikasi sebagai upaya memahami keseluruhan proses untuk merekonstruksi makna atau pun maksud yang terkandung di dalam komunikasi tersebut. Upaya untuk senantiasa melibatkan konteks dalam upaya mengkaji bahasa dalam proses komunikasi ini sesungguhnya menjadi bidang telaahan ilmu pragmatik..

Tulisan ini, secara berurutan penulis mencoba mengungkapkan gagasannya berdasarkan hasil penelitian terhadap tuturan di beberapa surat kabar mengenai jenis-jenis fungsi bahasa dalam tuturan di surat kabar-surat kabar itu dan jenis-jenis penanda tingkat kesantunan tuturan-tuturan tersebut. Penulis sungguh sadar bahwa upaya meneliti dan menuliskan kembali hasil penelitian ini dapat berjalan lancar karena berkat Tuhan yang tak terhingga kepada penulis. Selain itu, ada banyak pihak yang dengan caranya masing-masing telah memberikan sumbangan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, tidaklah terlalu berlebihan kalau penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Pranowo, M.Pd. yang bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. B. Widharyanto, M.Pd. yang bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Para dosen PBSID, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan;
4. FX. Sudadi dan R. Marsidiq, yang sudah membantu dan melayani penulis dalam mengurus berbagai hal yang sifatnya administratif;
5. Pihak Universitas Sanata Dharma, yang telah menciptakan kondisi serta menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung penulis dalam studi dan penyelesaian skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis sungguh sadar bahwa masih ada banyak pihak lain yang dengan berbagai caranya masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dalam keseluruhan proses pendidikan di USD. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada berbagai pihak itu yang namanya tidak sempat disebutkan satu per satu di dalam tulisan ini, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini mungkin tidaklah seideal yang dipikirkan para pembaca; masih ada banyak kekurangan. Dengan kenyataan itu, tentunya segala bentuk saran, sumbang pikiran, dan kritik yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan tulisan ini sangatlah diharapkan dan diterima dengan lapang dada.

Yogyakarta, 12 Maret 2012

Penulis



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA..... | vi |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penulisan..... | 8 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | | |
|---------|---|----|
| 1.5 | Definisi Istilah..... | 9 |
| 1.6 | Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| 1.7 | Sistematika Penulisan..... | 11 |
| | | |
| BAB II | LANDASAN TEORI..... | 12 |
| 2.1 | Fungsi Komunikasi Bahasa..... | 12 |
| 2.1.1 | Fungsi Makro Bahasa..... | 13 |
| 2.1.2 | Fungsi Mikro Bahasa..... | 16 |
| 2.2 | Teori Kesantunan Berbahasa..... | 18 |
| 2.2.1 | Kaidah Kesantunan Berbahasa..... | 30 |
| 2.2.2 | Nilai-Nilai Pendukung Kesantunan Berbahasa..... | 32 |
| 2.2.3 | Bentuk Bahasa Santun..... | 34 |
| 2.3 | Kerangka Berpikir..... | 35 |
| | | |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN..... | 36 |
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 36 |
| 3.2 | Sumber Data dan Data Penelitian..... | 37 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.4 | Instrumen Penelitian..... | 39 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | |
|--|----|
| 3.5 Teknik Analisis Data..... | 39 |
| 3.6 Triangulasi..... | 41 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| 4.1 Deskripsi Data Penelitian..... | 42 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 43 |
| 4.2.1 Jenis-Jenis Fungsi Bahasa yang Terdapat dalam Tuturan di Surat Kabar..... | 44 |
| 4.2.1.1 Fungsi Bahasa Instrumental Berwujud Tuturan Imperatif..... | 44 |
| 4.2.1.2 Fungsi Bahasa Representasional..... | 54 |
| 4.2.1.3 Fungsi Bahasa Regulatori..... | 59 |
| 4.2.1.4 Fungsi Bahasa Interaksional..... | 61 |
| 4.2.1.5 Fungsi Bahasa Personal..... | 62 |
| 4.2.1.6 Fungsi Bahasa Heuristik..... | 65 |
| 4.2.2 Penanda Tingkat Kesantunan Tuturan di Dalam Surat Kabar..... | 66 |
| 4.2.2.1 Analogi..... | 67 |
| 4.2.2.2 Diksi atau Pilihan Kata..... | 68 |
| 4.2.2.3 Penggunaan Gaya Bahasa..... | 74 |
| 4.2.2.4 Penggunaan Keterangan Modalitas..... | 83 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | | |
|---------|---|-----|
| 4.2.2.5 | Penggunaan Keterangan Sebab..... | 89 |
| 4.2.2.6 | Penggunaan Keterangan Akibat..... | 90 |
| 4.2.2.7 | Penggunaan Keterangan Tujuan..... | 91 |
| 4.2.2.8 | Menyebutkan Subjek yang Menjadi Tujuan Tuturan..... | 92 |
| 4.2.2.9 | Bentuk Tuturan..... | 95 |
| 4.3 | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 100 |
| BAB V | PENUTUP..... | 115 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 115 |
| 5.2 | Saran..... | 116 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 117 |
| | LAMPIRAN..... | 119 |
| | Table Keabsahan Analisis Data..... | 206 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Manusia tidak lepas dari kegiatan berbahasa dalam kehidupannya sehari-harinya. Setiap orang pasti memerlukan komunikasi antarsesamanya. Salah satu alat yang utama adalah bahasa. Melalui kegiatan berbahasa tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat komunikasi (Sumarsono, 2004:143). Manusia dapat menyampaikan ide dan gagasannya kepada sesamanya. Setiap orang memiliki cara atau gayanya tersendiri dalam menyampaikan pesan atau informasi itu. Hal ini amat tergantung dari siapa lawan bicaranya (status sosial antara pembicara dengan lawan bicara), dalam situasi seperti apa (resmi/formal, tidak resmi/informal), di mana, dan aspek-aspek lain yang patut dipertimbangkan saat berkomunikasi.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan ketika dua atau lebih orang melakukan kegiatan berkomunikasi (bertukar pesan) adalah menjaga kesopansantunan atau keharmonisan antara pembicara dan lawan bicara. Sikap tersebut harus dijaga agar pembicara dan lawan bicara sama-sama merasa nyaman, dan tidak ada satu orang pun yang mengalami kerugian. Dalam bahasa Gunarwan,

tidak ada yang merasa kehilangan “muka”. Kushartanti (2005: 105) mengatakan bahwa sebuah interaksi sosial akan terjalin dengan baik jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, salah satunya adalah kesadaran akan bentuk sopan santun, yang dapat ditunjukkan dengan berbagai hal; misalnya dengan penggunaan bentuk pronomina tertentu dalam percakapan.

Konteks tuturan juga harus diperhatikan dalam berkomunikasi karena mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan, baik secara fisik maupun nonfisik, yang diartikan sebagai semua latar belakang pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki dan dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur, serta mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan oleh si penutur itu di dalam keseluruhan proses bertutur. Konteks situasi pertuturan menurut Geoffrey N. Leech sebagaimana dikutip oleh Wijana (1996), mencakup aspek-aspek luar kebahasaan seperti berikut ini:

- a) penutur dan lawan tutur,
- b) konteks tuturan,
- c) tujuan tuturan,
- d) tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas,
- e) Tuturan sebagai produk tindak verbal (Rahardi, 2003:18-19).

Tujuan tutur berkaitan dengan bentuk-bentuk tuturan yang digunakan seseorang karena dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tutur yang sudah jelas dan tertentu sifatnya. Tuturan sebagai bentuk tindakan dari sebuah aktivitas bertutur. Tuturan dapat juga dipandang sebagai produk dari tindak verbal di dalam aktivitas

bertuturan sapa, contohnya, “ Ada anjing!”, bagi seorang anak kecil yang biasanya takut pada sosok hewan anjing, tuturan itu dapat digunakan sebagai alat untuk menyuruh atau memberi tahu agar dia berhenti bermain dan memberi tahu agar dia berhenti bermain dan segera pulang ke rumahnya.

Salah satu bidang kajian di dalam ilmu linguistik adalah pragmatik. Istilah pragmatik ini diberi batasan-batasan yang berbeda oleh beberapa ahli (pakar linguistik). Gunarwan (1994: 84) mengatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran atau daya (*force*) ujaran. Kushartanti (2005: 104) juga menyatakan “Apa yang dimaksud oleh para pengguna bahasa ketika berinteraksi inilah yang dipelajari dalam pragmatik. Tidak jauh berbeda dengan konsep pragmatik menurut Gunarwan dan Kushartanti, Levinson (1985) mengkaji pragmatik sebagai studi mengenai penggunaan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.

Sebagai contoh, kalimat *Ada anjing!* bahwa bermakna penutur ingin menyatakan atau memberi tahu kepada mitra tutur tentang keberadaan seekor anjing yang berkeliaran, ini adalah bidang kajian semantik. Tetapi, jika tuturan *Ada anjing!* itu dimaksudkan oleh penutur sebagai alat untuk menyuruh atau memberi tahu agar anak-anak berhenti bermain dan segera pulang ke rumahnya, ini adalah bidang kajian pragmatik. Para pakar linguistik itu sepakat bahwa bidang kajian dalam pragmatik itu adalah maksud ujaran, bukan makna kalimat yang diujarkan seseorang. Makna kalimat dikaji dalam semantik, sedangkan maksud atau daya suatu ujaran dikaji di dalam pragmatik (Sarwoyo, 2008: 17).

Fungsi bahasa juga berkaitan dengan konteks situasi tuturan. Menurut Rahardi (2003: 18), pragmatik merupakan studi ilmu bahasa yang mendasarkan pijakan analisisnya pada konteks situasi tuturan yang ada di dalam masyarakat dan wahana kebudayaan yang mewadahnya. Definisi ilmu pragmatik telah banyak disampaikan oleh para linguis. Ilmu bahasa yang berfokus pada makna atau maksud penutur disebut juga pragmatik. Makna yang dikaji dalam pragmatik bersifat terikat konteks.

Begitu pula, Kaswanti Purwo (1990) menjelaskan bahwa pijakan utama di dalam analisis pragmatik adalah konteks. Konteks yang dimaksud termasuk perihal siapa mengatakan kepada siapa, tempat dan waktu diujarkannya suatu kalimat, anggapan-anggapan mengenai yang terlibat di dalam tindakan mengutarakan kalimat itu. Lebih lanjut, Purwo menjelaskan bahwa kancah yang dijelajahi pragmatik (yang telah disepakati hingga kini) ada empat, yakni: (1) deiksis, (2) praanggapan, (3) tindak ujaran, dan (4) implikatur percakapan. Penelitian ini hanya mengkaji pragmatik seperti yang diungkapkan Levinson di atas, yakni penggunaan bahasa yang sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bila seseorang berkomunikasi, ia selalu menggunakan bahasa dengan memanfaatkan potensi fungsi komunikatif bahasa untuk menyampaikan pesan.

Kesantunan dalam berbahasa juga berperan penting dalam keberhasilan komunikasi. Kesantunan berbahasa bukan hanya dapat memperhalus pemakaian bahasa Indonesia tetapi juga dapat memperhalus budi pemakainya. Kesantunan berbahasa dengan memperhatikan aspek-aspek pada diri penutur maupun mitra tutur di antaranya jenis kelamin, umur, daerah asal, dan latar belakang keluarga serta latar

belakang sosial budaya lainnya dapat menjamin keberhasilan proses bertutur. Menurut Baryadi (2005), sopan santun atau tata krama itu adalah salah satu wujud penghormatan seseorang kepada orang lain. Penghormatan atau penghargaan terhadap sesama itu bersifat manusiawi. Saling menghargai merupakan salah satu kekhasan manusia sebagai makhluk berakal budi, yaitu makhluk yang selalu mendasari tindakannya berdasarkan pertimbangan akal budi, bukan berdasarkan insting.

Baryadi juga menjelaskan lebih lanjut bahwa menurut jenis perilakunya, sopan santun dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni sopan santun verbal dan sopan santun nonverbal. Sopan santun verbal adalah sopan santun perilaku dengan menggunakan bahasa atau sopan santun berbahasa seperti sopan santun berbicara, menyapa, menyuruh, menelepon, berterima kasih, meminta maaf, mengkritik, dan lain-lain. Sopan santun nonverbal adalah sopan santun perilaku biasa seperti makan, minum, bertamu, bergaul, berpakaian, dan berjalan. Jenis sopan santun yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sopan santun verbal.

Dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah masyarakat tutur, penggunaan bentuk tidak langsung ketika ingin menyampaikan suatu maksud kepada orang lain (mitra tutur) terabaikan. Dalam bahasa yang lain, masyarakat kita tidak jarang menggunakan bentuk tuturan langsung ketika akan menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Hal inilah yang menyebabkan komunikasi (proses penyampaian pesan) itu menjadi terdengar tidak santun.

Penggunaan bahasa Indonesia yang tergolong tidak santun juga banyak ditemukan di dalam komunikasi sehari-hari, di antaranya dalam surat kabar. Kenyataan tersebut bertolak belakang dengan cita-cita untuk mewujudkan sopan santun dalam berbahasa yakni ingin menyelamatkan muka lawan bicara. Agar lebih jelas perhatikan contoh-contoh di bawah ini.

- (1) *Pemerintah takut dikucilkan negara lain dan tidak mau dianggap melanggar HAM (Republika, 03/03/2008, hal. 5)*

Pernyataan di atas diucapkan oleh mantan ketua YLBHI Munarwan saat mengaku geram melihat penegakan HAM di Indonesia yang dinilainya lambat. Tuturan tersebut mengandung arti menuntut pemerintah bertindak tegas dalam kasus penegakan HAM di Indonesia. Dalam menyampaikan maksudnya itu, Munarwan memilih bentuk tuturan langsung, yang tampak dalam pemilihan diksi "*Pemerintah takut dikucilkan negara lain dan tidak mau dianggap melanggar HAM*" dan telah melanggar prinsip sopan santun yakni melanggar prinsip penggunaan tuturan tidak langsung untuk menjaga "muka" mitra tutur. Karena itu, tuturan ini dipersepsikan tidak santun oleh pendengar.

- (2) *"Problemnya, Komisi XI DPR itu absolut kewenangannya. Komisi XI punya hak penuh seleksi, mereka yang mendesain Undang-Undang BPK, mereka juga terlibat sebagai calon anggota BPK. Anggota DPR yang mencalonkan sebagai anggota BPK itu adalah mereka yang tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR. Ini membuktikan, mereka hanya pencari kerja. Mereka tak punya jabatan lagi" (Kompas, 17/ 8/2009 hal 2).*

Konteks dari pernyataan di atas yang diucapkan oleh Adnan Topan Husodo dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menanggapi dua tersangka korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Endin Soefihara dan Udju Djuhaeri yang

ternyata mencalonkan diri menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sejumlah kalangan meminta Komisi XI DPR menggugurkan calon anggota BPK yang memiliki cacat integritas dan tersangka korupsi.

Kalimat yang diucapkan Adnan Topan Husodo dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) di atas adalah kalimat pernyataan (deklaratif). Namun, tidak hanya sekadar sebagai sebuah pernyataan, tuturan itu sesungguhnya bermaksud meminta Komisi XI DPR untuk bersikap lebih tegas menindak pelaku korupsi yang merugikan negara dan mendukung langkah ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Di dalam surat kabar, tuturan-tuturan seperti pada contoh di atas sangat banyak ditemukan. Permasalahannya adalah tidak semua orang mampu memahami maksud yang ingin disampaikan penutur lewat tuturannya. Selain itu, identifikasi penanda-penanda kesantunan yang menunjukkan sebuah tuturan itu dipersepsikan santun atau tidak santun oleh pendengar. Dengan alasan itulah, penelitian ini bermaksud mengungkap berbagai penanda kesantunan apa saja yang menandakan bahwa ujaran itu santun atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Fungsi bahasa apa saja yang muncul dalam tuturan atau ujaran di surat kabar?

2. Penanda apa saja yang terdapat dalam tuturan tersebut yang menunjukkan tingkat kesantunan tuturan (ujaran) itu?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan fungsi-fungsi bahasa yang muncul dalam tuturan atau ujaran di surat kabar;
2. Mendeskripsikan penanda-penanda yang terdapat dalam tindak ujaran di surat kabar yang menunjukkan tingkat kesantunan tuturan (ujaran) tersebut.

1.4 Manfaat Penulisan

Bagaimanapun bentuk dan hasilnya, penelitian ini tentu tetap memberikan hasil dan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat-manfaat itu antara lain sebagai berikut.

- a. Penelitian ini tentunya memberikan sumbangan tersendiri bagi dunia penelitian bahasa, khususnya bidang pragmatik di Prodi PBSID karena selama ini penelitian yang berkaitan dengan (sosio)pragmatik masih terbatas;
- b. Diharapkan pula bahwa hasil temuan ini dapat membantu memperlancar komunikasi lintas budaya di dalam masyarakat Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya.

1.5 Batasan Istilah

Agar terdapat kesamaan persepsi dalam upaya memahami penelitian ini, kiranya beberapa istilah berikut penting untuk diketahui.

a. Fungsi bahasa

Fungsi bahasa dapat dinominkan dengan istilah penggunaan bahasa untuk berkomunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain.

b. Tuturan

Dalam KBBI (2007: 1231), tuturan diartikan sebagai sesuatu yang dituturkan; ucapan; ujaran. Tuturan ialah apa yang diucapkan atau dituturkan oleh seseorang atau beberapa orang. Di dalam penelitian ini tuturan yang dimaksud adalah tuturan-tuturan seseorang atau beberapa orang yang dimuat di dalam surat kabar.

c. Kesantunan

Di dalam KBBI (2007: 997), santun diartikan sebagai halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya). Kesantunan menurut Leech dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa kesantunan dapat tersirat dengan mematuhi nasihat minimkan pengungkapan pendapat tidak santun. Curse (2006: 362) dalam Gunawan (2005) merumuskan kembali anggapan tersebut menjadi pilihlah ungkapan yang paling tidak meremehkan status penutur.

d. Media Massa

Media massa merupakan salah satu media sangat berpotensi mempengaruhi penggunaan bahasa di masyarakat. Media massa berupa surat kabar memiliki

peran penting dalam upaya pendidikan, pengembangan ataupun pembinaan bahasa Indonesia. Ciri khas dari bahasa media cetak adalah adanya kecenderungan penggunaan istilah-istilah yang sudah populer dan umum digunakan masyarakat pembacanya (Handayani, 2008: 209).

e. Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan (KBBI, 2007: 410).

f. Politik

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (KBBI, 2007: 886).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena data penelitian didapatkan dari surat kabar. Sebagai suatu penelitian deskripsi kualitatif, penelitian ini hanya dibatasi pada upaya mendeskripsikan jenis-jenis fungsi bahasa dan jenis-jenis penanda kesantunan yang terdapat pada tuturan di dalam surat kabar *Kompas* Oktober s.d. Desember 2010. Peneliti menentukan tuturan di dalam surat kabar *Kompas* Oktober s.d. Desember 2010 karena pada bulan-bulan tersebut ada beberapa topik berita yang menarik untuk dianalisis berdasarkan fungsi bahasa dan kesantunan

berbahasa, misalnya isu keistimewaan DIY. Tuturan tokoh masyarakat yang diteliti berupa kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, beberapa dalam bahasa daerah, dan bahasa Inggris.

1.7 Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada bab I akan diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi istilah, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penyajian. Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi landasan teori (termasuk penelitian terdahulu) dan kerangka berpikir. Bab III berisi metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Bab IV berisi deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Fungsi Komunikasi Bahasa

Bidang pragmatik mengkaji fungsi ujaran atau fungsi bahasa daripada bentuk atau strukturnya. Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Melalui komunikasi, satu maksud atau satu fungsi dapat dituturkan dengan berbagai bentuk tuturan. Fungsi bahasa dapat disinonimkan dengan istilah penggunaan bahasa. Jadi, fungsi bahasa adalah cara orang menggunakan bahasa atau bahasa-bahasanya untuk menyampaikan pesan bila mereka berbahasa lebih dari satu (Pranowo, 1996: 91). Berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, Ventianus Sarwoyo (2008) melakukan penelitian berjudul *Tindak Ilokusi dan Penanda Tingkat Kesantunantuturan di dalam Surat Kabar (Suatu Tinjauan Sosiopragmatik)*. Populasi penelitian ini adalah semua tuturan yang ada di dalam surat kabar. Tuturan yang ada di dalam surat kabar ini tentu banyak sekali. Peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian sampel. Peneliti hanya mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang ada. Sampel yang diambil di dalam penelitiannya adalah tuturan yang ada di dalam surat kabar *Kompas*, *Republika*, *Jawa Pos*, *Suara Merdeka*, dan *Kedaulatan Rakyat* periode Maret-Mei 2008. Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang ada, ditemukan bahwa ada empat jenis tindak ilokusi yang muncul di

dalam surat kabar dan enam jenis penanda tingkat kesantunan tuturan . Keempat jenis tindak ilokusi itu adalah: direktif, representatif, komisif, dan ekspresif. Keenam jenis penanda tingkat kesantunan tuturan yang ditemukan, yakni: 1) analogi, 2) diksi atau pilihan kata, 3) gaya bahasa, 4) penggunaan keterangan atau kata modalitas, 5) penyebutan subjek yang menjadi tujuan tuturan, dan 6) bentuk tuturan. Di dalam suatu tuturan, penanda-penanda ini dapat terjadi hanya digunakan satu jenis penanda namun, dapat juga di dalam satu tuturan terkandung lebih dari satu penanda yang digunakan penutur.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori fungsi komunikasi bahasa berdasarkan Halliday, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul *Fungsi Bahasa dan Penanda Kesantunan Tuturan Tokoh Masyarakat dalam Surat Kabar Kompas Bulan Oktober s.d. Desember 2010*. Menurut Halliday, fungsi-fungsi bahasa secara teoritis dapat diklasifikasikan berdasarkan konsep di luar kebahasaan menjadi tujuh macam. Secara teoritis, fungsi-fungsi bahasa dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu fungsi makro dan fungsi mikro menjadi dua yaitu fungsi makro dan fungsi mikro.

2.1.1 Fungsi Makro Bahasa

Menurut Malinowski (dalam Pranowo, 1996: 91) menginterpretasi fungsi bahasa menjadi dua yaitu fungsi pragmatik dan fungsi magis. Fungsi pragmatik meliputi penggunaan bahasa secara aktif dan naratif, sedangkan fungsi magis lebih mengarah pada penggunaan bahasa dalam kegiatan upacara adat dan upacara keagamaan. Berbeda dengan Malinowski, Karl Buhler mengklasifikasikan fungsi

bahasa dari sudut individu menjadi tiga yaitu fungsi ekspresif, fungsi konatif, dan fungsi representasional. Fungsi ekspresif dikaitkan dengan penutur, fungsi konatif dikaitkan dengan mitra tutur, dan fungsi representasional mengacu pada objek tertentu yang berada di luar diri penutur dan mitra tutur (Sumarsono, 2004: 148).

Roman Jakobson memperluas fungsi bahasa yang diklasifikasikan Buhler menjadi enam fungsi bahasa. Selain fungsi ekspresif, fungsi konatif, dan fungsi representasional, Jakobson menambahkan fungsi poetik yang berkaitan dengan pesan, fungsi transaksional yang berkaitan dengan sarana, serta fungsi metalinguistik yang berkaitan dengan kode atau lambang-lambangnyanya. Austin dan Searle sebagai seorang filosof mengklasifikasikan fungsi bahasa menjadi lima yaitu (a) fungsi direktif berupa pemakaian bentuk perintah halus, (b) fungsi komisif berupa pemakaian bahasa sebagai janji atau bentuk penolakan terhadap sesuatu perbuatan, (c) fungsi representatif yaitu pemakaian bahasa untuk menyatakan fakta dan maklumat yang mewakili sesuatu hakikat atau realiti, fungsi deklaratif (d) yaitu pemakaian bahasa yang mengandung pernyataan baru, dan (e) fungsi ekspresif yaitu pemakaian bahasa untuk mengungkapkan sesuatu (Pranowo, 1996: 91-92).

Pengelompokan fungsi-fungsi bahasa di atas dilakukan berdasarkan konsep di luar kebahasaan sehingga kurang mencerminkan variasi fungsional makna. Halliday menyebutkan fungsi bahasa berkaitan dengan fungsi tutur. Fungsi tutur ini sejajar dengan tindak tutur di dalam pragmatik. Halliday mengklasifikasikan fungsi bahasa menjadi tujuh macam yaitu.

- (1) Fungsi instrumental yaitu fungsi bahasa yang dipergunakan untuk memanipulasi lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu. Sebagai contoh tuturan *Mahkamah mendapati kamu bersalah* dikatakan berfungsi instrumental. Tuturan tersebut merupakan bentuk komunikatif yang menyatakan sesuatu keadaan.
- (2) Fungsi representational yaitu penggunaan bahasa yang berfungsi untuk membuat pernyataan, menyajikan fakta dan maklumat yang mewakili sesuatu hakikat atau realiti, seperti *Bumi bulat* dan *Perdana Menteri berucap dalam majelis itu*.
- (3) Fungsi regulatori yaitu penggunaan bahasa untuk mengontrol suatu peristiwa (biasanya dalam bentuk pengesahan, penolakan, kawalan tingkah laku, atau pernyataan aturan dan undang-undang). Sebagai contoh tuturan *Saya dapati kamu bersalah dan kamu dijatuhi hukuman penjara tiga tahun* termasuk dalam fungsi instrumental, maka turunan *Oleh sebab berkelakuan baik, kamu akan dibebaskan sesudah menjalani hukuman penjara sepuluh bulan* tergolong dalam fungsi regulatori.
- (4) Fungsi interaksional yaitu penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menjaga hubungan agar komunikasi tetap dapat berjalan lancar. Fungsi ini terlaksana jika pengguna bahasa menguasai pengetahuan tentang slang, jargon, jenaka, cerita rakyat, kesantunan, dan unsur-unsur sosial lain dalam bahasa masyarakatnya.
- (5) Fungsi personal yaitu penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian.

- (6) Fungsi heuristik yaitu fungsi bahasa yang dipergunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
- (7) Fungsi imajinatif yaitu penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menciptakan sistem atau ide yang bersifat imajinatif. Fungsi bahasa yang memungkinkan bahasa digunakan untuk menghasilkan puisi, cerita, jenaka, ramalan, dan sebagainya.

Penelitian ini berdasarkan fungsi komunikatif bahasa menurut Halliday (Pranowo, 1996: 93). Fungsi bahasa tersebut untuk menentukan makna tuturan tokoh masyarakat, khususnya bidang politik dan hukum dalam surat kabar *Kompas* bulan Oktober s.d. Desember 2010. Klasifikasi fungsi komunikatif Halliday lebih rinci dan lengkap daripada klasifikasi para pakar bahasa yang lain. Untuk memperdalam mengenai fungsi bahasa ini, peneliti membahas fungsi-fungsi yang lebih khusus yang disebut fungsi mikro.

2.1.2 Fungsi Mikro Bahasa

Pranowo (1996) dalam bukunya *Analisis Pengajaran Bahasa* mengungkapkan bahwa klasifikasi fungsi komunikatif yang diungkapkan Halliday akan lebih sempurna apabila dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang lebih khusus yang disebut sub fungsi oleh Van Ek atau fungsi mikro oleh Guy Cook. Peneliti menggunakan klasifikasi fungsi bahasa mikro menurut Guy Cook untuk menganalisis makna tuturan tokoh masyarakat khususnya di bidang politik dan hukum dalam surat kabar *Kompas*

bulan Oktober s.d. Desember 2010. Klasifikasi fungsi mikro dapat diberikan sebagai berikut.

- a. Fungsi instrumental memiliki fungsi mikro untuk memesan, memerintah, memohon, menuntut, menyarankan, menantang, memesan, memberi nasihat.
- b. Fungsi representasional memiliki fungsi mikro untuk mengidentifikasi, menjawab, melaporkan, berkata, memikirkan sesuatu, menyetujui atau menolak, mengetahui atau tidak mengetahui, mengingat atau melupakan, mempertimbangkan kemungkinan atau ketidakmungkinan, mempertimbangkan kelogisan sesuatu, mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian, meminta atau memberi izin, menerima atau menolak tawaran atau undangan.
- c. Fungsi regulatori memiliki fungsi mikro dalam bentuk pengesahan, penolakan, kawalan tingkah laku, atau pernyataan aturan dan undang-undang.
- d. Fungsi interaksional memiliki dasar dipergunakan untuk berinteraksi antara orang satu dengan orang lain.
- e. Fungsi personal memiliki fungsi mikro untuk memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, mengucapkan selamat.
- f. Fungsi heuristik memiliki dasar dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan serta untuk mengenal lingkungan, khususnya yang melibatkan jenis kalimat tanya.

- g. Fungsi imajinatif memiliki fungsi mikro untuk mengungkapkan khayalan dan gagasan.

2.2 Teori Kesantunan Berbahasa

Sopan santun atau tata krama adalah salah satu wujud penghormatan seseorang kepada orang lain. Menurut jenis perilakunya, sopan santun dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sopan santun nonverbal dan sopan santun verbal. Sopan santun nonverbal, contohnya perilaku seperti makan, minum, bertamu, bergaul, berpakaian, dan berjalan sedangkan sopan santun verbal merupakan sopan santun perilaku dengan menggunakan bahasa atau sopan santun, seperti berbicara, menyapa, menyuruh, menelepon, berterima kasih, meminta maaf, mengkritik. Berikut pandangan dari para ahli tersebut mengenai kesantunan berbahasa.

a. Teori Sopan Santun Berbahasa yang Dikemukakan Leech (1983)

Secara garis besar teori sopan santun berbahasa menurut Leech mencakup tiga hal, yaitu mengenai jenis tindak tutur yang mengandung sopan santun, skala kesantunan tuturan, dan prinsip kesopanan.

1) Jenis Tindak Tutur yang Mengandung Sopan Santun

Di atas sudah dikemukakan pembagian jenis tindak tutur menurut Leech. Leech pada dasarnya membagi tindak tutur menurut fungsinya. Maka muncullah tindak tutur kompetitif, tindak tutur konvival, tindak tutur kolaboratif, dan tindak tutur konflikatif. Dari keempat jenis tindak tutur tersebut, menurut Leech, tindak tutur yang melibatkan sopan santun adalah

tindak tutur kompetitif dan tindak tutur konvival. Pada tindak tutur kompetitif, sopan santun mempunyai sifat negatif dan tujuannya adalah mengurangi ketidakharmonisan yang tersirat dalam kompetisi antara apa yang dicapai oleh penutur dengan apa yang dituntut oleh sopan santun. Pada tindak tutur yang konvival, sopan santun lebih positif bentuknya dan bertujuan mencari kesempatan untuk beramah tamah. Tindak tutur kolaboratif tidak melibatkan sopan santun karena tindak tutur tersebut bertujuan untuk menyampaikan sesuatu secara objektif. Tindak tutur konfliktif sama sekali tidak melibatkan sopan santun (Sarwoyo, 2009: 30).

2) Skala Kesantunan (Leech, 1983; Oka, 1993)

Leech (mengidentifikasi tiga skala yang menunjukkan derajat kesantunan yang sesuai untuk suatu situasi percakapan tertentu. *Pertama*, skala untung-rugi. Skala ini berkenaan dengan keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh sebuah tindakan penutur dan mitra tutur. *Kedua*, skala kemanasukaan. Skala ini mengurut ilokusi-ilokusi menurut jumlah pilihan yang diberikan penutur kepada mitra tutur. Tuturan memiliki derajat kesantunan yang tinggi apabila penutur memberikan banyak pilihan kepada mitra tutur. *Ketiga*, skala ketaklangsungan. Tuturan semakin tak langsung menunjukkan semakin tinggi derajat kesantunan tuturan itu. Sebaliknya, tuturan yang diungkapkan langsung kepada mitra tutur, menunjukkan semakin rendah derajat kesantunan tuturan itu.

Selain tiga skala yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua skala lagi yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa yaitu skala otoritas dan skala jarak sosial. Skala otoritas menunjukkan bahwa semakin tinggi otoritas penutur terhadap mitra tutur, semakin rendahlah derajat kesopanan tuturannya. Sebaliknya semakin rendah otoritas penutur terhadap mitra tutur, semakin tinggilah derajat kesopanan tuturan itu. Sedangkan, skala jarak sosial menunjukkan semakin jauh jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur, semakin tinggilah derajat kesopanan tuturan itu. Sebaliknya, semakin dekat jarak sosial antara penutur dengan mitra tutur, semakin rendahlah derajat kesopanan tuturan tersebut.

3) Prinsip Kesantunan

Leech menjabarkan prinsip kesopanan tuturan ke dalam enam maksim; setiap maksim mengandung dua kaidah yang berpasangan. Pertama, maksim kearifan (disebut juga sebagai maksim kebijaksanaan, maksim timbang rasa, maksim kepedulian) yang menyatakan: (1) “Perkecil kerugian pada orang lain” dan (2) “Tingkatkan keuntungan pada orang lain”. Kedua, maksim kedermawanan (disebut juga maksim kemurahan hati, maksim kebaikan hati, maksim penerimaan) yang menyatakan: (1) “Perkecil keuntungan pada diri sendiri” dan (2) “Tingkatkan keuntungan pada orang lain”. Ketiga, maksim pujian (disebut juga maksim penghargaan, maksim kemurahan) yang mengungkapkan: (1) “Perkecil kurangnya penghargaan pada orang lain” dan (2) “Tingkatkan penghargaan pada orang lain”. Keempat, maksim kerendahan

hati (disebut juga maksim kesederhanaan, maksim kesahajaan) yang menyatakan: (1) “Perkecil pujian pada diri sendiri” dan (2) “Perbesar pujian pada orang lain”. Kelima, maksim kesepakatan (disebut juga maksim pemufakatan, maksim kesetujuan, maksim kecocokan) yang menyatakan: (1) “Usahakan ketaksepakatan antara penutur dan mitra tutur terjadi sekecil mungkin” dan (2) “Usahakan kesepakatan antara penutur dan mitra tutur terjadi sebanyak mungkin”. Keenam, maksim simpati (disebut juga maksim kesimpatisan) yang menyatakan: (1) “Kurangilah rasa antipati antara penutur dengan mitra tutur hingga sekecil mungkin” dan (2) “Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara penutur dengan mitra tutur”.

b. Teori Sopan Santun Menurut Brown dan Levinson

Teori sopan santun menurut Brown dan Levinson ini meliputi konsep sopan santun dan skala kesopanan.

1) Konsep Sopan Santun

Menurut Brown dan Levinson, sopan santun berbahasa berkaitan dengan apa yang disebut dengan “penyelamatan muka” (*face saving*) yang melambangkan citra diri orang. Muka di dalam pengertian kiasan ini dikatakan terdiri atas dua wujud, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif mengacu ke citra diri seseorang bahwa segala yang berkaitan dengan dirinya itu patut dihargai. Sedangkan muka negatif merujuk ke citra diri seseorang yang berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauannya. Kesantunan

untuk menjaga muka positif disebut kesantunan positif dan kesantunan untuk menjaga muka negatif disebut kesantunan negatif. Yang pertama itu mengacu ke strategi bertutur dengan cara menonjolkan kedekatan, keakraban, hubungan baik antara penutur dan mitra tutur. Yang kedua itu merujuk ke strategi bertutur yang menunjukkan adanya jarak sosial di antara penutur dan mitra tutur (Gunarwan, 2007:105).

2) Skala Kesopanan

Skala Kesantunan menurut Brown Dan Levinson (Rahardi, 2005: 68-69) berbeda dengan yang disampaikan oleh Leech. Di dalam model kesantunan Brown and Levinson terdapat tiga skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan. Ketiga skala tersebut ditentukan secara kontekstual, sosial, dan kultural. Berikut uraian dari setiap skala tersebut.

- a) Skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur banyak ditentukan oleh parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural, contohnya guru, lazimnya didapatkan bahwa semakin tua umur seseorang, peringkat kesantunan dalam bertuturan akan menjadi semakin tinggi.
- b) Skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur atau peringkat kekuasaan didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur, contoh bahwa di dalam ruang periksa sebuah rumah sakit, seorang dokter memiliki peringkat kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang pasien.

c) Skala tindak tutur didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainnya, contoh, dalam situasi yang sangat khusus, bertamu di rumah seorang wanita dengan melewati batas waktu bertamu yang wajar akan dikatakan sebagai tidak tahu sopan santun dan bahkan melanggar norma kesantunan yang berlaku dalam masyarakat tutur itu.

c. Teori Sopan Santun Berbahasa Menurut Lakoff (Baryadi, 2005: 77)

Lakoff mengemukakan tiga kaidah kesopanan, yaitu (a) formalitas, menggariskan bahwa dalam melakukan tindak tutur janganlah memaksa dan jangan bersikap angkuh, (b) ketidaktegasan, menganjurkan agar dalam berkomunikasi penutur membuat mitra tutur dapat menentukan pilihan secara bebas, dan (c) kesamaan atau kesekawanan, menegaskan bahwa untuk menciptakan kesopanan berbahasa, penutur harus menganggap mitra tutur sebagai sesama yang memiliki derajat dan martabat yang sama. Berdasarkan ketiga kaidah tersebut, dapat dikatakan bahwa tuturan yang sopan adalah tuturan yang tidak menunjukkan keangkuhan, tuturan yang memberikan pilihan kepada mitra tutur, dan tuturan yang menunjukkan kesederajatan penutur dengan mitra tutur.

d. Teori Sopan Santun Menurut Fraser (Baryadi, 2005: 77-78)

Fraser (1990) mengklasifikasikan teori sopan santun berbahasa menjadi empat kelompok menurut karakteristik sudut pandangnya. Pertama, teori sopan santun berbahasa yang bertumpu norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat

tertentu. Kedua, kesopanan merupakan maksim percakapan dan sebagai usaha penyelamatan muka. Ketiga, teori sopan santun berbahasa merupakan perwujudan pemenuhan kontrak sosial. Keempat, teori sopan santun berbahasa ini bertolak dari pandangan bahwa kesopanan merupakan sebuah indeks sosial dan dapat diidentifikasi dalam bentuk-bentuk referensi-referensi sosial, honorifik, dan gaya bahasa.

e. Prinsip Kerja Sama Grice (Menurut Rahardi, 2005: 53-59)

Prinsip kerja sama dikemukakan oleh Grice sebagai nasihat bagi orang yang berkomunikasi di dalam percakapan agar komunikasi di dalam percakapan berlangsung dengan efisien. Prinsip kerja sama ini dijabarkan menjadi empat maksim sebagai berikut.

1) Maksim Kuantitas

Di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya. Informasi ini tidak berlebihan dan tidak kurang, dengan kata lain tepat, contohnya

(1) “ Rapikan mainan itu, Toni!”

(2) “ Rapikan mainan-mainan yang berserakan itu sebelum kamu nonton tv, Toni!”

Tuturan (1) dan (2) dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang kebetulan meja ruang tamu berserakan dengan mainan mobil-mobilan di atasnya.

Tuturan (1) dalam contoh di atas merupakan yang sudah jelas dan informatif isinya. Tanpa harus ditambah dengan informasi lain, tuturan itu sudah dapat dipahami maksudnya dengan baik dan jelas oleh si mitra tutur. Penambahan informasi seperti ditunjukkan pada tuturan (2) justru akan menyebabkan tuturan menjadi berlebihan dan terlalu panjang.

2) Maksim Kualitas

Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur, contoh:

(3) “ Silakan membolos saja saat pelajaran saya biar saya juga mudah menilainya”

(4) “ Jangan membolos saat pelajaran saya, nilainya bisa E!”

Tuturan (3) dan (4) dituturkan oleh guru kepada siswanya di dalam ruang kelas pada saat ia melihat beberapa siswa lain masih di luar sekolah (*nongkrong*).

Tuturan (4) jelas lebih memungkinkan terjadinya kerja sama antara penutur dengan mitra tutur. Tuturan (3) dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seseorang. Akan merupakan sesuatu kejanggalan

apabila di dalam dunia pendidikan terdapat seorang guru yang mempersilakan para siswanya membolos pada waktu pelajaran tertentu.

3) Maksim Relevansi

Di dalam maksim relevansi, dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan, tetapi ada kalanya prinsip tersebut tidak digunakan dalam situasi tertentu, contohnya

(5) Direktur: “Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu!”

Sekretaris: “Maaf, Bu, kasihan sekali nenek tua itu.”

Dituturkan oleh seorang Direktur kepada sekretarisnya pada saat mereka bersama-sama bekerja di sebuah ruang kerja Direktur. Pada saat itu, ada seorang nenek tua yang sudah menunggu lama.

Di dalam cuplikan percakapan di atas, sekretaris berkata, ”Maaf, Bu, kasihan sekali nenek tua itu” tidak memiliki relevansi dengan apa yang diperintahkan direktur, “Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu!”. Tuturan dapat dipakai sebagai salah satu bukti bahwa maksim relevansi dalam prinsip kerja sama tidak selalu harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pertuturan sesungguhnya.

4) Maksim Pelaksanaan

Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur, contoh

(6) Anak: “ Bu, besok saya akan pulang lagi ke kota.”

Ibu: “ Itu sudah saya siapkan di laci meja.”

Dituturkan oleh seorang anak yang masih mahasiswa kepada ibunya pada saat ia meminta uang saku untuk hidup di sebuah rumah kos di kota. Tuturan itu terjadi pada waktu mereka berdua berada di dapur sedang memasak bersama. Tuturan yang dituturkan anak, “Bu, besok saya akan pulang lagi ke kota.” relatif kabur maksudnya. Maksud yang sebenarnya dari tuturan si anak bukanlah memberitahu sang ibu bahwa dia akan segera kembali ke kota, melainkan lebih dari itu, yakni bahwa ia sebenarnya ingin menanyakan apakah sang ibu sudah siap dengan sejumlah uang yang diminta sebelumnya.

f. Teori Sopan Santun Menurut Poedjosoedarmo (Baryadi, 2005:78-79)

Poedjosoedarmo merupakan salah satu ahli yang secara khusus membahas sopan santun berbahasa Indonesia. Poedjosoedarmo menguraikan gagasan tentang sopan santun berbahasa dengan kerangka berpikir yaitu tujuh komponen tutur yang dikemukakan oleh Gumperz dan Hymes. Ketujuh komponen itu adalah (1) partisipan komunikasi yang terdiri dari penutur, mitra tutur, dan pihak ketiga; (2) bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan; (3) topik pembicaraan; (4) tujuan

pembicaraan; (5) peristiwa dan situasi tutur; (6) norma bahasa yang ditaati oleh masyarakat; (7) sesuatu yang digunakan dan dijadikan dasar tuturan.

Berdasarkan tujuh komponen tutur tersebut, disusunlah tujuh prinsip sopan santun dalam berbahasa Indonesia, yaitu (1) kendalikan emosi Anda dan jangan mudah lepas kontrol dalam berbicara; (2) tunjukkan sikap bersahabat dengan menampakkan kesiapsediaan untuk berkomunikasi dengan mitra tutur; (3) pilihlah kode bahasa yang dimengerti oleh mitra tutur, tepat untuk hubungan antara penutur dan mitra tutur, dan cocok dengan peristiwa dan situasi tindak tutur; (4) pilihlah topik yang disukai oleh mitra tutur dan cocok dengan situasi; (5) ungkapkan tujuan pembicaraan dengan jelas; (6) ucapkan kalimat-kalimatnya dengan enak; (7) perhatikan norma tindak tutur yang lain seperti urutan tindak tutur dan gerakan tubuh.

Berdasarkan teori kesantunan berbahasa, Gunarwan melakukan penelitian yang berjudul “Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 1994 dan telah dimuat di buku PELLBA 7 (hal. 81-109). Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Hierarki kesantunan direktif bahasa Indonesia dan hierarki kesantunandirektif bahasa Jawa ternyata pada dasarnya sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa para subjek penelitian ini menggunakan satu norma kebudayaan di dalam menilai kesantunan bentuk-bentuk ujaran direktif di dalam kedua bahasa itu.
- 2) Tidak ada perbedaan penilaian kesantunan direktif bahasa Indonesia menurut variabel kelompok umur. Implikasinya adalah bahwa norma penilaian

kesantunan tindak ujaran (khususnya tindak ujaran direktif) bahasa Indonesia tidak atau belum bergeser. Implikasi yang serupa, untuk bahasa Jawa, dapat ditarik dari temuan yang lain, yaitu bahwa tidak ada perbedaan penilaian kesantunan direktif bahasa Jawa menurut kelompok umur. Namun, yang perlu dicatat mengenai dua temuan ini ada dua hal, yaitu (1) derajat kesamaan kedua hierarkhi kesantunan bahasa Jawa (menurut kelompok umur) ternyata lebih kecil daripada derajat kesamaan yang bahasa Indonesia; dan (2) kesamaan kedua hierarkhi kesantunan direktif bahasa Jawa itu mengandung paradoks.

- 3) Ketaklangsungan tindak ujaran tidak sejajar dengan kesantunan, seperti yang terlihat dari adanya perbedaan di antara hierarkhi penelitian dan hierarkhi teoretis di dalam bagaian terdahulu. Temuan ini mendukung temuan terdahulu yakni temuan Gunarwan tahun 1992. Implikasinya adalah bahwa walaupun kesantunan berbahasa itu memang bersifat semesta (universal), manifestasinya berbeda-beda menurut masyarakat budayanya.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Pranowo (2009) berjudul *Kesantunan Berbahasa Tokoh Masyarakat (Suatu Tinjauan Pragmatik)*. Data penelitian berupa (a) pemakaian Bahasa Indonesia oleh para tokoh di televisi yang melibatkan pemirsa. Data ini diambil pada bulan Maret dan April 2008, (b) pemakaian Bahasa Indonesia di surat kabar nasional (Kompas, Republika, Jawa Pos), surat kabar lokal (Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Surabaya Post). Data diambil pada bulan Maret dan April 2008. (c) Wawancara dengan tokoh (Kepala Pusat Bahasa, Kepala Balai Bahasa DIY, Kepala Balai Bahasa Jateng, Gubernur

DIY dan Jateng). Data wawancara diambil pada bulan Maret dan April 2008.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kajian kesantunan berbahasa tokoh masyarakat secara pragmatik ternyata memperlihatkan bahwa tokoh masyarakat masih banyak yang belum mampu berbahasa secara santun.
- 2) Bahasa yang santun adalah bahasa yang mampu menjaga harkat dan martabat diri penutur dan tidak menyakiti hati mitra tutur.
- 3) Berbahasa secara santun merupakan cermin budi luhur dan pekerti baik seseorang “*ajining dhiri, gumantung obahing lathi*”. Jika ingin dihormati orang lain, jagalah ucapan dan tutur kata “*berjalan pelihara langkah, bertutur pelihara lidah*”.
- 4) Kemampuan berbahasa secara santun tidak ditentukan oleh pangkat dan kedudukan atau jabatan tetapi ditentukan oleh level budaya seseorang.
- 5) Banyak orang yang secara sosial tergolong level menengah atau atas, tetapi secara kultural masih tergolong level *dhupak bujang*.
- 6) Dokumen tata kesantunan berbahasa perlu segera disusun agar masyarakat memiliki pedoman untuk mempelajari kesantunan berbahasa.

2.2.1 Kaidah Kesantunan Berbahasa

Menurut Hymes (dalam Pranowo, 2009), menyatakan bahwa ketika seseorang bertutur hendaknya memperhatikan beberapa komponen tutur yang diakronimkan dengan istilah SPEAKING. Secara sederhana, SPEAKING dapat diuraikan sebagai

berikut: (a) *Setting and Scene* (latar) yang merujuk pada tempat dan waktu terjadinya percakapan. Misalnya, percakapan yang terjadi di Istana Kepresidenan pukul 11.00 WIB, (b) *Participants* (Peserta) yang merujuk pada peserta percakapan: penutur dan mitra tutur. Misalnya, percakapan yang melibatkan Sultan Hamengku Buwono X dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (c) *Ends* (Akhir) yang mengacu pada hasil percakapan (yang diperoleh secara sengaja atau tidak) dan tujuan percakapan. Misalnya, seorang pengajar bertujuan menerangkan kuliah penelitian pendidikan bahasa dan sastra secara menarik, tetapi hasilnya dapat terjadi sebaliknya yakni mahasiswa menjadi bosan karena mereka datang ke kelas hanya bertujuan untuk bersantai-santai saja. (d) *Act Sequence* (pesan yang ingin disampaikan) yang mengacu pada bentuk dan pesan yang ingin disampaikan. Bentuk pesan dapat disampaikan dalam bahasa tulis misalnya berupa permintaan, sedangkan isi pesan adalah wujud permintaan.

(e) *Key* (kunci) yakni merujuk pada pelaksanaan percakapan. Maksudnya, bagaimana pesan itu disampaikan kepada mitra tutur. Untuk menyampaikan pesan, penutur dapat menggunakan berbagai cara. Misalnya, maksud penutur ingin bertanya tetapi cara peyampaiannya menggunakan bentuk berita. (f) *Instrumentalities*, yakni merujuk pada bentuk penyampaian; apakah lisan atau tulisan. Misalnya, kuliah pragmatik disajikan secara lisan dalam bahasa Indonesia dengan beberapa keterangan tertulis di papan tulis. (g) *Norms* (norma), yaitu pranata sosial kemasyarakatan yang mengacu pada norma perilaku partisipan dalam berkomunikasi (h) *Genres* (ragam), yang mengacu pada ragam bahasa yang digunakan, misalnya ragam santai.

2.2.2 Nilai- Nilai Pendukung Kesantunan Berbahasa

Pranowo (2009) mengatakan bahwa berbahasa secara santun dapat memanfaatkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai luhur dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Sifat rendah hati

Sifat rendah hati sebagai salah satu nilai yang diluhurkan dalam budaya Jawa merupakan sikap universal manusia. Artinya, manusia di mana pun dapat memiliki sifat rendah hati dan dapat mewujudkannya dalam percakapan. Dengan sikap rendah hati, berbagai sikap lain akan tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang, seperti tenggang rasa, rasa malu, menjaga perasaan, rasa hormat, rukun, mau mengalah, mau berkorban, “angon wayah”.

b. Sikap empan papan

Empan papan adalah kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tempat dan waktu dalam bertindak dengan mitra tutur. Sikap ini dianggap sebagai nilai luhur karena seseorang mampu mengendalikan diri untuk tidak mengganggu orang lain dalam situasi tertentu yang berbeda dengan situasi normal. Misalnya, ketika seseorang sedang berdoa dalam upacara kematian, sudah sepantasnya jika berbicara harus pelan-pelan, topik yang dibicarakan khusus yang berkaitan dengan musibah yang dialami mitra tutur sebagai perwujudan rasa empati terhadap mitra tutur.

c. Sikap menjaga perasaan

Dalam berkomunikasi, masyarakat Jawa tidak hanya menggunakan pikiran dalam mengungkapkan suatu maksud tuturan. Meskipun yang ingin dikomunikasikan adalah buah pikiran, tetapi ketika akan menyampaikan maksud kepada mitra tutur, biasanya terlebih dahulu berusaha menjaga perasaan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis mitra tutur. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi selalu terjaga kesantunannya.

d. Sikap mau berkorban

Orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati adalah orang yang selalu mengutamakan sikap dan sifat “*sepi ing pamrih rame ing gawe*”, dan “*wani ngalah luhur wekasane*”. Sifat “*sepi ing pamrih rame ing gawe*” adalah kesanggupan seseorang untuk mau berkorban dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan tetap mau bekerja keras untuk kepentingan orang lain. Sedangkan sifat “*wani ngalah luhur wekasane*” adalah kesanggupan seseorang untuk mau mengendalikan egonya demi kebaikan orang lain.

e. Sikap mau mawas diri

Setiap orang hendaknya mampu mawas diri terhadap segala yang pernah dilakukannya. Dalam budaya Jawa, mawas diri ini dinyatakan dengan ungkapan *mulat salira hangrasa wani* dan harus selalu *bisa rumangsa, aja rumangsa bisa*. Artinya, keberanian seseorang untuk mawas diri, manifestasinya adalah selalu tahu diri. Jangan *rumangsa bisa* (merasa serba bisa) karena betapa pun hebatnya

seseorang, sebenarnya orang lain ada yang lebih hebat. *Bisa rumangsa* adalah cermin kerendahan hati, sedangkan *rumangsa bisa* merupakan cermin kesombongan.

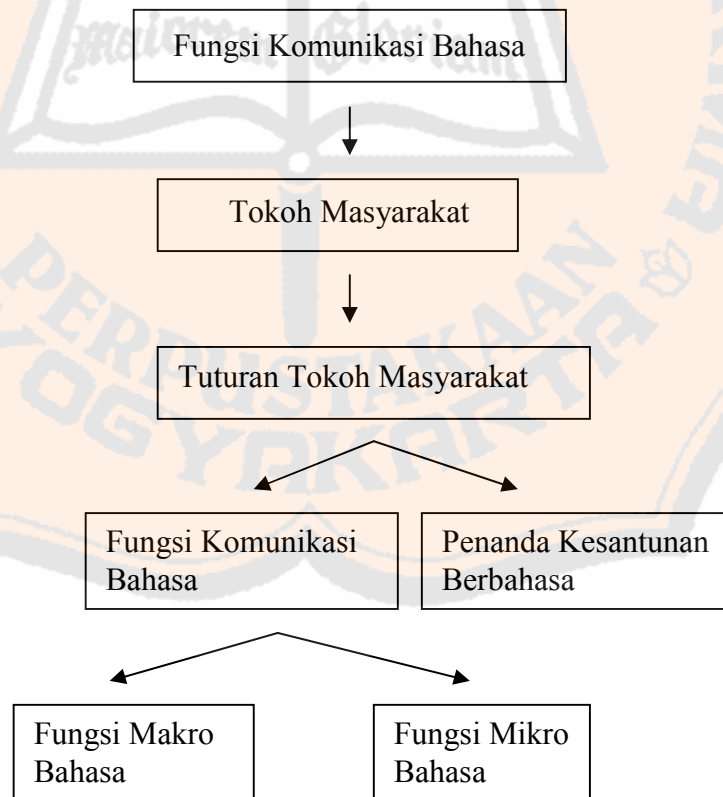
2.2.3 Bentuk Bahasa Santun

Menurut Pranowo (2009: 6-7), bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang bahkan cermin kepribadian bangsa. Ungkapan kepribadian yang baik, santun pada seseorang mencerminkan budi halus dan pekerti luhur. Pemakaian bahasa yang santun tersebut juga dapat menunjang keberhasilan komunikasi antara penutur dengan mitra tutur. Agar pemakaian bahasa terasa semakin santun, penutur menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang dapat dinilai sebagai bahasa santun. Bentuk-bentuk bahasa santun adalah sebagai berikut.

- a. Menggunakan tuturan tidak langsung biasanya terasa lebih santun apabila dibandingkan dengan tuturan yang diungkapkan secara langsung.
- b. Pemakaian bahasa dengan kata-kata kias terasa lebih santun dibandingkan dengan pemakaian bahasa dengan kata-kata lugas.
- c. Ungkapan memakai gaya bahasa penghalus terasa lebih santun dibandingkan dengan ungkapan biasa.
- d. Tuturan yang dikatakan berbeda dengan yang dimaksudkan biasanya terasa tuturan lebih santun.
- e. Tuturan yang dikatakan secara implisit biasanya lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang dikatakan eksplisi

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian yang berjudul “*Fungsi Bahasa dan Penanda Tingkat Kesantunantuturan Tokoh Masyarakat Dalam Surat Kabar (Kompas Bulan Oktober s.d. Desember 2010)*” membahas mengenai tuturan tokoh masyarakat. Tuturan tokoh masyarakat ini akan dianalisis berdasarkan fungsi komunikasi bahasa menurut Halliday. Fungsi komunikasi bahasa tersebut memiliki fungsi makro dan fungsi mikro bahasa. Halliday mengklasifikasikan fungsi bahasa (fungsi makro bahasa) berdasarkan konsep di luar kebahasaan menjadi tujuh macam. Tahap selanjutnya peneliti menganalisis data tuturan tersebut berdasarkan penanda kesantunan berbahasa. Berikut bagan yang disusun peneliti berdasarkan uraian di atas.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang: (1) jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) populasi dan sampel penelitian, (4) instrumen penelitian, (5) metode pengumpulan data, dan (6) analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa (*language use*) tokoh-tokoh masyarakat di dalam surat kabar. Karena mengkaji penggunaan bahasa tokoh masyarakat, dalam hal ini di dalam surat kabar, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sosiopragmatik Leech (Gunarwan, 1994: 83) mengungkapkan bahwa sosiopragmatik adalah salah satu dari dua sisi linguistik, yang sisi lainnya adalah pragmalinguistik. Yang pertama berhubungan dengan sosiologi dan yang kedua (pragmalinguistik) berhubungan dengan tatabahasa. Gunarwan memberi catatan berkaitan dengan tatabahasa yang dikaji dalam pragmalinguistik yakni bahwa tatabahasa yang dimaksudkan adalah seperti yang dipakai di dalam paradigma linguistik generatif transformasional (yaitu, meliputi fonologi dan semantik), bukan seperti yang dipakai di dalam paradigma linguistik struktural (yaitu, terbatas pada morfologi dan sintaksis saja). Menurut Leech (Oka, 1993: 15) sosiopragmatik

didasarkan pada kenyataan bahwa Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun beroperasi secara berbeda dalam kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat bahasa yang berbeda, dalam situasi-situasi sosial yang berbeda, dalam kelas-kelas sosial yang berbeda, dan sebagainya. Sosiopragmatik merupakan titik pertemuan antara sosiologi dan pragmatik.

Penelitian tentang fungsi bahasa dan penanda tingkat kesantunan tuturan tokoh masyarakat dalam surat kabar *Kompas* bulan Oktober s.d. Desember 2010 termasuk penelitian dasar atau murni karena penelitian ini bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Penelitian dasar ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber tertulis yakni dokumen-dokumen surat kabar *Kompas* bulan Oktober s.d. Desember 2010 sebagai sumber data. Data dalam penelitian ini berwujud kalimat-kalimat, yakni tuturan-tuturan yang ada di dalam surat kabar beserta konteksnya (siapa yang berbicara dan pada situasi seperti apa orang itu berbicara). Peneliti memilih surat kabar *Kompas* dengan topik berita berkaitan dengan politik dan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai berita informasi dari bidang politik dan hukum itu besar kemungkinan terdapat tuturan (yang berbentuk tanggapan seorang tokoh terhadap suatu peristiwa yang

terjadi) berbagai tokoh dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda. Pemilihan surat kabar *Kompas* untuk dijadikan sumber data juga disebabkan kemudahan peneliti untuk menjangkaunya.

Selain berbagai alasan yang dikemukakan di atas, alasan lain yang menyebabkan peneliti memilih tuturan di dalam surat kabar *Kompas* selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 adalah karena selama bulan Oktober-Desember 2010 ada beberapa peristiwa penting yang berskala nasional yang kemudian mengundang reaksi dari berbagai kalangan sehingga mereka melontarkan beragam jenis tuturan (tindak tutur). Beberapa peristiwa penting itu antara lain pemberantasan korupsi di Indonesia, konflik internal di BK DPR, dan RUU Keistimewaan DIY. Selain alasan tersebut, pertimbangan lain adalah oplah surat kabar Kompas yang besar dan mudah didapatkan oleh peneliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah teknik baca catat. Penerapan teknik ini dengan cara membaca kemudian mencatat penggunaan bahasa tokoh-tokoh masyarakat dalam surat kabar yang merupakan bahan tertulis (berwujud dokumen). Kegiatan mencatat tersebut dilakukan untuk menjangring (mengumpulkan) data dari sumber tertulis. Pertama-tama yang dilakukan penulis ketika meneliti adalah membaca pemakaian atau penggunaan bahasa di dalam surat kabar. Setelah membaca, peneliti kemudian mencatat beberapa bentuk yang

relevan bagi penelitian dari penggunaan bahasa secara tertulis tersebut. Kartu data yang dipakai untuk mencatat data itu berupa buku tulis.

3.4 Instrumen Penelitian

Berdasarkan penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Peneliti memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksana pengumpulan data. Peneliti sebagai instrumen kunci berbekal pengetahuan mengenai pragmatik, khususnya teori tindak tutur dan kesantunan berbahasa.

3.5 Teknik Analisis Data

Data-data yang akan diperoleh dari penelitian berupa kalimat-kalimat dari tuturan tokoh masyarakat yang ada di dalam surat kabar. Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, pencatatan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang sesuai, dan membuat kesimpulan. Adapun prosedur penelitiannya mengikuti tahap-tahap sebagai berikut

(a) Tahap Persiapan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap persiapan adalah:

- 1) menyiapkan atau mengumpulkan sumber data yang berupa surat kabar Kompas bulan Oktober s.d. Desember 2012,

- 2) memilih atau menentukan salah satu topik pembahasan dalam sumber data yaitu bidang politik dan hukum di Indonesia,
- 3) menyiapkan alat tulis yang berupa buku tulis, bolpoin, pensil, penggaris, dan penghapus.

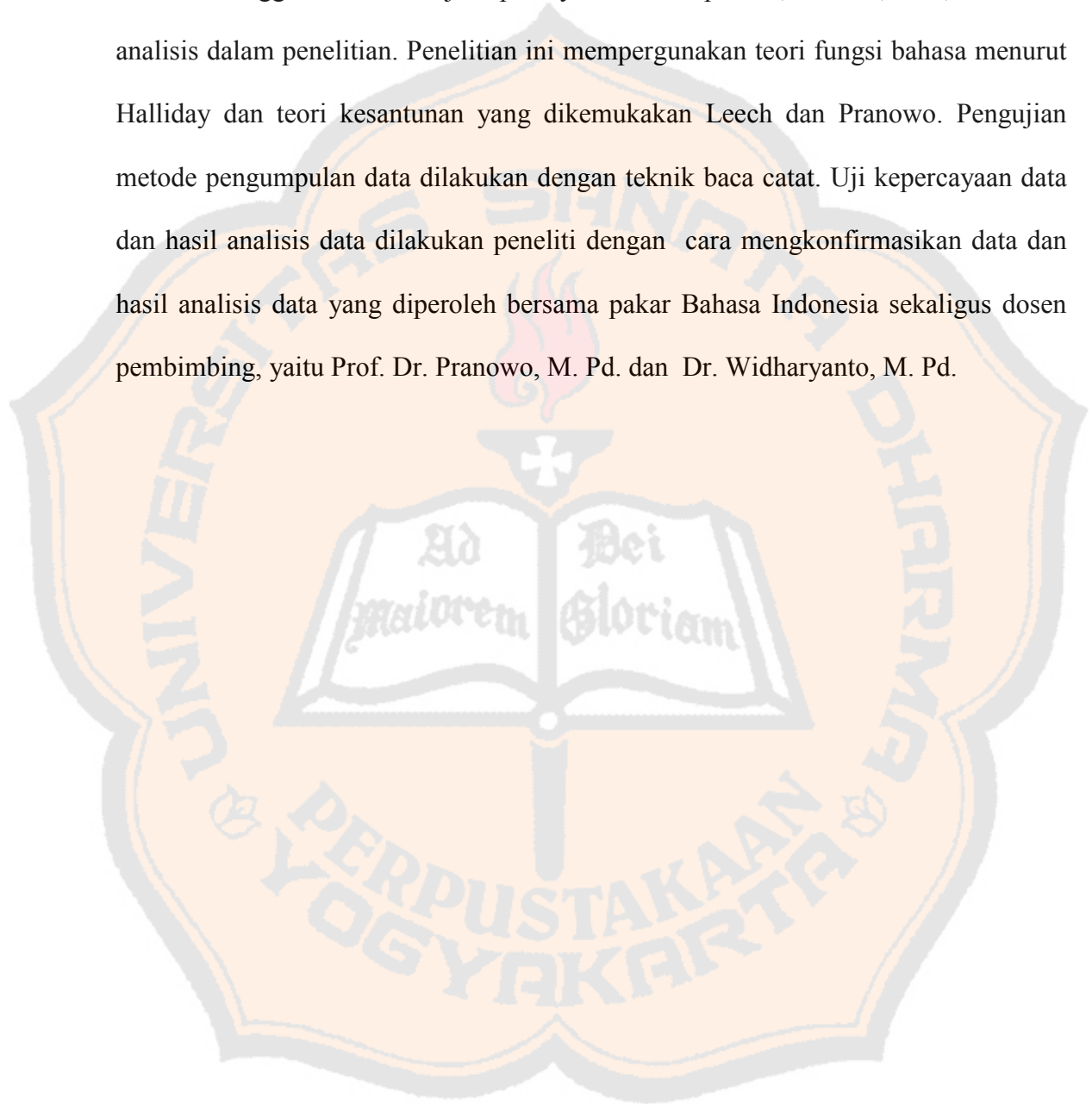
(b) Tahap Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap pelaksanaan adalah:

- 1) membaca dan memilih data penelitian yang berupa tuturan tokoh masyarakat Indonesia dengan cara memberi garis penanda di bawah tuturan,
- 2) mengklasifikasikan tuturan berdasarkan tanggal dan bulan secara berurutan, kemudian mengetiknya pada tabel yang telah dibuat di komputer,
- 3) menyusun pengkodean pada tabel tuturan berdasarkan jenis bidang tuturan (politik dan hukum), contoh **H/P. X/ XI/ XII. 1a**. Kode **H** untuk menjelaskan tuturan dalam bidang hukum dan kode **P** dalam bidang politik. Angka romawi **X/ XI/ XII** menjelaskan bulan dalam surat kabar yaitu **X** untuk bulan Oktober, **XI** untuk bulan November, dan **XII** untuk bulan Desember. Kode **1** dst menjelaskan tanggal terbit surat kabar dan **a** menjelaskan urutan tuturan.
- 4) mengklasifikasikan tuturan berdasarkan konteks tuturan,
- 5) mengidentifikasi tuturan berdasarkan fungsi bahasa makro dan mikro,
- 6) mengidentifikasi penanda-penanda kesantunan dalam tuturan tokoh masyarakat berdasarkan temuan penanda kesantunan pada penelitian sebelumnya (diksi, gaya bahasa, dll).

3.6 Trianggulasi

Trianggulasi adalah uji kepercayaan terhadap teori, metode, data, dan hasil analisis dalam penelitian. Penelitian ini mempergunakan teori fungsi bahasa menurut Halliday dan teori kesantunan yang dikemukakan Leech dan Pranowo. Pengujian metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca catat. Uji kepercayaan data dan hasil analisis data dilakukan peneliti dengan cara mengkonfirmasi data dan hasil analisis data yang diperoleh bersama pakar Bahasa Indonesia sekaligus dosen pembimbing, yaitu Prof. Dr. Pranowo, M. Pd. dan Dr. Widharyanto, M. Pd.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang dianalisis merupakan data berupa tuturan yang diambil dari surat kabar *Kompas* dengan jangka waktu bulan Oktober sampai Desember 2010. Jumlah data (berwujud tuturan) yang dianalisis adalah 255 tuturan, dengan rincian sebagai berikut:

| Nama Surat Kabar | Jumlah Tuturan yang Dianalisis |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Oktober | 102 |
| November | 83 |
| Desember | 70 |
| Jumlah | 255 |

Tuturan yang dianalisis berupa kalimat-kalimat berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan satu berbahasa Inggris yang diucapkan tokoh masyarakat di Indonesia. Peneliti meneliti tuturan berbahasa daerah dan berbahasa Inggris berdasarkan pertimbangan temuan penanda kesantunan yang relevan untuk dianalisis.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilaporkan dengan model pelaporan sebagai berikut: (a) jenis temuan, (b) data tuturan, (c) konteks yang melingkupi tuturan, dan (d) pemaknaan. Adapun hasil dari analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut ini.

- a. Ada enam jenis fungsi bahasa yang muncul di surat kabar. Keenam jenis fungsi bahasa itu adalah fungsi instrumental, representasional, regulatori, personal, dan heuristik. Peneliti tidak menemukan fungsi imajinatif dalam tuturan karena fungsi tersebut ada di ragam karya sastra.
- b. Suatu tuturan yang diucapkan penutur berwujud kata, frasa, klausa, atau pun kalimat yang memungkinkan pendengar atau mitra tutur memberikan penilaiannya (berpersepsi) tentang tinggi rendah (tingkat) kesantunan tuturan tersebut. Inilah yang dalam tulisan ini disebut sebagai penanda tingkat kesantunan. Ada enam jenis penanda tingkat kesantunan tuturan yang ditemukan, yakni: 1) analogi, 2) diksi atau pilihan kata, 3) gaya bahasa, 4) penggunaan keterangan modalitas, 5) penggunaan keterangan sebab, 6) penggunaan keterangan akibat, 7) penggunaan keterangan tujuan, 8) penyebutan subjek yang menjadi tujuan tuturan, dan 9) bentuk tuturan. Dalam suatu tuturan dapat terjadi hanya mengandung satu penanda, tetapi dapat pula terjadi lebih dari satu penanda digunakan penutur dalam satu tuturan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil temuan atau analisis di atas, di bawah ini akan dijelaskan secara rinci mengenai masing-masing hal di atas.

4.2.1 Jenis-Jenis Fungsi Bahasa yang Terdapat dalam Tuturan di Surat Kabar

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang ada, ditemukan bahwa ada enam jenis fungsi bahasa yang muncul di surat kabar. Keenam jenis fungsi bahasa itu adalah fungsi instrumental, representasional, regulatori, personal, heuristik. Di bawah ini akan diuraikan keenam jenis fungsi bahasa tersebut.

4.2.1.1 Fungsi Bahasa Instrumental yang Berwujud Tuturan Imperatif

Pada bagian landasan teori sudah dijelaskan bahwa fungsi instrumental yaitu fungsi bahasa yang dipergunakan untuk memanipulasi lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu (misalnya: memesan, memerintah, memohon, menuntut, menyarankan, menantang, memesan, memberi nasihat). Di dalam, fungsi bahasa instrumental ini, seorang penutur yang mengeluarkan suatu tuturan sesungguhnya menghendaki orang lain untuk melakukan sesuatu.

Contohnya:

- (3) (P. X. 4a) *Jika terror masih sebatas kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, itu masih jadi domain polisi. Tetapi, jika teror itu sudah sampai menyerang polisi dan menjadi peperangan bersenjata, itu domain TNI. TNI tidak boleh diam.* (Mantan Asisten Kepala Sosial Politik TNI Mayor Jenderal (Purn) Suwarno Adiwijoyo, 04/10/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan TNI untuk menangani teror dan kerusuhan.

Jika kita mengkaji tuturan di atas dari segi fungsinya, maka akan tampak sebagai berikut:

- a. fungsi mikro bahasa dari ucapan atau tuturan pembicara (Suwarno Adiwijoyo) adalah perintah atau imperatif (memerintah) yang ditandai dengan kata *tidak boleh*;
- b. maksud tuturannya berupa perintah; dalam hal ini memerintah segenap anggota TNI untuk menangani teror dan kerusakan yang ada di Indonesia;
- c. kesimpulannya: pada tuturan di atas, fungsi mikro bahasa sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur tersebut melalui tuturannya yaitu untuk memerintah lawan bicara (mitra tutur) melakukan sesuatu.

Dari data yang ada juga ditemukan bahwa tuturan imperatif yang dipakai atau digunakan pembicara (penutur) ketika mengungkapkan maksudnya ternyata tidak hanya satu jenis melainkan terdiri dari beberapa jenis. Di bawah ini akan dibicarakan jenis-jenis atau macam-macam tuturan imperatif yang digunakan penutur untuk mengungkapkan maksud tuturannya.

a. Tuturan Imperatif Biasa

Penanda (ciri) utama kalimat imperatif biasa adalah penggunaan atau pemakaian bentuk kata kerja dasar (Sarwoyo, 2009). Kalimat imperatif biasa bervariasi, dari bentuk imperatif yang halus sampai bentuk imperatif yang sangat kasar (Keraf, 1991:206), contohnya:

- (4) (P. X. 5b) *Saya juga lihat Menko Polhukam terus bekerja dengan gigih untuk itu. Teruskan keterpaduan upayanya, sinkronisasi, koordinasi yang sifatnya horizontal.* (Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, 05/10/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Dengan bantuan TNI dan intelijen, kepolisian diharapkan dapat melanjutkan upaya penanganan terorisme secara tepat.

Penutur memakai bentuk tuturan imperatif langsung, yang tampak dengan penggunaan kata *teruskan*. Dengan hanya menuturkan kata, *teruskan* penutur sesungguhnya bermaksud memerintah TNI, intelijen, dan kepolisian untuk bekerja sama dan bersinergi dalam upaya memberantas aksi terorisme. Karena bermaksud memerintah, maka tuturan ini termasuk tuturan direktif yang berwujud imperatif langsung.

Di dalam tuturan (4) di atas penutur (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) secara langsung menyebut subjek yang menjadi sasaran tuturan (Menko Polhukam). Penutur mengatakan “*Saya juga lihat Menko Polhukam terus bekerja*” untuk menunjukkan apresiasinya kepada kinerja jajaran pihak keamanan. Tuturan di atas oleh pendengar atau mitra tutur dipersepsikan sebagai tuturan yang santun.

b. Tuturan Imperatif Larangan

Tuturan imperatif larangan adalah bentuk perintah yang bersifat negatif yaitu melarang seseorang melakukan sesuatu hal. Tuturan imperatif larangan itu dapat bersifat umum atau resmi dengan penanda kata *dilarang*, dan tuturan imperatif larangan yang bersifat khusus atau tidak resmi, digunakan penanda kata *jangan*.

Contohnya:

- (5) (P. XI. 27b) *Presiden jangan mau tersandera oleh Setgab (Sekretaris Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono). (Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, 27/11/2010, hal 2)*

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tegas memutuskan perombakan kabinet.

Pada tuturan (5) atas kita dapat melihat penggunaan imperatif larangan yang ditandai dengan penggunaan kata *jangan*. Dengan melarang atau memerintah untuk tidak melakukan sesuatu hal, penutur sesungguhnya tidak memberikan kesempatan kepada mitra tutur untuk menentukan pilihan atau alternatif lain. Tuturan itu dapat mengakibatkan mitra tutur atau pendengar merasa kehilangan muka, tuturan itu akan dipersepsikan sebagai tuturan yang tingkat kesantunannya rendah oleh mitra tutur.

c. Tuturan Imperatif Permintaan

Tuturan imperatif permintaan adalah bentuk perintah yang halus. Ciri utama (penanda) tuturan imperatif yang mengandung makna permintaan lazimnya adalah pemakaian kata *tolong* atau frasa yang bermakna minta.

- (6) (H. XI. 26b) *Tolong ini segera diselesaikan oleh menteri dan pejabat terkait lainnya. (Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono, 26/11/2010, hal 2)*

Konteks tuturannya:

Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.

(7) (P. XII. 1a) *Kami **minta** klarifikasi dahulu kepada pimpinan DPR, mengapa ada fraksi yang tidak konsisten dengan keputusan rapat pimpinan (rapim) DPR. (Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo, 01/12/2010, hal 2)*

Konteks tuturannya:

Konflik internal di BK DPR.

Dalam tuturan (6) di atas terlihat adanya permintaan penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya sekadar meminta untuk melakukan sesuatu, sesungguhnya melalui tuturan itu pula penutur ingin menyuruh atau memerintah kepada mitra tutur untuk melakukan atau menerima sesuatu. Namun, perintah itu dituturkan dengan nada permintaan oleh penutur agar tidak menyinggung perasaan mitra tutur atau tidak terkesan merendahkan mitra tutur sehingga pada akhirnya tuturan itu tetap dipersepsikan santun. Berbeda dengan tuturan (7), penutur menuturkan kalimat perintah yang terkesan merendahkan mitra tutur sehingga pada akhirnya tuturan itu dipersepsikan tidak santun.

d. Tuturan Imperatif Ajakan

Tuturan imperatif ajakan ini biasanya didahului oleh kata-kata ajakan seperti *marilah*.

Contohnya:

(8) (H. XI. 26f) *Tidak harus semuanya oleh Presiden diresponsnya. **Mari** jalankan sistem dan ambil tanggung jawab yang sesuai dengan peranan dan tanggung jawab.* (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.

Tuturan (8) di atas merupakan contoh penggunaan bentuk tuturan imperatif ajakan untuk menyatakan maksud mengajak melakukan suatu perbuatan. Pada tuturan itu, penutur secara eksplisit menggunakan kata *mari* demi memperhalus tuturan yang sesungguhnya bermaksud menyuruh (memerintah secara halus) mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan (8) penutur sesungguhnya memiliki maksud meminta para menteri dan pejabat untuk segera merespons isu (masalah TKI, saham PT Krakatau Steel, penanganan bencana, masalah tabung gas 13 kilogram, soal Gayus Tambunan, dan penegakan hukum) yang berkembang di masyarakat berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Suruhan itu kemudian dituturkan penutur dalam tuturan berbentuk ajakan dengan tujuan tidak meremehkan mitra tutur, sehingga dapat dipersepsikan sebagai tuturan sangat santun.

e. Tuturan Imperatif Harapan

Penanda utama yang menunjukkan suatu tuturan itu merupakan tuturan imperatif dengan makna harapan adalah pemakaian kata *mudah-mudahan, saya berharap, harapan kami*.

Contohnya:

- (9) (H. X. 4b) *(Kebijakan) itu masih dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya pegangan yang kuat untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan TNI ikut menjaga keselamatan bangsa dan negara.* (Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, 04/10/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan TNI untuk menangani teror dan kerusuhan.

- (10) (H. X. 23a) *Harapan kami bisa meningkatkan hubungan kelembagaan, misalnya dalam koordinasi dan supervisi. Kita berkoordinasi dalam menyukkseskan pemberantasan korupsi.* (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Jasin, 23/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

KPK harapkan kerja sama dengan Polri terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

- (11) (P. XI. 27i) *Saya sungguh berharap sebenarnya Saudara Dr. Bambang Widjojanto berkenan atau bersedia untuk memimpin Komisi Kejaksaan.* (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 27/11/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Bambang Widjojanto menolak posisi Ketua Komisi Kejaksaan.

Pada tuturan (9), (10), dan (11) di atas kita dapat melihat penggunaan bentuk tuturan imperatif harapan untuk mewujudkan fungsi bahasa instrumental. tuturan penutur menggunakan kata *mudah-mudahan*, *harapan kami*, dan *sebenarnya berharap* demi memperhalus tuturan yang sesungguhnya bermaksud menyuruh (memerintah secara halus) mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan (9) penutur memiliki maksud menyuruh semua anggota TNI untuk melakukan deteksi dini terhadap dinamika di masyarakat, termasuk yang terkait dengan teror dan kerusuhan. Tuturan (10) penutur sesungguhnya bermaksud menyuruh kedua lembaga negara (KPK dan Polri) dapat bekerja sama lebih erat lagi dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Tuturan (11) penutur sesungguhnya bermaksud memerintah Bambang Widjojanto untuk memimpin Komisi Kejaksaan, tetapi beliau menolaknya. Maksud menyuruh tersebut kemudian dituturkan oleh penutur dalam tuturan bentuk harapan dengan tujuan tuturannya tidak meremehkan mitra tutur sehingga tuturan (9) dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun dan tuturan (10), tuturan (11) dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat santun.

f. Tuturan Imperatif Persilaan

Ciri khas tuturan imperatif dengan makna persilaan adalah pemakaian kata *silakan*.

Contohnya:

(12) (H. XI. 12a) *Tim silakan bekerja. Kami tidak akan mengganggu. Mau diam-diam atau terang benderang **silakan**.* (Ketua MK Mahfud M.D., 12/11/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

MK tidak akan mengganggu kerja tim investigasi internal.

(13) (P. XI. 25c) *Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. **Silakan** saja, Golkar tidak akan menanggapi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing.* (Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, 25/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Adanya risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

Pada contoh (12) dan (13) di atas, penutur mempersilakan mitra tutur (tim investigasi internal MK yang dipimpin Refly Harun dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) untuk melakukan sesuatu hal. Dalam kedua contoh di atas, makna persilaan itu dinyatakan oleh penutur dengan penggunaan kata *silakan*. Hal ini bertujuan agar apa yang diungkapkan penutur tersebut tidak tampak terlalu kasar. Di dalam tuturan persilaan ini juga, penutur sesungguhnya tidak memberikan suatu bentuk paksaan kepada mitra

tutur(mitra tutur boleh menuruti apa yang diucapkan penutur) tetapi boleh juga tidak. Oleh karena itu, tuturan dengan model persilaan ini akan terasa lebih santun bagi mitra tutur.

g. Tuturan Imperatif Anjuran

Imperatif yang mengandung makna anjuran ini lazim ditandai dengan kata *hendaknya*, *sebaiknya*, dan *alangkah lebih baik*. Contohnya:

(14) (H. XI. 22f) *Alangkah baiknya penyelidikan dilakukan secara menyeluruh.* (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawandi Syamsuddin, 22/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memandu langsung pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Tuturan (14) di atas merupakan contoh penggunaan bentuk tuturan imperatif anjuran untuk menyatakan maksud memerintah atau menyuruh. Pemakaian bentuk tuturan imperatif anjuran ini dimaksudkan agar tuturan yang akan disampaikan itu tidak terkesan terlalu kasar namun, tetap memiliki maksud utama yakni bahwa mitra tutur melakukan apa yang menjadi isi tuturan penutur (Sarwoyo, 2009). Dalam tuturan berbentuk imperatif anjuran ini, mitra tutur sesungguhnya masih diberi kesempatan untuk memilih pilihan lain. Karena sifatnya yang tidak memaksa, tuturan berbentuk imperatif anjuran ini secara umum dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4.2.1.2 Fungsi Bahasa Representational

Begitu pula Pranowo (1996: 97-98) menjelaskan bahwa fungsi representatif bahasa mengacu pada pemakaian bahasa untuk menyatakan kebenaran. Fungsi representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya (misalnya mengidentifikasi, melaporkan, berkata, memikirkan sesuatu, menyetujui atau menolak, mengetahui atau tidak mengetahui, mengingat atau melupakan, mempertimbangkan kemungkinan atau ketidakmungkinan, mempertimbangkan kelogisan sesuatu, mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian). Di bawah ini akan disajikan contoh-contoh fungsi representatif.

- (15) (P. X. 8a) *Tiba-tiba ada pemberitahuan di media, dikatakan biaya pakaian Presiden itu mencapai Rp 893 juta per tahun. Satu rupiah pun **tidak ada** biaya untuk dipakai saya. Sejak pertama menjadi Presiden RI tahun 2004, **tidak pernah** ada selembar pakaian pun menggunakan uang negara. **Jelas, faktanya ada.*** (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

Tuturan (15) di atas menunjukkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mempertimbangkan kepastian bahwa beliau tidak pernah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi sejak pertama menjadi Presiden RI tahun 2004. Dalam tuturannya itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga menjelaskan fakta tidak menggunakan dana Rp 893 juta untuk kepentingan pribadinya. Melalui pernyataannya itu, penutur sesungguhnya telah bermaksud menyatakan kebenaran

terkait pemberitaan dengan akurasi yang tidak benar. Dalam tuturan seperti inilah, fungsi bahasa representatif terwujud, yang mana setiap tuturan yang diucapkan penutur itu terikat dengan kebenaran. Karena sifatnya yang berisi kebenaran, tuturan berbentuk representasional ini secara umum dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

- (16) (H. XI. 22b) *Mungkin tidak untuk sekarang. Hakim-hakim sekarang masih baik-baik. Tetapi tidak tahun 10 tahun ke depan. Makanya, saya usul, itu perlu dipikirkan lagi sekarang.* (Ketua MK Mahfud M.D., 22/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Ketua MK Mahfud M.D. menilai MK perlu mendapatkan pengawasan dari lembaga eksternal.

Berdasarkan tuturan (16) di atas, Mahfud M.D. mempertimbangkan kemungkinan kinerja hakim-hakim akan mengalami penurunan pada 10 tahun yang akan datang apabila pemerintah tidak membentuk lembaga yang mengontrol Mahkamah Konstitusi. Dalam tuturan itu, penutur terikat dengan kebenaran atas apa yang diungkapkannya. Karena sifatnya yang berisi kebenaran, tuturan berbentuk representasional ini secara umum dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

- (17) (H. XII. 16a) *Pimpinan DPR sudah mempertanyakan target legislasi ini kepada Badan Legislasi (Baleg). Jawaban Baleg ternyata masuk akal karena ada 23 RUU yang pembahasannya sudah 90*

persen dan tinggal ketok palu (disetujui) pada 2011. (Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, 16/12/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

DPR memiliki pertimbangan khusus memasukkan 70 RUU dalam Program Legislasi Nasional.

Berdasarkan tuturan (17) di atas, Priyo Budi Santoso menyatakan atau melaporkan sesuatu yang sudah dilakukan Badan Legislatif (Baleg). Dalam tuturannya itu, Supandji juga melaporkan hasinya, yaitu ada 23 RUU dari target 70 RUU yang telah dibahas dan disetujui Baleg. Melalui pernyataannya itu, penutur sesungguhnya telah bermaksud menyatakan kebenaran karena ia melaporkan sesuatu yang sudah dilakukan Baleg. Dalam tuturan seperti inilah, fungsi representatif terwujud, yang mana setiap tuturan yang diucapkan penutur itu terikat dengan kebenaran. Karena sifatnya yang berisi kebenaran, tuturan berbentuk representasional ini secara umum dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

(18) (P. X. 8e) *Ketika Yusril Ihza Mahendra masih menjabat Mensesneg, namanya diubah menjadi Rumah Tangga Kepresidenan. Namun, sebenarnya Sekretariat Presiden, kantor ini, lembaga ini. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 2)*

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan tuturan (18) di atas, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengingatkan bahwa Rumah Tangga Kepresidenan dahulu bernama Sekretariat Presiden sebelum Yusril Ihza Mahendra menjabat Menteri Sekretaris Negara. Penutur berusaha menjelaskan kronologis terjadinya masalah karena istilah lembaga Rumah Tangga Kepresidenan. Penutur menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Dalam tuturan tersebut, fungsi representatif terwujud karena penutur mengungkapkan kebenaran dan dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

(19) (P. X. 8f) *Hari-hari terakhir ini ada semacam pergerakan di Den Haag yang mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia, bahkan meminta pengadilan menangkap Presiden RI saat berkunjung ke Belanda.* (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudoyono mendadak menunda kunjungan kenegaraannya ke Belanda terkait info *Kort Geding*.

Tuturan (19) di atas menunjukkan penutur (Presiden Susilo Bambang Yudoyono) mengidentifikasi adanya rencana kelompok Republik Maluku Selatan menggugat Pemerintahan Indonesia dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang akan didaftarkan di pengadilan Den Haag, Belanda sehingga menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda secara mendadak. Penutur sebenarnya tidak menjelaskan secara langsung alasan penundaan kunjungan tersebut untuk menjaga

muka pihak-pihak tertentu (pemerintahan Belanda) sehingga dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh mitra tutur.

(20) (H. X. 25a) *Kami (DPD Partai Demokrat DIY) sangat mendukung RUUK DIY yang mengatur penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur-wakil gubernur. (Ketua DPD Partai Demokrat DIY GBPH Prabokusumo, 25/10/2010, hal 2)*

Konteks tuturannya:

RUU Keistimewaan DIY.

Tuturan (20) di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat Provinsi DIY mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta. Penutur menyetujui penetapan keistimewaan DIY sehingga dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh mitra tutur.

(21) (H. XI. 10a) *Kami tidak diterima staf Kemko Polhukam untuk audiensi. Padahal, beberapa saat lalu Menko Polhukam sudah menerima kami dengan baik. Kami menentang rencana pemberian gelar kepahlawanan kepada mantan Presiden Soeharto karena banyak pelanggaran HAM yang ditinggalkan. (Haris Azhar, Koordinator Kontras dan Gabungan LSM, 10/11/2010, hal 2)*

Konteks tuturannya:

Aktivist HAM menentang nominasi Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Penutur (Haris Azhar) pada tuturan (21) menolak nominasi mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penutur berusaha mengungkapkan kebenaran

hukum atas pelanggaran HAM yang telah terjadi pada pemerintah mantan Presiden Soeharto. Tuturan (21) dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat tidak santun karena penutur secara langsung mengungkapkan penolakan nominasi gelar pahlawan tersebut.

(22) (P. XI. 25d) *Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai.* (Ketua Umum DPP Partai PDI-P Megawati, 25/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan tuturan (22) di atas, penutur (Megawati) menjawab bahwa Partai Demokrasi Perjuangan tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap politik tersebut merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P berposisi terhadap pemerintah. Penutur mengungkapkan kebenaran dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4.2.1.3 Fungsi Bahasa Regulatori

Fungsi bahasa regulatori adalah penggunaan bahasa untuk mengontrol suatu peristiwa (biasanya dalam bentuk pengesahan, penolakan, kawalan tingkah laku, atau pernyataan aturan dan undang-undang). Fungsi bahasa ini cenderung netral, yakni,

tuturan penutur termasuk kategori bekerja sama. Di bawah ini akan disajikan contoh-contoh fungsi bahasa regulatori.

- (23) (H. X. 2a) *Perubahan UU harus dilakukan. Dalam UU disebutkan setiap orang berhak mendapatkan remisi. Jika tidak demikian, lalu disebut saja setiap orang berhak mendapatkan remisi kecuali teroris dan koruptor.* (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 02/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan dinilai akan memudahkan penerapan aturan dalam kasus terorisme dan korupsi di Indonesia.

Dalam contoh (23) di atas, Mahfud M.D. menyatakan revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan diperlukan untuk menghapus remisi atau pengurangan hukuman bagi narapidana kasus terorisme dan pelaku korupsi. Revisi UU tersebut dinilai memudahkan penerapan aturan dalam kasus terorisme dan korupsi. Mengemukakan pernyataan aturan dan UU merupakan bagian dari tuturan yang menyatakan fungsi bahasa regulatori. Dalam tuturan itu, penutur mengungkapkan kebenaran atas apa yang diungkapkannya berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku sehingga tuturan tersebut dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

- (24) (H. XII. 8g) *Mana ada orang mau mengaku, akan memberi uang, gratifikasi, atau akan menyuap. Ancamannya ditahan dan dipenjara. Pasti tidak ada orang yang mengaku.* (Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Wahyudi Djafar, 08/12/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Tim Investigasi Internal MK siap menyerahkan hasil kerja terkait dugaan adanya praktik mafia perkara di tubuh MK.

Dalam contoh (24) di atas, Wahyudi Djafar menyatakan keraguan kinerja tim investigasi internal Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya praktik mafia perkara di Mahkamah Konstitusi. Keraguan tersebut didasarkan pada kepastian tidak akan ada orang mengaku melakukan tindak penyyuapan karena ancaman hukuman penjara.. Mengemukakan pernyataan aturan merupakan bagian dari tuturan yang menyatakan fungsi bahasa regulatori. Dalam tuturan itu, penutur mengungkapkan kebenaran atas apa yang diungkapkannya berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Namun, penutur mengungkapkan tuturan secara langsung, tuturan di atas oleh pendengar atau mitra tutur tetap dipersepsikan sebagai tuturan yang kadar kesantunannya rendah.

4.2.1.4 Fungsi Bahasa Interaksional

Fungsi bahasa interaksional adalah penggunaan bahasa yang berfungsi menjaga hubungan agar komunikasi tetap dapat berjalan lancar, memberikan lelucon, menguasai jargon, idiom-idiom khusus yang dipakai oleh mitra tutur. Di bawah ini akan disajikan contoh fungsi bahasa interaksional.

(25) (P. XI. 5f) *Wah niki (ini) eco (enak), tetapi (nasinya) kirang (kurang)...*”
(Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.

(26) (P. XI. 5g) *Buat pengungsi (nasinya) kurang, tetapi **kalau** buat Presiden, ya sudah cukup.* (Ny. Ani Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.

Dalam contoh (25) dan (26) di atas, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono memperlihatkan kedekatannya dengan para pengungsi korban bencana erupsi merapi saat menyantap nasi bungkus. Penutur juga mengungkapkan lelucon yang menunjukkan interaksi dengan para pengungsi korban erupsi merapi. Tuturan tersebut dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4.2.1.5 Fungsi Bahasa Personal

Fungsi bahasa personal adalah penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian (memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, mengucapkan selamat). Di bawah ini akan disajikan contoh fungsi bahasa personal.

- (27) (P. XI. 6b) *Tingkah pimpinan DPR, ketua fraksi, dan anggota DPR umumnya relatif sama, yaitu boros, malas, dan suka jalan-jalan menggunakan uang rakyat. (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 06/11/2010, hal 4)*

Konteks tuturannya:

Studi Banding ke luar negeri oleh anggota DPR merupakan persoalan pikir dan hati nurani mereka.

- (28) (P. XI. 6c) *Rasanya sulit untuk menemukan cara membangun komitmen anggota DPR untuk lebih peduli kepada rakyat. Mereka seperti membiarkan korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia. (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 06/11/2010, hal 4)*

Konteks tuturannya:

Studi Banding ke luar negeri oleh anggota DPR merupakan persoalan pikir dan hati nurani mereka.

Pada tuturan (27) dan (28) di atas penutur bermaksud memberitahu atau menyatakan kepada mitra tutur mengenai perasaan kekecewaan yang dialaminya karena kunjungan kerja berupa studi banding ke luar negeri tetap dilakukan anggota DPR ketika Indonesia sedang mengalami bencana alam di beberapa daerah (Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi). Ungkapan perasaan penutur itu disampaikan secara langsung. Selain itu, dalam tuturannya itu juga penutur secara langsung menyebut subjek yang menjadi tujuan tuturan yaitu pimpinan DPR, ketua fraksi, dan anggota DPR. Dengan maksudnya yang mengungkapkan atau mengutarakan perasaan kekecewaan yang dialami penutur itu, tuturan ini dapat dipersepsikan sebagai tuturan

yang sangat tidak santun oleh pendengar atau mitra tutur. Bandingkan dengan contoh berikut!

(29) (P. XII. 9e) *Saya senang pernyataan Presiden Yudhoyono di acara Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu bahwa mereka harus siap menjadi oposisi jika kalah di Pemilu 2014. Sikap itu membuat pemilu masih ada artinya.* (Ketua PDI-P Maruarar Sirait, 09/12/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

PDI-P konsisten dengan keputusan kongres dan keinginan arus bawah partai.

Pada tuturan (29) di atas penutur (Ketua PDI-P Maruarar Sirait) bermaksud memuji mitra tutur (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mengenai keikhlasan mitra tutur untuk menerima keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak ingin bergabung di kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penutur secara langsung menyebut subjek yang menjadi tujuan tuturan yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan maksudnya untuk mengutarakan perasaan pujian kepada mitra tutur, tuturan ini dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

Tiga contoh di atas tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pengungkapan perasaan yang dialami penutur. Perbedaannya adalah bahwa pada contoh pertama (tuturan 27) dan kedua (tuturan 28) bentuk tuturan yang dipilih penutur adalah tuturan langsung untuk menyampaikan perasaan kecewa. Penutur secara eksplisit atau terang-terangan menyampaikan apa yang dia rasakan (kekecewaan) dan dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat tidak santun oleh

pendengar atau mitra tutur. Pada contoh ketiga (tuturan 29) bentuk tuturan yang dipilih penutur adalah tuturan langsung mengungkapkan perasaan memuji kepada mitra tutur dan dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4.2.1.6 Fungsi Bahasa Heuristik

Fungsi bahasa heuristik pada dasarnya bahasa dapat dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan serta untuk mengenal lingkungan, seperti seorang anak kecil yang selalu suka bertanya setiap melihat sesuatu yang baru yang belum dikenal sebelumnya (Pranowo, 1996: 98), contoh:

(30) (H. X. 8h) *KPK jangan hanya menangani perkara kecil. Bagaimana perkembangan kasus Bank Century?* (Ahmad Kurdi dari F-PPP, 08/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kasus Bank Century dalam rapat DPR-KPK.

Berdasarkan kedua contoh di atas (30), penutur hanya memilih satu bentuk tuturan. tuturan yang dipilih penutur adalah tuturan tidak langsung (yakni tuturan interogatif) untuk mewujudkan fungsi bahasa heuristik. Tuturan tidak langsung yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam tuturannya penutur tidak secara eksplisit atau terang-terangan menyampaikan apa yang dia maksudkan. Penutur (30) menganggap KPK hanya menangkap orang-orang yang sudah pensiun dan tidak memiliki “kekuasaan”. Penutur mengkritik KPK yang dinilai lambat menangani perkara yang

menyangkut penguasa dalam kasus Bank Century. Penutur menggunakan tuturan tidak langsung untuk mempertanyakan penanganan perkara Bank Century, namun sebenarnya penutur mengkritik dan merasa kecewa dengan kinerja KPK yang dinilai lambat menangani kasus tersebut. Tuturan tidak langsung penutur dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4.2.2 Penanda Tingkat Kesantunan Tuturan di dalam Surat Kabar

Pada bagian 4.2.1 di atas sudah dijelaskan jenis-jenis fungsi bahasa yang muncul di surat kabar. Di bawah ini akan dipaparkan pula hasil temuan berupa penanda-penanda tingkat kesantunan tuturan di dalam surat kabar. Pranowo (2009: 76) menyatakan faktor penentu kesantunan adalah segala hal yang dapat memengaruhi pemakaian bahasa menjadi santun atau tidak santun. Faktor yang menentukan santun tidaknya tuturan ditentukan oleh dua hal, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tuturan tokoh masyarakat berdasarkan faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang dimaksud adalah segala unsur yang berkaitan dengan masalah bahasa. Peneliti mengkajipenanda tingkat kesantunan yang terdiri dari satuan kebahasaan (kata, frasa, klausa, atau pun kalimat) yang dituturkan seorang pembicara (penutur) yang memungkinkan pendengar berpersepsi (memberikan tanggapan atau penilaian) tentang tinggi rendahnya (tingkat) kesantunan suatu atau seluruh tuturan yang diungkapkan atau dituturkan pembicara. Penanda-penanda tingkat kesantunan itu adalah sebagai berikut.

4.2.2.1 Analogi

Di dalam KBBI (2007: 44) analogi diartikan sebagai persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Menganalogikan berarti menjelaskan atau menerangkan suatu konsep tentang sesuatu yang baru berdasarkan konsep lain yang sudah diketahui.

Contoh:

- (31) (P. X. 1d) *DPR jangan mau difait accompli dengan satu calon yang diajukan Presiden. Dengan hanya satu nama calon yang diajukan, DPR menjadi **tukang stempel** atas calon yang diajukan Presiden.* (Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, 01/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Sebastian Salang menganjurkan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, DPR sebaiknya menolak jika Presiden hanya mengajukan satu nama calon.

Di dalam tuturan yang diucapkan Sebastian Salang, dapat dianalisis adanya analogi. Penutur ingin menerangkan konsep tentang uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, DPR sebaiknya menolak jika Presiden hanya mengajukan satu nama calon dengan memakai analogi *tukang stempel*. *Tukang stempel* biasanya sebutan bagi orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan membuat cap.

Dalam konteks ini, penutur ingin mengemukakan bahwa DPR itu seperti *tukang stempel* yang pekerjaannya hanya membuat cap (dalam hal ini rakyat dapat

memberikan masukan kepada DPR untuk menilai kinerja dan rekam jejak calon Kepala Polri, mengingat DPR adalah lembaga aspirasi rakyat, bukan lembaga yang langsung menyetujui perintah pemerintah tanpa mendengar aspirasi rakyat). Berdasarkan contoh di atas, melalui tuturannya yang menggunakan analogi, penutur sesungguhnya telah mewujudkan maksud tuturan menjadi lebih halus; dan karena lebih halus maka oleh pendengar tuturan itupun akan terdengar lebih santun.

4.2.2.2 Diksi atau Pilihan Kata

Keraf dalam bukunya *Diksi dan Gaya Bahasa* memberikan tiga definisi tentang pilihan kata (diksi). *Pertama*, pilihan kata (diksi) mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. *Kedua*, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai, dalam hal ini tuturan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar (1984: 24). *Ketiga*, pilihan kata yang tepat dan sesuai bergantung pada penguasaan kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa itu.

Pemilihan kata agar dapat mengungkapkan gagasan secara tepat hendaknya memenuhi beberapa kriteria dalam pemilihan kata. *Pertama*, ketepatan memilih kata yang mampu mewakili gagasan yang tepat sehingga menimbulkan gagasan yang sama pada pembaca. Ketepatan pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakai

bahasa mampu memahami perbedaan kata-kata yang bermakna denotatif dan konotatif dengan kata-kata yang bersinonim.

Kedua, kecermatan dalam memilih kata-kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Pemakai bahasa harus mampu menentukan kata-kata yang mubazir atau kata-kata yang tidak diperlukan dalam konteks tertentu. *Ketiga*, keserasian dalam pemilihan kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian kata tersebut berkaitan erat dengan faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan.

Di atas sudah disinggung bahwa persoalan pemilihan kata berkaitan dengan masalah makna yang timbul dari penggunaan atau pemilihan kata tersebut. Ada empat klasifikasi penutur memilih kata, yakni: penutur memilih kata-kata yang bermakna denotasi dengan tujuan memperhalus tuturan (menjadikan tuturannya itu lebih santun), penutur memilih kata-kata denotatif yang memang maknanya kasar atau negatif yang mengakibatkan tuturannya terdengar kurang santun, penutur memilih kata-kata yang bermakna konotasi dengan tujuan memperhalus tuturan, dan penutur memilih kata-kata konotatif yang memang maknanya kasar atau negatif sehingga tuturannya terdengar kasar (kurang santun) (Sarwoyo, 2009). Keempat jenis atau gaya pemilihan kata tersebut akan dijelaskan satu per satu di bawah ini.

1. Pemilihan kata-kata yang bermakna denotasi dengan tujuan memperhalus tuturan (menjadikan tuturannya itu lebih santun), contoh:

(32) (H. X. 26b) *Saya sebagai Kepala Polri ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang belum tercapai.* (Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso, 26/10/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Pihak Kepolisian Negara RI mengakui masih ada kelemahan dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan tuturan penutur (32) yang menyampaikan permohonan maaf, sebenarnya memiliki maksud menghormati mitra tutur (masyarakat yang mengeluhkan kinerja dan pelayanan aparat reserse). Pemilihan kata *permohonan maaf* yang disampaikan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso memiliki kadar yang lebih santun (sangat santun) jika dibandingkan dengan kata *minta maaf*.

(33) (H. XI. 18h) *Tolong dilaporkan kepada saya yang menjadi perhatian publik sekarang ini perihal Saudara Gayus Tambunan dan perihal vonis Saudara Misbakhun. Tolong dijelaskan apa yang terjadi.* (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 18/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Vonis M. Misbakhum dan kasus Gayus Tambunan dibahas di kabinet.

Tuturan (33) *tolong* yang disampaikan penutur (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono) memiliki maksud menyuruh jajaran anggotanya untuk melaporkan perkembangan persoalan Misbakhun dan kasus Gayus Tambunan. Kata *saudara* pada tuturan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di atas merupakan kata ganti orang dan kata tersebut merupakan kata yang bermakna denotatif. Kata tersebut dipilih penutur dengan pertimbangan menghormati orang yang

dibicarakan. Karena makna yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan penutur itu tidak merugikan pihak tertentu, maka tuturan itu oleh mitra tutur atau pendengar juga dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat santun.

2. Pemilihan kata-kata denotatif yang maknanya kasar atau negatif sehingga tuturannya terdengar kurang santun, contoh:

(34) (H. XI. 8c) *Cara kerja Kejaksaan Agung yang **amburadul** seperti ini membuat orang bertanya-tanya, benarkah hukum ingin ditegakkan atau sekadar melaksanakan sebuah agenda politik? Kalaupun perkara ini dilimpahkan ke pengadilan, akan saya hadapi dengan ilmu, keberanian, dan ketegaran sikap.* (Yusril Ihza Mahendra, 08/11/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Yusril Ihza Mahendra mengkritik cara kerja Kejaksaan Agung terkait kasus Sisminbakum.

(35) (H. XI. 23d) *Saya bicara kepada Ketua DPR, **selesaikan masalah ini, atau kita ribut.*** (Salim Mengga dari F-PD, 23/11/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Delapan anggota BK DPR merasa tidak melanggar apa pun saat melakukan kunjungan kerja ke Yunani.

Kata-kata yang digunakan penutur dalam tuturan di atas (34) dan (35) adalah kata-kata yang denotatif tetapi maknanya sangat kasar karena memojokkan pihak tertentu yakni para pejabat pemerintahan (Kejaksaan Agung dan Ketua DPR). Kata-kata itu dipilih penutur bisa jadi karena penutur ingin mengungkapkan

kemarahan atau kekecewaannya. Karena makna yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan penutur itu kasar dan memojokkan pihak tertentu, maka tuturan (34) itu oleh mitra tutur atau pendengar dipersepsikan sebagai tuturan yang memiliki kadar kesantunan yang rendah (tidak santun) dan tuturan (35) memiliki kadar kesantunan yang lebih rendah (sangat tidak santun).

3. Pemilihan kata-kata konotatif dengan tujuan memperhalus tuturan, contoh:

(36) (P. XII. 18f) *Mari kita **sehatkan** politik Indonesia. Dan, jika ingin kembali pada **warna** politik 2011 yang **sehat** dan **segar**, hindari politik **undrek-undrek** (binatang yang mengorek-ngorek tanah).* (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 18/12/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Penyelenggaraan pemerintah yang baik membutuhkan syarat dinamika politik yang sehat dan produktif.

Pada contoh tuturan di atas kita dapat dianalisis, penutur (Anas Urbaningrum) memilih kata yang bermakna konotatif dalam menyatakan maksudnya. Kata *sehatkan*, *warna sehat*, *segar*, *politik undrek-undrek* yang digunakan Anas Urbaningrum bukanlah kata-kata dalam arti yang sebenarnya. Kata-kata itu sesungguhnya bermaksud untuk mengatakan bahwa politik yang baik dapat menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2011. Tuturan yang diungkapkan Anas Urbaningrum ini dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4. Pemilihan kata-kata konotatif yang maknanya kasar atau negatif sehingga tuturannya terdengar kasar (kurang santun).

Contoh:

(37) (H. XII. 11g) *Saya bilang sama Akil, delapan hakim ini **tercemar**. Cuma satu yang bersih. Sisanya, delapan orang itu **setan** sehingga yang satu malaikat. Kan sama begitu kan? **Tidak bersih itu kan kotor. Kotor itu setan. Saya merasa sakit, terhina.***
(Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, 11/12/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Investigasi kasus suap MK.

Kata-kata seperti **tercemar**, **setan**, **tidak bersih itu kan kotor**, **kotor itu setan**, **sakit**, **terhina** yang dituturkan Arsyad Sanusi bukanlah kata-kata yang bermakna sesungguhnya (sesuai dengan aslinya di dalam kamus) tetapi kata-kata itu adalah kata-kata kiasan (konotasi). Kata-kata tersebut dipilih penutur tentunya dengan pertimbangan bahwa kata-kata tersebut sungguh-sungguh mewakili apa yang dirasakan oleh penutur sendiri yakni marah. Sehingga dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat tidak santun karena kata-kata yang dipilih itu sangat kasar dan melebih-lebihkan keadaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian tentang keempat jenis pemilihan kata dalam bertutur di atas dapatlah disimpulkan bahwa pemilihan kata-kata denotatif atau pun konotatif yang bernilai rasa positif atau memperhalus cenderung dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur. Sebaliknya, pemilihan kata-

kata denotatif atau pun konotatif yang bernilai rasa negatif atau kasar cenderung dipersepsikan sebagai tuturan yang tidak santun oleh mitra tutur atau pendengar.

4.2.2.3 Penggunaan Gaya Bahasa

Dalam KBBI (2007: 340), dijelaskan bahwa gaya bahasa merupakan pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu; cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan. Menurut Gorys Keraf (1984: 113), gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Gaya bahasa tidak hanya mengefektifkan maksud pemakaian bahasa, tetapi juga memperlihatkan keindahan tuturan dari penuturnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang ada, ditemukan beberapa jenis gaya bahasa yang dipergunakan penutur (pembicara) ketika bertutur. Gaya-gaya bahasa itu digunakan oleh penutur dengan maksud tertentu. Pemakaian gaya bahasa juga menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan tuturan menjadi santun. Jenis-jenis gaya bahasa itu adalah sebagai berikut.

1. Perumpamaan

Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang berlainan, tetapi dianggap sama (Pranowo, 2009: 19). Perbandingan itu secara eksplisit dijelaskan oleh pemakaian kata *seperti*, *ibarat*, *bak*, *sebagai*, *umpama*, *laksana*, *bagai*, *bagaikan*, *serupa*, dan lain-lain.

Contoh:

- (38) (P. X. 6c) *Minta uang mudik, proposal proyek, hingga bantuan berobat. Kalau tidak diberi, kata-kata yang disampaikan makin pedas. Anggota Dewan kalau ke daerah pemilihan seperti dianggap sinterklas.* (Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Ida Fauziah, 06/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Sikap masyarakat yang gemar meminta materi tidak terlepas dari perilaku politik uang yang dilakukan elite politik dalam pemilihan umum.

- (39) (P. XII. 15d) *Mudah-mudahan tidak seperti mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang dulu datang berjanji tiga bulan akan membangun Pulau Sebatik tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya.* (Tokoh Pulau Sebatik, Haji Muhammad Ali Karim, 15/12/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Perlunya pendekatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan

Tuturan di atas (38) dan (39) sebenarnya penutur marah, kecewa kepada mitra tutur sehingga dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang tidak santun.

Penggunaan majas perumpamaan dalam tuturan pada dasarnya bertujuan menyamakan maksud atas pertimbangan penutur ingin menjaga kesantunan. Dengan menyamakan maksud yang ingin disampaikan, sesungguhnya penutur telah menyelamatkan muka mitra tutur (mitra tutur tidak merasa dipermalukan). Dengan alasan tersebut, tuturan yang menggunakan perumpamaan dipersepsikan sebagai tuturan yang santun. Perhatikan contoh berikut ini.

- (40) (P. X. 21d) *Waduh saya bisa melayang ke atap nih. Tetapi, memang saya jarang difoto. Kalau saya banyak difoto dan dipajang, nanti seperti beliau.* (Edhie Baskoro Yudhoyono, 21/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Wawancara dengan Edhie Baskoro Yudhoyono.

2. Metafora

Metafora merupakan suatu jenis gaya bahasa yang kerap kali menambahkan daya bahasa. Melalui metafora, penutur dapat melukiskan suatu objek yang jelas mengenai sesuatu melalui komparasi atau kontras. Menurut Pranowo (2009: 20), metafora adalah suatu jenis gaya bahasa yang membuat perbandingan secara langsung antara dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup. Metafora sebagai perbandingan langsung tidak mempergunakan kata-kata *seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, serupa.*

Contoh:

- (41) (P. X. 16b) *Dengan sosialisasi sejak dini, masyarakat akan lebih tahu karakter dan kapasitas setiap calon. Dengan demikian, masyarakat tidak akan membeli kucing dalam karung.* (Pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, 16/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Partai Golkar siap menyosialisasikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014.

- (42) (P. XI. 12d) *Bagaimana mungkin anggota parpol sebagai pemain sekaligus wasit dalam pemilu? Itulah yang tidak bisa kami kompromikan.* (Anggota Komisi II DPR F-PD Ignatius Mulyono, 12/11/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Fraksi Partai Demokrat DPR tidak bersedia kompromi terkait pelibatan partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Gaya bahasa jenis metafora, seperti ungkapan masyarakat tidak akan *membeli kucing dalam karung* dan anggota parpol sebagai *pemain sekaligus wasit* dapat menjaga pemakaian bahasa terasa tetap santun. Ungkapan “masyarakat tidak akan membeli kucing dalam karung” bermaksud menyatakan tokoh yang akan maju sebagai bakal presiden pada Pemilu 2014 harus diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah memilih calon Presiden dalam Pemilu 2014. Begitu juga dengan tuturan “anggota parpol sebagai pemain sekaligus wasit” bermaksud menyatakan agar mereka yang menjadi anggota KPU dan Bawaslu harus bebas dari keanggotaan parpol, minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri.

3. Eufemisme

Eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Keraf, 1984: 132).

Contoh:

(43) (P. X. 21g) *Tetapi, kita jangan pernah lupa bahwa semua itu hanyalah kerlap-kerlip lampu kapal yang datang dan pergi.* (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 21/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada resepsi Hari Ulang Tahun Golkar Ke-46 terkait kompetisi antarpartai yang identik dengan politik kepentingan, perebutan pengaruh, citra, dan posisi pribadi politisi.

- (44) (P. XII. 2c) *Bayangkan kalau kita sudah menghunus pedang lawan korupsi, tiba-tiba penegak hukum yang harusnya **berdiri paling depan memberantas korupsi** juga terlibat kejahatan ini. Kalau ingin menyapu lantai yang kotor, mari kita pastikan sapu kita bersih terlebih dahulu.* (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 02/12/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif.

- (45) (P. XII. 9c) *Bagaimana Setgab mau **efektif jika** politik saling sandera juga melibatkan tokoh-tokoh kunci. **Jika gajah sudah saling bertarung, ya, sudah kelinci minggir saja.*** (Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, 09/12/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Praktik politik saling sandera (kasus Bank Century dan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan) mendominasi dinamika politik 2010.

Berdasarkan tuturan di atas, penutur menggunakan majas eufemisme dengan tujuan memperhalus penyampaian maksud yang sesungguhnya. Penutur menjaga kehormatan mitra tutur agar tidak merasa dipermalukan atau direndahkan. Karena majas eufemisme ini digunakan dengan tujuan menghaluskan tuturan maka

pemakaian majas ini jelas membuat sebuah tuturan akan menjadi lebih atau makin santun.

4. Paradoks

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga diartikan semua hal yang menarik perhatian karena kebenarannya (Keraf, 1985: 136).

Contoh

(46) (P. XI. 9d) *Di sini hujan, tetapi udaranya panas sekali. Aneh, kan.* (Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono, 09/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pengungsi dan wilayah letusan Gunung Merapi.

(47) (H. XII. 18k) *Secara fisik kita merupakan masyarakat modern. Tetapi di balik itu masih sangat purba. Sekitar 230 juta penduduk Indonesia hanya mendapat bagian 5 persen pendapatan nasional bruto. Mereka tidak mengetahui hidup ini untuk apa. Sedangkan 40 orang terkaya di Indonesia menguasai 60 persen pendapatan nasional bruto. Mereka sama para elite menggunakan akses dan kekuasaan atas perekonomian untuk memuaskan nafsu purba mengumbar hidup yang hedonis dan tidak memedulikan kesejahteraan rakyat.* (Budayaan Radhar Panca Dahana, 18/12/2010, hal 4, H. XII. 18k)

Konteks tuturannya:

Penafsiran sejarah secara tepat dapat membebaskan bangsa Indonesia dari tradisi kekerasan.

Berdasarkan tuturan di atas, penutur menggunakan majas paradoks dengan tujuan menyampaikan maksud yang sesungguhnya. maka tuturan (48) dan tuturan (49) cenderung dipersepsikan sebagai tuturan yang kadar kesantunannya rendah (tidak santun) oleh mitra tutur.

5. Peribahasa

Dalam KBBI (2007: 858), dijelaskan bahwa peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Majas peribahasa dapat memperhalus tuturan yang sebenarnya keras sehingga tuturan itu menjadi terasa santun.

(48) (P. X. 21f) *Di kalangan kaum pemikir dikenal ungkapan: **to rule is easy, to govern is difficult**. Berkuasa memang mudah, tetapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukan pekerjaan gampang. Dibutuhkan visi, dedikasi, dan keberanian untuk bertindak manakala diperlukan.* (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 21/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada resepsi Hari Ulang Tahun Golkar Ke-46 terkait pemimpin yang baik.

(49) (P. XII. 22b) *Saya sering bicara dengan anggota Setgab dari PKS, PAN, dan PKB. Kami ini ibarat pepatah, **habis manis sepah dibuang**. Jika dibutuhkan, kami diajak bicara; jika kita tidak dibutuhkan, kami ditinggalkan.* (Sekretaris Fraksi PP Romahurmuziy, 22/12/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab.

6. Personifikasi

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Majas personifikasi ini juga digunakan untuk mengoptimalkan pemakaian bahasa sehingga terasa santun. Isi tuturannya kadang-kadang berupa kritik, tetapi karena disampaikan secara tidak langsung dengan majas personifikasi, maka kritikan tersebut terasa tidak menyakitkan.

Contoh:

(50) (P. X. 23a) *Dengan melihat hal-hal tersebut, gagasan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional pun bisa **mencederai hati nurani rakyat**. Gagasan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional sebaiknya ditolak.* (Direktur Public Affairs LSI Burhanuddin Muhtadi, 23/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Survei Lembaga Survei Indonesia terkait warisan politik Soeharto.

(51) (P. X. 21c) *Seharusnya pimpinan mendengar **gejolak publik** yang menolak kunjungan ke luar negeri. Mereka punya kewenangan untuk membatalkan.* (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan T. Gayus Lumbuun, 21/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

DPR diminta menghentikan rencana kunjungan kerja ke luar negeri.

Tuturan (50) merupakan kritik sebagian besar kalangan di masyarakat yang menilai Soeharto adalah orang yang bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi pada 1998. Begitu pula, tuturan (51) berisi kritik kepada DPR terkait kasus kunjungan

kerja ke luar negeri yang dinilai tidak efektif karena hasilnya tidak sepadan dengan dana yang dihabiskan.

7. Litotes

Dalam KBBI (2007: 679), dijelaskan bahwa litotes adalah pernyataan yang memperkecil sesuatu atau melemahkan dan menyatakan kebalikannya. Majas litotes dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya. Majas litotes ini juga digunakan untuk mengoptimalkan pemakaian bahasa sehingga terasa santun.

Contoh:

(52) (P. X. 8a) *Tiba-tiba ada pemberitahuan di media, dikatakan biaya pakaian Presiden itu mencapai Rp 893 juta per tahun. **Satu rupiah pun tidak ada biaya untuk dipakai saya. Sejak pertama menjadi Presiden RI tahun 2004, tidak pernah ada selembaar pakaian pun menggunakan uang negara. Jelas, faktanya ada.*** (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal2)

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

Penutur (Presiden Susilo Bambang Yudoyono) mengungkapkan tuturan “*Satu rupiah pun tidak ada biaya untuk dipakai*” dan “*tidak pernah ada selembaar pakaian pun menggunakan uang negara*” untuk merendahkan dirinya terkait tuduhan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Karena majas litotes ini digunakan dengan tujuan menghaluskan tuturan maka pemakaian majas ini jelas membuat sebuah tuturan terasa santun.

4.2.2.4 Penggunaan Keterangan (Kata) Modalitas

Dalam KBBI (2007: 751), modalitas diartikan sebagai klasifikasi pernyataan menurut hal menyanggahkan atau mengingkari kemungkinan atau keharusan; cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu situasi dalam suatu komunikasi antarpribadi; makna kemungkinan, keharusan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat (dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan kata *barangkali, harus*, dan sebagainya).

Menurut Keraf (1991: 213), keterangan modalitas adalah suatu proses yang berlaku secara subjektif, yaitu seperti dikehendaki atau ditafsirkan oleh pembicara. Razak (1985: 13) juga menyatakan bahwa kata modalitas juga disebut "kata warna", yang berfungsi untuk mengubah keseluruhan arti sebuah kalimat. Masuknya sebuah kata modalitas ke dalam sebuah kalimat akan memungkinkan kalimat itu berubah menjadi sebuah pernyataan yang tegas, yang ragu-ragu, yang lembut, yang pasti, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang ada ditemukan enam bentuk keterangan (kata) modalitas yang digunakan penutur yang memungkinkan pendengar berpersepsi (memberikan penilaian) mengenai sopan santun tuturan tersebut. Keenam bentuk keterangan modalitas tersebut adalah keterangan modalitas yang menyatakan tingkat kepastian, keharusan (kewajiban), kondisional (syarat), kemungkinan, harapan, ajakan. Berikut akan dijelaskan masing-masing kedua bentuk keterangan modalitas yang dimaksud.

a. Keterangan Modalitas yang Menyatakan Tingkat Kepastian

Kata atau keterangan modalitas yang menyatakan tingkat kepastian yaitu suatu perbuatan sungguh-sungguh atau pasti terjadi, baik secara positif atau negatif. Kata-kata tugas yang menyatakan keterangan ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata *pasti*, *tidak*, *tak*, *tentu*, *sungguh*, *sesungguhnya* (Keraf, 1991: 213).

Perhatikan contoh di bawah ini!

(53) (P. X. 1g) *Siapa pun yang menjadi menteri keuangan **pasti** akan dibandingkan dengan Sri Mulyani.* (Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, 01/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Integritas Sri Mulyani memberikan standar minimal bagi posisi menteri keuangan.

(54) (P. X. 8h) *Meskipun ada saran Presiden tetap meneruskan kunjungan, situasi ini benar-benar sulit bisa dipahami. Kondisi ini juga **tidak** mengenakan Presiden, yang jika berkunjung saat itu pengadilannya tengah berlangsung.* (Jubir Presiden RI Julian Aldrin, 08/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak menunda kunjungan kenegaraannya ke Belanda terkait info *Kort Geding*.

Berdasarkan contoh tuturan di atas, dapat dianalisis bahwa tuturan pertama (53) menunjukkan bahwa dalam tuturan itu penutur seolah-olah memastikan sesuatu yang sesungguhnya belum pasti terjadi. Isi tuturan

penutur itu hanyalah prasangka atau dugaan yang kebenarannya masih dipertanyakan. Karena itulah maka tuturan yang pertama ini cenderung dipersepsikan sebagai tuturan yang kurang santun oleh pendengar. Berbeda dengan tuturan kedua (54), penutur menuturkan suatu kemungkinan mengenai penyebab penundaan kunjungan kenegaraan ke Belanda. Penundaan tersebut terkait dengan rencana kelompok Republik Maluku Selatan untuk menggugat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tuduhan pelanggaran HAM yang akan didaftarkan di pengadilan Den Haag, Belanda. Dengan kenyataan itu maka tuturan yang kedua itu dipersepsikan sebagai tuturan yang santun.

b. Keterangan Modalitas yang Menyatakan Tingkat Keharusan (Kewajiban)

Keterangan modalitas yang menyatakan tingkat keharusan atau kewajiban lazim ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti: *harus*, *seharusnya*, dan *wajib*.

Perhatikan contoh di bawah ini!

(55) (H. XI. 16d) *Seharusnya* parlemen dinilai dari fungsi pengawasannya, bukan berapa produk undang-undang yang dihasilkan. Yang penting adalah kualitas undang-undang dan berapa lama undang-undang itu bisa dipakai. (Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin, 16/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Berbagai peraturan terkait pemilu diusulkan dibuat dalam satu kodifikasi hukum.

(56) (H. XI. 18f) *Di sisi lain, perbaikan peraturan pemilu diperlukan segera dan cepat. Perubahan paket undang-undang politik harus dilakukan segera dan cepat agar mampu mengejar persiapan pelaksanaan Pemilu 2014. Kami telah sepakat selambat-lambatnya 2,5 tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2014. (Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo, 18/11/2010, hal 4)*

Konteks tuturannya:

Kodifikasi hukum pemilu baru dapat dilakukan setelah Pemilu 2014.

Tuturan yang menyatakan tingkat keharusan atau kewajiban sebagian besar dinilai tidak santun oleh mitra tutur karena tuturan yang diucapkan penutur tidak memberi pilihan lain kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan; dan karena tidak berpeluang untuk memilih alternatif lain maka potensi untuk kehilangan muka bagi mitra tutur cukup tinggi sehingga tuturan tersebut dapat dipersepsikan tidak santun.

c. Keterangan Modalitas yang Menyatakan Tingkat Kondisional (Syarat)

Keterangan modalitas yang menyatakan tingkat kondisional (syarat), yaitu suatu perbuatan dapat terjadi atau akan berlangsung bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Kata-kata tugas yang mendukung keterangan syarat seperti *jika, jikalau, kalau, sekiranya, seandainya* (Keraf, 1991: 213).

Perhatikan contoh di bawah ini!

(57) (H. X. 8k) *Adalah tidak adil **jika** dua orang itu belum kena PAW. Ini membuat mereka, diduga, tetap menerima gaji dan fasilitas sebagai anggota DPR, padahal sudah tidak dapat*

menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif karena ada di penjara.(Anggota Koalisi Fahmi Badoh, 08/10/2010,hal 4)

Konteks tuturannya:

Koalisi Penegak Citra DPR mendesak BK DPR untuk menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan tindak korupsi.

Tuturan yang menyatakan tingkat kondisional sebagian besar dinilai tidak santun oleh mitra tutur karena tuturan yang diucapkan penutur terkesan menuntut mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan dengan syarat tertentu. Berdasarkan tuturan (57), penutur (Fahmi Badoh) agar partai politik bertindak lebih tegas dalam PAW (pergantian antarwaktu) dua anggota DPR terpidana kasus korupsi (As'ad Syam dari Fraksi Partai Demokrat dan Dudhie Makmun Murod dari Fraksi PDI-P). Penutur berprasangka bahwa kedua terpidana kasus korupsi tersebut tetap menerima gaji dan fasilitas sebagai anggota DPR. Karena penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur dan berpotensi merendahkan mitra tutur (kehilangan muka bagi mitra tutur cukup tinggi) sehingga tuturan tersebut dapat dipersepsikan tidak santun.

(58) (H. XI. 8g) *Kasus Gayus, misalnya, siapa yang tahu kalau tidak dibongkar.* (Kastorius Sinaga, 08/11/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Kinerja aparat hukum dalam kasus pemberantasan korupsi dinilai semakin buruk.

Berdasarkan tuturan (58), penutur (Kastorius Sinaga) menyatakan masalah transparansi proses penyidikan sangat penting untuk membangun integritas lembaga penegak hukum. Tanpa ada transparansi, mudah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif. Penutur juga menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur dan berpotensi merendahkan mitra tutur (kehilangan muka bagi mitra tutur cukup tinggi) sehingga tuturan tersebut dapat dipersepsikan tidak santun.

d. Keterangan Modalitas yang Menyatakan Tingkat Kemungkinan

Kata atau keterangan modalitas yang menyatakan tingkat kemungkinan biasanya ditandai dengan penggunaan kata *mungkin*. Mungkin berarti sesuatu yang dibicarakan itu belum jelas (dapat terjadi tetapi dapat pula tidak), contoh:

(59) (H. XI. 22b) *Mungkin* tidak untuk sekarang. Hakim-hakim sekarang masih baik-baik. Tetapi tidak tahun 10 tahun ke depan. Makanya, saya usul, itu perlu dipikirkan lagi sekarang. (Ketua MK Mahfud M.D., 22/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Ketua MK Mahfud M.D. menilai MK perlu mendapatkan pengawasan dari lembaga eksternal.

Tuturan di atas menjelaskan bahwa kemungkinan kinerja hakim-hakim akan mengalami penurunan pada waktu sepuluh tahun mendatang sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengontrol Mahkamah Konstitusi. yang

ditandai dengan penggunaan kata *mungkin*. Tuturan penutur itu hanyalah prasangka atau dugaan yang kebenarannya masih dipertanyakan. Kemungkinan itu dituturkan oleh penutur karena Komisi Yudisial tidak boleh mengawasi Mahkamah Konstitusi. Dengan kenyataan itu maka tuturan tersebut dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun.

4.2.2.5 Penggunaan Keterangan (Kata) Sebab

Keterangan (kata) sebab menjelaskan mengapa suatu perbuatan atau tindakan dilakukan. Keterangan ini biasanya dinyatakan dengan kata-kata tugas sebab, karena, dan oleh karena (Keraf, 1991: 211). Contoh:

(60) (P. X. 5d) *Pemilu akan kacau **karena** tidak akan bisa lepas dari tarik-menarik kepentingan parpol.*(Peneliti IPC, Erik Kurniawan, 05/10/2010,hal 4)

Konteks tuturannya:

Keterlambatan pembentukan KPU berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu 2014.

(61) (H. XI. 19c) *Presiden semestinya tak berkomentar **sebab** kasus ini masih ditingkat banding. Pernyataan Presiden itu jelas intervensi.* (Luhut Simanjuntak, 19/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Presiden SBY dinilai melakukan intervensi dalam penanganan kasus M. Misbakhum.

Tuturan yang menyatakan keterangan sebab menunjukkan pernyataan atau pertanyaan dengan suatu alasan tertentu berdasarkan topik pembicaraan antara

penutur dan mitra tutur. Dengan keterangan sebab, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis latar belakang penutur menyampaikan tuturannya.

4.2.2.6 Penggunaan Keterangan (Kata) Akibat

Keterangan akibat menjelaskan hasil atau akibat yang terjadi karena suatu perbuatan. Keterangan ini biasanya dinyatakan oleh frasa yang didahului oleh kata-kata tugas *sehingga*, *sampai*, dan *akibat* (Keraf, 1991: 211). Contoh:

(62) (H. XI. 3a) *Ini tugas berat untuk meningkatkan integritas sehingga tidak ada lagi nantinya petugas yang menerima gratifikasi dan layanannya akan menjadi lebih baik.* (Wakil Ketua KPK M. Jasin, 03/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

KPK meminta ada perbaikan. survei layanan publik untuk cegah korupsi.

(63) (H. XI. 25c) *Dulu bebas, sekarang terkontrol. Ditambah lagi sekarang semua informasi terbuka dan transparan. Jadi, ruang gerak agak sempit sehingga banyak terungkap.* (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan, 25/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Ruang gerak koruptor semakin sempit.

Tuturan yang menyatakan keterangan akibat menunjukkan hasil atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila penutur atau mitra tutur melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan keterangan akibat pada suatu tuturan, peneliti dapat menentukan tingkat kesantunan tuturan yang disampaikan penutur.

4.2.2.7 Penggunaan Keterangan (Kata) Tujuan

Keterangan tujuan menjelaskan hasil suatu perbuatan yang dengan sengaja dikehendaki atau ingin dicapai. Keterangan ini dinyatakan dengan kata-kata *untuk, supaya, agar*.

Contoh

(64) (P. X. 6a) *Perlu meningkatkan kualitas anggota Dewan **agar** tahu apa yang dimaksud aspirasi dan kepentingan rakyat. Anggota dewan seharusnya menampung aspirasi, membuat legislasi, dan mengawasi.* (Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris, 06/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Anggota DPR dinilai tidak mengetahui tugas pokok legislatif dalam membuat undang-undang.

(65) (H. XI. 26a) *Saya menilai tugas yang seharusnya bisa diselesaikan segera, saya harapkan bisa dituntaskan pada waktunya. Misalnya, saya meminta **supaya** dipersiapkan rancangan instruksi presiden tentang penghematan biaya di APBN dan APBD, seperti yang saya minta waktu sidang kabinet di Bogor tanggal 21 Oktober lalu.* (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.

(66) (H. XII. 11a) *Dulu kita berjuang untuk mendapatkan hak politik. Sekarang, dari segi hukum konstitusi, kita telah punya perangkat aturan. Sekarang berbalik. Dulu pemerintah melanggar HAM karena hak politik. Sekarang pengguna hak politik justru melanggar hak orang lain, menggunakan organisasi politik **untuk** melanggar HAM, hak sipil, dan politik.* (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 11/12/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. dalam acara penyerahan Yap Thiam Hien Award 2010 terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Tuturan yang menyatakan keterangan tujuan menunjukkan maksud suatu perbuatan.

Berdasarkan keterangan tujuan pada suatu tuturan, peneliti dapat menentukan tingkat kesantunan tuturan yang disampaikan penutur.

4.2.2.8 Menyebutkan Subjek yang Menjadi Tujuan Tuturan

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi (bertutur) agar sopan santun tetap terjaga adalah dengan tidak menyebutkan pendengar atau subjek yang menjadi tujuan tuturan itu apalagi kalau yang menjadi isi tuturan tersebut adalah sesuatu yang kurang baik (keburukan atau kejelekan) mitra tutur atau pendengar (Sarwoyo, 2009). Perhatikanlah contoh-contoh di bawah ini!

(67) (H. X. 2g) *Presiden SBY sangat relevan didengar keterangannya karena beliau hadir dalam rapat-rapat pada masa kabinet Presiden Gus Dur. SBY mengetahui proses Sisminbakum.* (Yusril Ihza Mahendra, 02/10/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Yusril Ihza Mahendra mengajukan saksi-saksi meringankan terkait kasus Sisminbakum.

(68) (H. X. 27c) *Memasuki tahun keenam pemerintahan Yudhoyono atau tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, Setara Institute mencatat kinerja penegakan HAM justru semakin menurun.* (Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace Hendardi, 27/10/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Kinerja pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia dinilai masih rendah.

(69) (P. X. 2d) *Bantahan **Gamawan** dan keterlambatan Kejagung mengumumkan status tersangka pejabat **Kemdagri** ini menimbulkan tanda tanya. Kejagung juga baru umumkan setelah ditanya wartawan. Kami curiga kasus ini akan dihentikan secara diam-diam. (Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sumaryanto, 02/10/2010, hal 3)*

Konteks tuturannya:

Mendagri tidak bisa mengingkari fakta ada anggota staf jajarannya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Dalam contoh di atas kita bisa melihat bagaimana penutur di dalam bertutur langsung menyebutkan subjek atau orang yang menjadi tujuan tuturan itu; dan hal ini terdapat di hampir semua surat kabar yang dianalisis. Dalam contoh di atas jelas bahwa pihak atau orang-orang yang disebutkan namanya oleh penutur (yakni Presiden SBY, Presiden Gus Dur, Gamawan, pejabat Kemdagri, ibu Ani Yudhoyono) merasa kehilangan muka karena apa yang disebutkan tentang mereka adalah sesuatu yang negatif (kekurangan atau kelemahan).

Berdasarkan tuturan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebutan subjek atau pihak tertentu dalam tuturan (67) dan tuturan (68) khususnya yang menyinggung kekurangan, kelemahan, dan hal-hal negatif dari pihak-pihak itu dapat dipersepsikan tidak santun, serta tuturan (69) dipersepsikan sangat tidak santun. Sebaliknya tuturan yang sama sekali tidak menyinggung kejelekan atau hal-hal negatif dari diri penutur

cenderung dipersepsikan santun oleh pendengar atau mitra tutur. Bandingkan dengan contoh di bawah ini!

(70) (P. XI. 16a) *Obama* pemimpin bersahaja, jauh dari kesan angkuh dan congkak. Jauh dari persepsi kita tentang Amerika Serikat (AS) yang arogan. Latar belakang Obama dari keluarga sederhana. Dia menjadi spirit bagi politisi. (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, 16/11/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Kekaguman kepada Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama.

Dalam tuturan itu terlihat penutur mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama. Di dalam tuturan itu penutur sama sekali tidak menyinggung kekurangan, menyebutkan kelemahan, dan hal-hal negatif dari mitra tutur dan tuturan yang diungkapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini di atas dipersepsikan sebagai tuturan yang sangat santun.

Berdasarkan tuturan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebutan subjek atau pihak tertentu dalam sebuah tuturan khususnya yang menyinggung kekurangan, kelemahan, dan hal-hal negatif dari pihak-pihak itu sering dipersepsikan tidak santun, bahkan sangat tidak santun oleh pendengar. Sebaliknya tuturan yang sama sekali tidak menyinggung kejelekan atau hal-hal negatif dari diri penutur cenderung dipersepsikan santun oleh pendengar atau mitra tutur.

4.2.2.9 Bentuk Tuturan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang ada, ditemukan dua jenis atau bentuk tuturan yang digunakan penutur atau pembicara ketika menyampaikan maksudnya. Dua bentuk tuturan yang ditemukan yakni tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. Menurut Sarwoyo (2009), tuturan tidak langsung biasanya diwujudkan dengan tuturan interogatif (pertanyaan) dan juga tuturan deklaratif; sedangkan tuturan langsung sering diwujudkan dengan kalimat imperatif (perintah) dan kalimat deklaratif (pernyataan). Sering terjadi beberapa bentuk atau jenis tuturan (misalnya: tuturan deklaratif dan interogatif) digunakan secara bersamaan untuk menyampaikan suatu maksud yang sama; begitu pula sebaliknya, suatu bentuk atau jenis tuturan dituturkan oleh pembicara atau penutur untuk menyampaikan beberapa maksud yang berbeda (misalnya: mengeskpresikan kekecewaan dan memerintah/menyuruh secara halus), contoh:

(71) (P. XI. 27g) *Bagaimana kami bisa terikat dengan BK DPR jika tidak tahu proses yang ada di badan itu karena tidak punya wakil?* (Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura, 27/11/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Fraksi Partai Gerindra dan Hanura menuntut jatah kursi di BK DPR.

Apabila dikaji secara mendalam, tuturan Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura berwujud tuturan tidak langsung (tuturan interogatif). Tuturan tersebut mengandung dua fungsi bahasa, yakni fungsi bahasa representasional dan fungsi bahasa instrumental. Fungsi bahasa representasional terwujud karena melalui

tuturannya itu Akbar Faizal menegaskan bahwa fraksinya tidak mengakui dan menyatakan tidak terikat dengan Badan Kehormatan DPR selama belum mempunyai wakil di badan itu. Selain itu, dalam tuturan itu juga terwujud fungsi bahasa instrumental, penutur secara tidak langsung menuntut jatah kursi di Badan Kehormatan DPR, penataan anggota BK DPR diharapkan mengatur komposisi perwakilan fraksi di badan itu .

Pemilihan bentuk tuturan interogatif untuk mewujudkan dua fungsi bahasa representasional dan instrumental seperti yang dituturkan penutur (Akbar Faizal) telah melibatkan kesantunan. Oleh pendengar tuturan di atas dipersepsikan sebagai tuturan yang santun karena melalui tuturannya, penutur membela partainya secara lugas berdasarkan kelogisan sesuatu. Bandingkan dengan contoh berikut!

(72) (P. XII. 4d) *Saya dengan Pak Sultan tidak ada apa-apa, diadu-adu. Saya menghormati Pak Sultan dan beliau menghormati saya. Tetapi, menjadi berita terus. Sabar, Pak Sultan.* (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 04/12/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait RUU tentang Keistimewaan DIY.

Tuturan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan tuturan tidak langsung (tuturan deklaratif). Tuturan tersebut mengandung dua fungsi bahasa, yakni fungsi bahasa representasional dan fungsi bahasa personal. Fungsi bahasa representasional terwujud karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kepastian bahwa hubungan penutur dengan Sultan Hamengku Buwono X baik-baik

saja terkait RUU tentang Keistimewaan DIY. Sedangkan fungsi bahasa personal terwujud karena dalam tuturan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak kecewa dengan gencarnya pemberitaan dirinya dengan Sultan Hamengku Buwono X yang dinilai tidak baik. Tuturan di atas dipersepsikan sebagai tuturan yang santun karena melalui tuturannya, penutur melakukan pembelaan diri dengan cara menyindir untuk menjaga muka (kehormatan) mitra tutur.

Pemilihan bentuk tuturan tidak langsung yang berwujud tuturan deklaratif dan tuturan interogatif yang melibatkan dua fungsi bahasa atau lebih pasti telah mempertimbangan kesantunan berbahasa. Berdasarkan tuturan di atas (73) dan (74), penutur mewujudkan dua fungsi bahasa sekaligus dengan cara yang tidak langsung. Dalam konteks ini berlakulah hipotesis yang berbunyi “semakin tidak langsung suatu tuturan maka semakin santunlah tuturan tersebut”. Bandingkan dengan contoh berikut!

(73) (P. XI. 29e) *PKPI akan lenyap karena tidak memenuhi PT. Karena ini dikemas partai besar, pasti ada niat terselubung. Partai kecil dianggap mengganggu partai besar karena suaranya semakin tergerus.* (Ketua Umum PKPI Sutiyoso, 30/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dinaikkan sampai 5 persen.

Tuturan Sutiyoso dari Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di atas juga berwujud tuturan tidak langsung (tuturan deklaratif). Tuturan tersebut mengandung tiga fungsi bahasa, yakni fungsi bahasa representasional, fungsi bahasa

personal, dan fungsi bahasa instrumental. Fungsi bahasa representasional terwujud karena Sutiyoso memastikan partai kecil akan hilang apabila pemerintah menaikkan ambang batas parlemen menjadi lima persen. Secara otomatis banyak suara masyarakat yang terbuang dalam pemilihan umum. Fungsi bahasa personal terwujud melalui tuturan Sutiyoso yang merasa kecewa dengan usulan (*parliamentary threshold*) tersebut. Sedangkan fungsi bahasa instrumental terwujud jika melalui tuturannya, Sutiyoso bermaksud menuntut pemerintah agar tidak menaikkan ambang batas parlemen, penyerderhanaan parpol dapat dilakukan secara bertahap, tanpa perlu menaikkan ambang batas parlemen.

Pemilihan bentuk tuturan deklaratif untuk mewujudkan tiga fungsi bahasa representasional dan instrumental seperti yang dituturkan penutur (Sutiyoso) telah melibatkan kesantunan. Tuturan di atas dipersepsikan sebagai tuturan yang santun karena melalui tuturannya, penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Berdasarkan tuturan (73), penutur mewujudkan tiga fungsi bahasa sekaligus dengan cara yang tidak langsung. Karena alasan tertentu, ada kemungkinan tuturan tidak langsung dapat pula terdengar tidak santun. Bandingkan dengan contoh berikut.

- (74) (P. XII. 10e) *Saya melihat sekarang sikap masyarakat makin mengkristal ke arah penetapan. Kalau referensi umum, sejarah, budaya, dan hukum, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menolak. Karena itu, sebaiknya dengan melihat hal itu, Sultan HB X memimpin untuk menyatakan penetapan ke pemerintah pusat. Sultan tak usah ragu-ragu karena rakyat sudah bulat mendukung.* (Koordinator Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta Kiai Abdul Muhaimin, 10/12/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Isu keistimewaan DIY semakin mengerucut karena penetapan kini cenderung menjadi harga mati untuk mempertahankan identitas keyogyaan yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat.

Tuturan Kiai Abdul Muhaimin di atas berwujud tuturan langsung (tuturan imperatif). Tuturan tersebut mengandung dua fungsi bahasa, yakni fungsi bahasa instrumental dan fungsi bahasa representasional. Fungsi bahasa instrumental mengandung maksud menuntut agar Sultan HB X dapat bertindak tegas terhadap isu keistimewaan DIY. Apalagi, Sultan HB X memiliki gelar Senapati ing Ngalaga yang mencerminkan Sultan memiliki kepemimpinan politik untuk mempertahankan keistimewaan DIY. Penutur juga mempertimbangkan kelogisan gejala-gejala yang tampak di masyarakat DIY yang teguh mempertahankan keistimewaan DIY dengan berbagai aksi.

Pemilihan bentuk tuturan imperatif untuk mewujudkan dua fungsi bahasa representasional dan instrumental seperti yang dituturkan penutur (Kiai Abdul Muhaimin) telah melibatkan kesantunan. Tuturan (Kiai Abdul Muhaimin) dapat mengancam muka mitra tutur. Tuturan di atas dipersepsikan sebagai tuturan yang tidak santun karena melalui tuturannya, penutur seolah-olah menyalakan mitra tutur terkait isu keistimewaan DIY.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari kajian yang dilakukan terhadap tuturan yang ada di dalam surat kabar itu ditemukan ada enam fungsi bahasa yang diwujudkan penutur melalui tuturannya, yakni fungsi bahasa yang dipergunakan untuk memanipulasi lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu (fungsi bahasa instrumental, penggunaan bahasa yang berfungsi untuk membuat pernyataan, menyajikan fakta (fungsi representasional), penggunaan bahasa untuk mengontrol suatu peristiwa, seperti memberikan persetujuan, penolakan (fungsi regulatori), penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menjaga hubungan agar komunikasi tetap dapat berjalan lancar (fungsi interaksional, penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian (fungsi personal), dan fungsi bahasa yang dipergunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan (fungsi heuristik). Berdasarkan fungsi bahasa, tuturan yang diucapkan penutur dapat mengandung lebih dari satu maksud.

Fungsi bahasa instrumental merupakan bentuk komunikatif yang menyatakan suatu keadaan. Dalam upaya mewujudkan maksudnya itu, penutur menggunakan bentuk tuturan imperatif, contohnya:

(75) (H. XI. 23d) *Saya bicara kepada Ketua DPR, selesaikan masalah ini, atau kita ribut.* (Salim Mengga dari F-PD, 23/11/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Delapan anggota BK DPR merasa tidak melanggar apa pun saat melakukan kunjungan kerja ke Yunani.

- (76) (H. XI. 16d) *Seharusnya* parlemen dinilai dari fungsi pengawasnya, bukan berapa produk undang-undang yang dihasilkan. Yang penting adalah kualitas undang-undang dan berapa lama undang-undang itu bisa dipakai. (Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin, 16/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Berbagai peraturan terkait pemilu diusulkan dibuat dalam satu kodifikasi hukum.

- (77) (H. XI. 26b) *Tolong* ini segera diselesaikan oleh menteri dan pejabat terkait lainnya. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.

- (78) (H. XI. 26f) *Tidak harus semuanya oleh Presiden diresponsnya. Mari* jalankan sistem dan ambil tanggung jawab yang sesuai dengan peranan dan tanggung jawab. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.

Hal yang menarik dari keempat contoh di atas adalah bahwa tiga tuturan yang berbeda itu dapat digunakan penutur untuk hanya mewujudkan satu fungsi bahasa instrumental. Derajat "ketembuspandangan" atau kelangsungan suatu tuturan erat kaitannya dengan tingkat kesantunan tuturan tersebut. Semakin tinggi derajat "ketembuspandangan" atau kelangsungan suatu tuturan, maka semakin tidak

santunlah tuturan itu. Sebaliknya semakin rendah derajat "ketembuspandangan" atau kelangsungan suatu tuturan, maka semakin santunlah tuturan itu (Sarwoyo, 2009). Apabila dilihat dari segi derajat "ketembuspandangan" atau kelangsungan penyampaian maksud, ketiga bentuk tuturan di atas tidak sama. Tuturan (75) memiliki derajat "ketembuspandangan" atau kelangsungan yang paling tinggi, kemudian disusul tuturan (76), (77), kemudian (78).

Ketiga tuturan di atas diurutkan dari yang memiliki tingkat "ketembuspandangan" atau kelangsungan paling tinggi ke yang paling rendah, maka akan kita temukan urutan sebagai berikut: tuturan (75), tuturan (76), tuturan (77), dan tuturan (78). Tuturan (75) dianggap sebagai tuturan yang memiliki derajat "ketembuspandangan" yang paling tinggi karena melalui tuturan itu penutur secara eksplisit atau langsung mengutarakan apa yang menjadi maksudnya (memerintah secara langsung) melalui tuturan itu. Tuturan (76) hampir sama dengan tuturan (77) hanya pemilihan kata penutur masih menjaga muka mitra tutur. Tuturan (78) penutur juga secara langsung menyampaikan maksudnya. Bedanya adalah tuturan (77) menggunakan bentuk perintah yang berwujud ajakan, sedangkan tuturan (78) menggunakan bentuk permintaan.

Derajat "ketembuspandangan" berbanding terbalik dengan tingkat kesantunan. Oleh karena itu, kalau ketiga tuturan di atas diurutkan dari yang paling santun (tingkat kesantunannya tinggi) ke yang paling rendah, kita akan menemukan urutan sebagai berikut: tuturan (78), tuturan (77), kemudian tuturan (76), dan tuturan (75). Tuturan (78) dianggap sangat santun daripada tuturan (77) karena pada tuturan (78)

penutur secara langsung memerintah kepada menteri dan pejabat pemerintahan lain untuk menyelesaikan tugas kewajibannya yang ditandai dengan penggunaan kata *tolong*. Sedangkan, tuturan (77) penutur juga secara tidak langsung memerintah menteri dan pejabat pemerintahan lain untuk menjalankan peranan dan tanggung jawabnya yang ditandai dengan penggunaan kata *mari*.

Tuturan (76) bertujuan menyampaikan maksud secara langsung, namun penutur tetaplah memilih bentuk tuturan yang sifatnya permintaan meskipun permintaan penutur itu juga tergolong kasar yang ditandai dengan penggunaan kata *seharusnya*. Kata *seharusnya* menyiratkan makna paksaan dari penutur kepada mitra tutur. Penutur bermaksud atau mengharapkan mitra tutur tidak bisa tidak melakukan apa yang diinginkannya. Kata *seharusnya* yang dituturkan penutur sama sekali tidak memberikan kemungkinan bagi mitra tutur untuk memilih alternatif lain; mitra tutur tidak diberi kebebasan untuk memilih. Sedangkan tuturan (75) permintaan penutur itu juga tergolong sangat kasar yang ditandai dengan penggunaan kata *selesaikan masalah ini, atau kita ribut*. Kata *selesaikan masalah* yang dituturkan penutur sama sekali tidak menyelamatkan muka mitra tutur (kehormatan mitra tutur), seolah-olah penutur memaksa mitra tutur (Ketua DPR) untuk melakukan kasus studi banding ke Yunani dan memberi alternatif penyelesaian masalah dengan cara kasar yang terungkap dengan kata *atau kita ribut*

Munculnya bentuk tuturan yang tidak santun seperti contoh kemungkinan dapat mengganggu komunikasi yang terjalin antara penutur dan mitra tutur. Kemungkinan seperti ini tentunya sama sekali tidak diinginkan oleh masyarakat

pemakai bahasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar setiap tuturan yang diucapkan penutur itu tidak mengganggu hubungan antara penutur dengan mitra tutur?

Pertanyaan di atas sudah terjawab dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang menjadi penanda tingkat kesantunan suatu tuturan. Pengetahuan tentang penanda-penanda itu memungkinkan penutur dapat memilih bentuk atau macam tuturan yang dapat meminimalisasi terjadinya keretakan atau kerusakan hubungan antara pembicara dengan lawan bicara. Penanda-penanda itu adalah: 1) analogi, 2) diksi atau pilihan kata, 3) gaya bahasa, 4) penggunaan keterangan atau kata modalitas, 5) penggunaan keterangan sebab, 6) penggunaan keterangan akibat, 7) penggunaan keterangan akibat, 8) penyebutan subjek yang menjadi tujuan tuturan, dan 9) bentuk tuturan. Di dalam tuturan, penanda-penanda ini dapat terjadi hanya digunakan satu jenis tetapi dapat pula dalam satu tuturan terdapat lebih dari satu penanda yang digunakan sekaligus, misalnya: diksi dan penyebutan subjek, dan lain-lain.

Tuturan-tuturan yang dinilai tidak (kurang) santun pada contoh (75) dan (76) di atas dapat diubah sehingga tuturan itu menjadi lebih santun namun, maksudnya tetap tersampaikan ke hadapan mitra tutur. Pengubahan itu dapat kita lakukan dengan beberapa kemungkinan, misalnya: kata-katanya yang terasa kasar diganti dengan kata lain yang lebih halus atau sopan (diksi), subjek yang menjadi sasaran tuturan tidak perlu disebutkan khususnya jika isi tuturannya adalah hal yang negatif tentang mitra tutur, tuturan yang berbentuk perintah diubah menjadi tuturan berbentuk pernyataan

atau pun pertanyaan, dan lain-lain. Maka, tuturan (75) dan (76) dapat kita ubah dengan beberapa kemungkinan tuturan yang lebih santun sebagai berikut:

tuturan (75):

- (a) *Saya bicara kepada Ketua DPR, selesaikan masalah ini, atau kita ribut*
- (b) *Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin.*

tuturan (76):

- (a) *Seharusnya parlemen dinilai dari fungsi pengawasnya, bukan berapa produk undang-undang yang dihasilkan. Yang penting adalah kualitas undang-undang dan berapa lama undang-undang itu bisa dipakai.*
- (b) *Fungsi pengawas parlemen dapat dinilai dari kualitas undang-undang dan berapa lama undang-undang itu dapat diimplementasikan.*

Keempat contoh itu (75a, 75b, 76a, dan 76b) hanyalah beberapa kemungkinan saja dari upaya memperhalus tuturan (75) dan (76) yang ada di atas. Pada contoh (75 a, 75 b) kita dapat melihat pengubahan bentuk tuturan imperatif biasa menjadi tuturan imperatif ajakan dengan adanya penggantian kata-kata yang dianggap kasar dengan kata-kata yang lebih halus. Upaya penghalusan tuturan tersebut ditandai dengan kata-kata yang berkonotasi *selesaikan masalah ini dengan kepala dingin*. Pengubahan bentuk tuturan tersebut meskipun tetap bermakna perintah atau suruhan seperti pada contoh (75 a) di atas tentunya tidak lain bertujuan agar tuturan itu menjadi lebih halus atau santun. Pada contoh (76 b) terlihat adanya pengubahan bentuk tuturan imperatif menjadi tuturan deklaratif sehingga maksud yang ingin disampaikan penutur tidak secara langsung disampaikan (disembunyikan).

Jenis fungsi bahasa yang kedua yang ditemukan dalam penelitian ini adalah fungsi bahasa representasional. Fungsi bahasa ini muncul dengan dilatarbelakangi oleh keinginan penutur untuk menyajikan fakta. Hal ini akan sangat tampak dalam tuturan yang sifatnya melaporkan, memikirkan sesuatu, menyetujui atau menolak, mengetahui atau tidak mengetahui, mengingat atau melupakan, mempertimbangkan kemungkinan atau ketidakmungkinan, dan lain-lain. Dalam mewujudkan fungsi bahasa representasional, penutur sering menggunakan bentuk tuturan deklaratif yang sifatnya cenderung netral.

Perhatikan contoh di bawah ini!

(79) (H. XII. 16a) *Pimpinan DPR sudah mempertanyakan target legislasi ini kepada Badan Legislasi (Baleg). Jawaban Baleg ternyata masuk akal karena ada 23 RUU yang pembahasannya sudah 90 persen dan tinggal ketok palu (disetujui) pada 2011.* (Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, 16/12/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

DPR memiliki pertimbangan khusus memasukkan 70 RUU dalam Program Legislasi Nasional.

Jika kita analisis tuturan (79) di atas, penutur (Priyo Budi Santoso) sesungguhnya hanya ingin menyatakan, melaporkan, atau pun menyebutkan apa telah dilakukan Badan Legislasi (Baleg). Kenyataan yang dituturkan Priyo Budi Santoso di atas memang terjadi, yakni pada Rapat Paripurna DPR menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk membahas 70 RUU pada tahun 2011 dan

menyatakan bahwa 23 RUU pembahasannya sudah selesai dan tinggal disetujui, maka tuturan Priyo Budi Santoso itu tergolong tuturan yang santun.

Salah satu ciri khas pemakaian bahasa yang digunakan dalam tuturan dengan fungsi bahasa representatif adalah penggunaan bentuk tuturan langsung (deklaratif) dan menggunakan kata-kata denotatif. Hal ini bertujuan agar mitra tutur menangkap isi informasi atau kebenaran dari ujaran yang dituturkan itu dengan jelas.

Fungsi bahasa yang ketiga adalah fungsi bahasa regulatori. Fungsi bahasa ini untuk mengontrol suatu peristiwa. Hal ini akan sangat tampak dalam tuturan yang berbentuk pengesahan, pernyataan aturan dan undang-undang, dan lain-lain. Dalam mewujudkan fungsi bahasa regulatori, penutur sering menggunakan bentuk tuturan deklaratif yang sifatnya cenderung netral. Salah satu ciri khas pemakaian bahasa yang digunakan dalam tuturan dengan fungsi bahasa regulatori adalah penggunaan bentuk tuturan langsung (deklaratif) dan menggunakan kata-kata denotatif. Hal ini bertujuan agar mitra tutur menangkap isi informasi atau kebenaran dari ujaran yang dituturkan itu dengan jelas. Perhatikan contoh di bawah ini!

(80) (H. X. 2a) *Perubahan UU harus dilakukan. Dalam UU disebutkan setiap orang berhak mendapatkan remisi. Jika tidak demikian, lalu disebut saja setiap orang berhak mendapatkan remisi kecuali teroris dan koruptor.* (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 02/10/2010, hal 2)

Konteks tuturannya:

Revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinilai akan memudahkan penerapan aturan dalam kasus terorisme dan korupsi di Indonesia.

Jika kita analisis tuturan (80) di atas, penutur (Mahfud M.D.) menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diperlukan untuk menghapus revisi atau pengurangan hukuman bagi narapidana kasus terorisme dan pelaku korupsi. Revisi tersebut untuk memudahkan penerapan aturan terkait kasus terorisme dan korupsi, sebut saja bahwa setiap terpidana kasus kejahatan itu berhak mendapat revisi, tetapi ada perkecualian bagi para koruptor, maka tuturan Mahfud M.D. itu tergolong tuturan yang santun.

Fungsi bahasa yang keempat adalah fungsi bahasa interaksional. Fungsi bahasa ini untuk menjaga hubungan agar komunikasi tetap dapat berjalan lancar. Fungsi ini terlaksana jika pengguna bahasa menguasai pengetahuan tentang slang, jargon, jenaka, cerita rakyat, kesantunan, dan unsur-unsur sosial lain dalam bahasa masyarakatnya. Perhatikan contoh di bawah ini!

(81) (P. XI. 5f) *Wah niki (ini) eco (enak), tetapi (nasinya) kirang (kurang)...”*
(Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.

(82) (P. XI. 5g) *Buat pengungsi (nasinya) kurang, tetapi kalau buat Presiden, ya sudah cukup.* (Ny. Ani Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)

Konteks tuturannya:

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.

Dalam contoh (81) dan (82) di atas, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono memperlihatkan kedekatannya dengan para pengungsi korban bencana erupsi merapi saat menyantap nasi bungkus. Penutur juga mengungkapkan lelucon yang menunjukkan interaksi dengan para pengungsi korban erupsi merapi. Penutur memilih kata-kata bermakna denotatif untuk mengungkapkan maksudnya. Berdasarkan penanda tersebut, tuturan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

Fungsi bahasa yang kelima adalah fungsi bahasa personal. Fungsi bahasa personal berfungsi untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Dalam mewujudkan fungsi bahasa personal, penutur sering menggunakan bentuk tuturan deklaratif. Bentuk tuturan deklaratif relatif lebih langsung dalam penyampaian perasaan penutur. Perhatikan contoh di bawah ini!

(83) (P. XI. 6c) *Rasanya sulit untuk menemukan cara membangun komitmen anggota DPR untuk lebih peduli kepada rakyat. Mereka seperti membiarkan korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia.* (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 06/11/2010, hal 4)

Konteks tuturannya:

Studi Banding ke luar negeri oleh anggota DPR merupakan persoalan pikir dan hati nurani mereka.

(84) (H. XII. 11g) *Saya bilang sama Akil, delapan hakim ini **tercemar**. Cuma satu yang bersih. Sisanya, delapan orang itu **setan** sehingga yang satu malaikat. Kan sama begitu kan? **Tidak bersih itu kan kotor.***

Kotor itu setan. Saya merasa sakit, terhina. (Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, 11/12/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Investigasi kasus suap MK.

Berdasarkan contoh di atas (83) dan (84), dapat dianalisis bahwa yang penutur (Sebastian Salang) merasa kecewa, marah terhadap perilaku mitra tutur. Pada tuturan (83), penutur merasa marah, kecewa dengan anggota DPR yang seakan-akan tidak peduli dengan keadaan bangsa yang dilanda bencana (Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi). Perasaan emosi, marah penutur juga tampak pada tuturan (84) karena kata-kata seperti *tercemar, setan, tidak bersih itu kan kotor, kotor itu setan, sakit, terhina* yang dituturkan Arsyad Sanusi adalah kata-kata kiasan (konotasi). Kata-kata tersebut dipilih penutur tentunya dengan pertimbangan bahwa kata-kata tersebut sungguh-sungguh mewakili apa yang dirasakan oleh penutur sendiri yakni marah. Dari segi sopan santun, tuturan (83) ini cenderung tidak santun dan tuturan (84) cenderung sangat tidak santun karena kata-kata yang dipilih sangat kasar dan melebih-lebihkan keadaan yang sesungguhnya. Tuturan-tuturan yang dinilai tidak (kurang) santun pada contoh (83) dan (84) di atas dapat diubah sehingga tuturan itu menjadi lebih santun namun, maksudnya tetap tersampaikan ke hadapan mitra tutur. Pengubahan itu dapat kita lakukan dengan beberapa kemungkinan, misalnya: kata-katanya yang terasa kasar diganti dengan kata lain yang lebih halus atau sopan (diksi), tuturan yang berbentuk deklaratif diubah menjadi tuturan berbentuk

pernyataan atau pun pertanyaan, dan lain-lain. Maka, tuturan (83) dan (84) dapat kita ubah dengan beberapa kemungkinan tuturan yang lebih santun sebagai berikut:

tuturan (83):

- (a) *Rasanya sulit untuk menemukan cara membangun komitmen anggota DPR untuk lebih peduli kepada rakyat. Mereka seperti membiarkan korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia.*
- (b) *Marilah anggota DPR bersama-sama dengan rakyat peduli membantu para korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi*

tuturan (84)

- (a) *Saya bilang sama Akil, delapan hakim ini tercemar. Cuma satu yang bersih. Sisanya, delapan orang itu setan sehingga yang satu malaikat. Kan sama begitu kan? Tidak bersih itu kan kotor. Kotor itu setan. Saya merasa sakit, terhina.*
- (b) *Saya kurang setuju dengan pernyataan bahwa ada delapan hakim yang diduga menerima suap terkait kasus Bupati Simalungun. Saya tidak mengenal beliau.*

Kedua contoh itu (83a, 83b, 84a, dan 84b) hanyalah beberapa kemungkinan saja dari upaya memperhalus tuturan (83) dan (84) yang ada di atas. Pada contoh (83a, 83b) dapat dilihat perubahan bentuk tuturan deklaratif menjadi tuturan imperatif ajakan dengan adanya penggantian kata-kata yang dianggap kasar dengan kata-kata yang lebih halus. Upaya penghalusan tuturan tersebut ditandai dengan kata-kata yang bermakna denotasi *marilah anggota DPR bersama-sama dengan rakyat peduli*. Perubahan bentuk tuturan tersebut meskipun tetap bermakna perintah atau suruhan seperti pada contoh (83a) di atas tentunya tidak lain bertujuan agar tuturan itu menjadi lebih halus atau santun. Pada contoh (84b) terlihat adanya perubahan

bentuk tuturan introgatif gabungan dengan tuturan deklaratif menjadi tuturan deklaratif sehingga maksud yang ingin disampaikan penutur tidak secara langsung disampaikan yang ditandai dengan kata *diduga*. Tuturan (84b) merupakan upaya penghalusan tuturan dengan menggantikan kata-kata yang terkesan kasar dengan kata-kata yang lebih halus dan sopan (diksi). Pada tuturan (83b) juga dapat dianalisis bahwa penutur itu tidak secara khusus menyebutkan subjek yang menjadi tujuan tuturan.

Fungsi bahasa ini juga menunjukkan ada beberapa tuturan yang dapat dipersepsikan sebagai tuturan santun.

Perhatikan contoh di bawah ini!

(85) (P. X. 12a) *Saya menaruh hormat kepada Pak Anis Matta dan Taufik Kurniawan karena mereka tidak pernah berkomentar masalah ini. Bahkan, Pak Anis yang membuka solusi bersama.* (Anggota Komisi III DPR T. Gayus Lumbuun, 12/10/2010, hal 4)

Konteks tuturannya

Pimpinan DPR siap berdialog dengan anggota Komisi III DPR yang memprotes pertemuan pimpinan DPR dengan calon Kepala Kepolisian

Berdasarkan tuturan (85), penutur (Gayus Lumbuun) memuji tindakan atau kebijakan yang dilakukan mitra tutur (Pak Anis Matta dan Taufik Kurniawan) terkait anggota Komisi III DPR yang memprotes pertemuan pimpinan DPR dengan calon Kepala Kepolisian Negara RI, Komisariss Jenderal Timur Pradopo. Penutur menggunakan bentuk tuturan deklaratif dan menggunakan kata-kata bermakna denotasi.

Fungsi bahasa keenam adalah fungsi bahasa heuristik. Fungsi bahasa ini yang dipergunakan untuk ilmu pengetahuan. Cara yang biasa digunakan penutur dalam mewujudkan fungsi bahasa heuristik ini adalah dengan menggunakan bentuk tuturan interogatif.

Perhatikan contoh di bawah ini!

(86) (H. X. 8h) *KPK jangan hanya menangani perkara kecil. Bagaimana perkembangan kasus Bank Century?* (Ahmad Kurdi dari F-PPP, 08/10/2010, hal 3)

Konteks tuturannya:

Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kasus Bank Century dalam rapat DPR-KPK.

Berdasarkan contoh di atas (86), penutur memilih satu bentuk tuturan. Tuturan yang dipilih penutur adalah tuturan tidak langsung (yakni tuturan interogatif) untuk mewujudkan fungsi bahasa heuristik. Tuturan tidak langsung yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam tuturannya penutur tidak secara eksplisit atau terang-terangan menyampaikan apa yang dia maksudkan. Penutur mengkritik KPK yang dinilai lambat menangani perkara yang menyangkut penguasa dalam kasus Bank Century. Penutur menggunakan tuturan tidak langsung untuk mempertanyakan penanganan perkara Bank Century, namun sebenarnya penutur mengkritik dan merasa kecewa dengan kinerja KPK yang dinilai lambat menangani kasus tersebut. Tuturan tidak langsung penutur dapat dipersepsikan sebagai tuturan yang santun oleh pendengar atau mitra tutur.

Dari berbagai uraian di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap fungsi bahasa (yang terwujud dalam tuturan) yang dituturkan manusia mengandung maksud tertentu. Demi tujuan tetap terjaganya hubungan yang harmonis antara pembicara atau penutur dengan mitra tutur, tuturan-tuturan yang muncul dalam fungsi bahasa itu kemudian diwujudkan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut berwujud penanda kesantunan, di antaranya berwujud: pemakaian atau pemilihan kata-kata yang maknanya lebih halus, sopan, dan netral; pemakaian gaya bahasa tertentu yang mengakibatkan proses penyampaian maksud itu terkesan tidak langsung; tidak disebutkannya subjek yang menjadi tujuan tuturan apabila isi tuturannya adalah hal yang negatif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di atas sudah diuraikan secara lengkap jenis-jenis fungsi bahasa yang terdapat dalam tuturan di surat kabar dan penanda tingkat kesantunannya. Dari berbagai uraian itu, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan.

- a. Ada enam jenis fungsi bahasa yang muncul di surat kabar. Keenam jenis fungsi bahasa itu adalah fungsi instrumental, representasional, regulatori, personal, interaksional dan heuristik. Dalam suatu tuturan yang diucapkan penutur ada bagian tertentu dari tuturan itu baik yang berwujud kata, frasa, klausa, atau pun kalimat yang memungkinkan pendengar atau mitra tutur memberikan penilaiannya (berpersepsi) terhadap tuturan tersebut dari sisi sopan santunnya. Inilah yang dalam tulisan ini disebut sebagai penanda tingkat kesantunan. Ada sembilan jenis penanda tingkat kesantunan tuturan yang ditemukan, yakni: 1) analogi, 2) diksi atau pilihan kata, 3) gaya bahasa, 4) penggunaan keterangan atau kata modalitas, 5) keterangan sebab, 6) keterangan akibat, 7) keterangan tujuan, 8) penyebutan subjek yang menjadi tujuan tuturan, dan 9) bentuk tuturan. Di dalam suatu tuturan, tidak hanya digunakan satu jenis penanda kesantunan, ada juga di dalam satu tuturan terkandung lebih dari satu penanda kesantunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diuraikan di dalam tulisan ini, peneliti mengharapkan dapat mendorong minat peneliti lain untuk melakukan penelitian berdasarkan tinjauan sosiopragmatik, dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

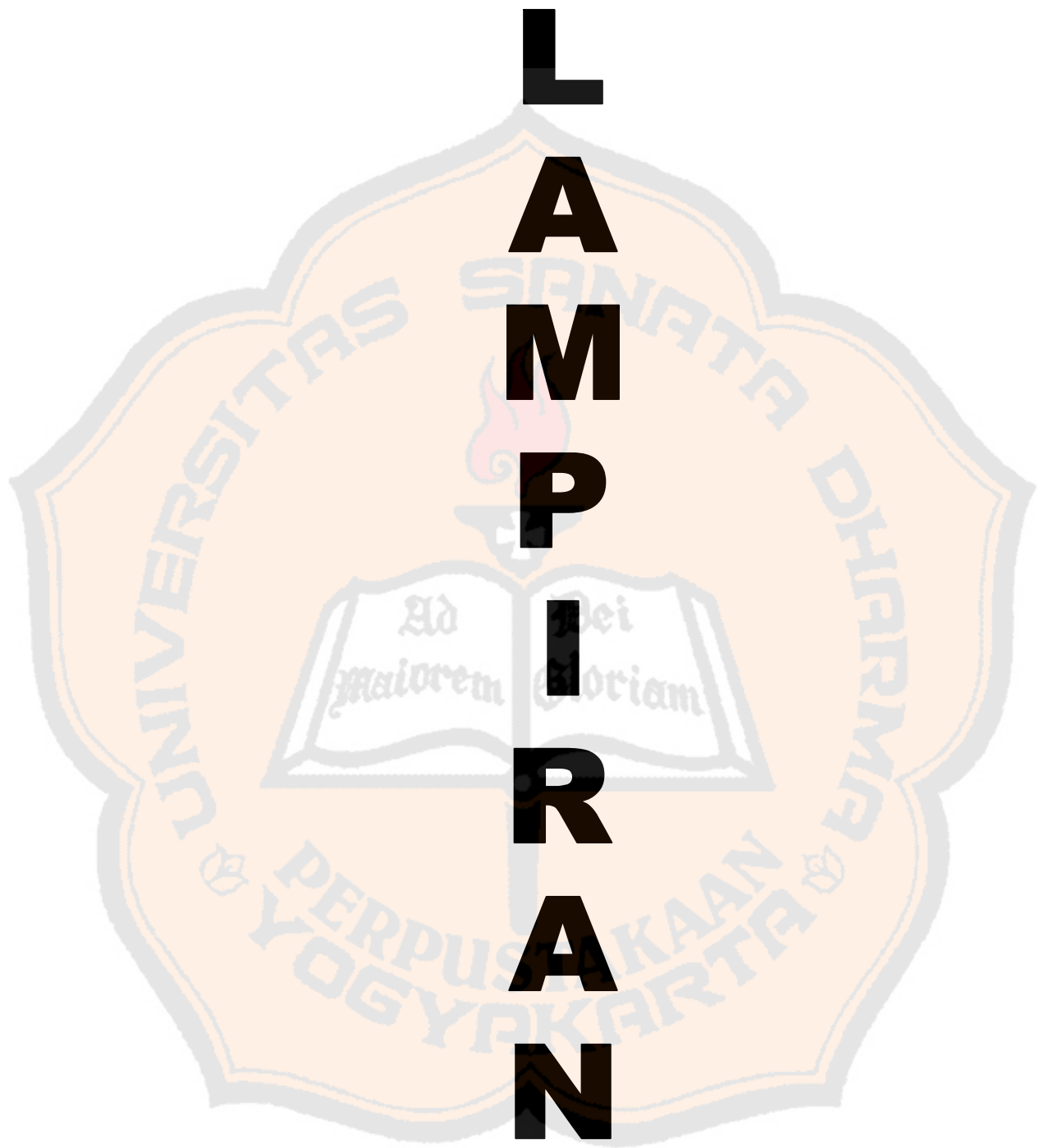


Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baryadi, Praptomo. 2005. "Teori Sopan Santun Berbahasa" dalam Pranowo, dkk. (Eds.). *Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Gunarwan, Asim. 1994. "Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik" dalam Purwo, Bambang Kaswanti. *PELLBA 7*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2005. "Beberapa Prinsip dalam Komunikasi Verbal: Tinjauan Sosiolinguistik dan Pragmatik" dalam Pranowo, dkk. (Eds.). *Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- _____. 2007. "Implikatur dan Kesantunan Berbahasa: Beberapa Tilikan dari Sandiwara Ludruk" dalam Nasanius, Yassir. *PELLBA 18*. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya.
- Handayani, Wiwik Retno. 2008. Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa. Makalah disajikan dalam *Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia XVI*, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Cabang DIY bekerja sama dengan Pusat Bahasa, Depdiknas, Balai Bahasa Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 16-18 Mei 2008.
- Keraf, Gorys. 1984. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kushartanti. 2005. "Pragmatik" dalam Kushartanti, dkk. (Penyunt.). *Pesona Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Oka (Penerj.). 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Pranowo. 1996. *Analisis Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____.2009. *Kesantunan Berbahasa Tokoh Masyarakat (Ditinjau dari Aspek Pragmatik)*. Pengukuhan Guru Besar PBSI. FKIP-PBSID. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- _____.2009. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardi, Kunjana. 2003. *Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Malang: DIOMA.
- _____. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Yogya: Erlangga.
- Sarwoyo, Ventianus. 2008. *Tindak Ilokusi Dan Penanda Tingkat Kesantunantuturan Di Dalam Surat Kabar (Suatu Tinjauan Sosiopragmatik)*. Skripsi S-1. FKIP-PBSID. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Soedjito. 1988. *Kosa Kata Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soewandi, Slamet. 2007. “*Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*”. Modul Mata kuliah Penelitian Pengajaran Bahasa dan Sastra. Yogyakarta: PBSID, FKIP, USD.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 2004. *Filsafat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**Table Analisi Data
KOMPAS
Oktober 2010**

| No. | Kode | Tuturan | Fungsi Bahasa | Penanda Kesantunan |
|-----|-----------------|--|----------------------------|---|
| 1 | P. X. 1a | <p>Ironi karena kinerja DPR setahun terakhir justru mengecewakan rakyat. (Koordinator Formappi Sebastian Salang, 01/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Genap setahun menjabat, DPR periode 2009-2014 dinilai memiliki kinerja sangat buruk.</p> | personal (kekecewaan) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 2 | P. X. 1b | <p>Perbaiki tak bisa satu per satu, tetapi harus menyeluruh. Karena itu, kami usulkan untuk reformasi total. (Wakil Ketua DPR Anis Hatta, 01/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Wakil Ketua DPR Anis Matta berdalih rendahnya produktivitas legislasi bukan hanya kesalahan DPR.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak bisa dan harus.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena itu.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |
| 3 | P. X. 1c | <p>DPR jangan mau difait accompli dengan satu calon yang diajukan Presiden. Dengan hanya satu nama calon yang diajukan, DPR menjadi tukang stempel atas calon yang diajukan Presiden. (Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, 01/10/2010, hal 3)</p> | instrumental (menuntut) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata bermakna denotatif.</p> <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan kata tukang stempel. <i>Tukang stempel</i> adalah orang yang pekejaannya membuat</p> |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| | | <p>Konteks Sebastian Salang menganjurkan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, DPR sebaiknya menolak jika Presiden hanya mengajukan satu nama calon.</p> | | <p>cap (dalam hal ini rakyat dapat memberikan masukan kepada DPR untuk menilai kinerja dan rekam jejak calon Kepala Polri, mengingat DPR adalah lembaga aspirasi rakyat, bukan lembaga yang langsung menyetujui perintah pemerintah tanpa mendengar aspirasi rakyat).</p> |
| 4 | P. X. 1d | <p>Praktik politik malu-malu kucing sudah bukan zamannya lagi. Ini bagus empat tahun sebelum pemilu sudah kampanye. (Ikrar Nusa Bakti, Peneliti LIPI, 01/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Integritas Sri Mulyani yang membela kepentingan publik dari rongrongan politik korupsi menginspirasi situs www.srimulyani.net .</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> | <p>Penggunaan tuturan tidak langsung.</p> <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan kata malu-malu kucing yang artinya modal politik yang tinggi kadang akan hilang karena kasus politik.</p> |
| 5 | P. X. 1e | <p>Siapa pun yang menjadi menteri keuangan pasti akan dibandingkan dengan Sri Mulyani. (Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, 01/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Integritas Sri Mulyani memberikan standar minimal bagi posisi menteri keuangan.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Sri Mulyani.</p> <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan sebutan Sri Mulyani yang diartikan orang yang membela publik dari politik koruptif kekuasaan.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata pasti.</p> |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|--|
| 6 | P. X. 1f | Ada yang menilai otonomi khusus belum berhasil, belum menyentuh masyarakat . Tetapi, tidak semua program gagal. Ada juga pembangunan yang berhasil. Memang belum memenuhi sepenuhnya harapan pemerintah pusat dan daerah. (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, 01/10/2010, hal 4) Konteks Otonomi khusus belum berhasil. | representasional (melaporkan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif belum menyentuh yang artinya belum membantu peningkatan kesejahteraan rakyat. Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata belum dan tidak . |
| 7 | H. X. 2a | Perubahan UU harus dilakukan. Dalam UU disebutkan setiap orang berhak mendapatkan remisi. Jika tidak demikian, lalu disebut saja setiap orang berhak mendapatkan remisi kecuali teroris dan koruptor. (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 02/10/2010, hal 2) Konteks Revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran dinilai akan memudahkan penerapan aturan dalam kasus terorisme dan korupsi di Indonesia. | regulatori instrumental (menyarankan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata harus dan tidak . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika . |
| 8 | P. X. 2a | Kalau kewenangannya belum seperti senat , jangan dulu bangun gedung. (Mantan Ketua DPD Ginandjar Kartasmita, 02/10/2010, hal 2) Konteks DPD diminta menunda rencana pembangunan kantor perwakilan di daerah. | instrumental (memerintah) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau . Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti senat . |
| 9 | P. X. 2b | Memang betul saya adik kandung ibu Ani Yudhoyono . Sebelum SBY jadi presiden, saya sudah jadi adik ipar. Tidak ada aturan yang melarang | representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Ani Yudhoyono dan SBY . |

| | | | | |
|----|----------|---|---|---|
| | | <p>ataupun saya langgar dalam promosi pangkat dan jabatan. Apakah itu dilarang karena ada hubungan keluarga? (Pramono Edhie, 02/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Promosi TNI yang diterima Pramono Edhi bukanlah bentuk nepotisme.</p> | heuristik | <p>Diksi ditandai dengan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak ada.</p> |
| 10 | H. X. 2b | <p>Yang saya dengar dia tidak mau makan uang haram yang halal saja tidak berkeringat dia tidak mau. Misalnya, ia jadi panitia kegiatan, sudah ada SK-nya. Tetapi, kalau tidak ikut bekerja, dia juga tidak mau menerima honor. Jarang, loh, yang seperti itu. (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 02/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Sejumlah tokoh mendukung Sri Mulyani untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> <p>personal (memuji)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak mau, tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan kata makan uang haram yang diartikan uang hasil korupsi.</p> |
| 11 | H. X. 2c | <p>Saya tak wangun (pantas) jadi Presiden atau Wakil Presiden. Enggak ada potongan. Saya juga tidak ingin. (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 02/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Sejumlah tokoh mendukung Sri Mulyani untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak, tidak, enggak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif potongan yang artinya figur.</p> <p>Tuturan tidak langsung</p> |
| 12 | P. X. 2c | <p>Bantahan Gamawan dan keterlambatan Kejagung mengumumkan status tersangka pejabat Kemdagri ini menimbulkan tanda tanya. Kejagung juga baru umumkan setelah ditanya wartawan. Kami curiga kasus ini akan</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Gamawan.</p> <p>Diksi ditandai dengan</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|
| | | <p>dihentikan secara diam-diam. (Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sumaryanto, 02/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Mendagri tidak bisa mengingkari fakta ada anggota staf jajarannya yang menjadi tersangka kasus korupsi</p> | | <p>penggunaan kata konotatif tanda tanya yang artinya pertanyaan.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 13 | H. X. 2d | <p>Presiden SBY sangat relevan didengar keterangannya karena beliau hadir dalam rapat-rapat pada masa kabinet Presiden Gus Dur. SBY mengetahui proses Sisminbakum. (Yusril Ihza Mahendra, 02/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Yusril Ihza Mahendra mengajukan saksi-saksi meringankan terkait kasus Sisminbakum</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Presiden SBY dan Presiden Gus Dur.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif</p> |
| 14 | H. X. 2e | <p>Surat telegram Nomor 1555 itu bukan berarti ibu-ibu warakawuri yang tidak punya rumah akan diusir. Saya pun anak tentara. Saya akan kuat kalau sampai mengusir warakawuri dari rumah dinas. (Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toisutta, 02/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks KSAD menjamin tidak ada pengusuran purnawirawan dan warakawuri yang menghuni rumah dinas TNI.</p> | <p>regulatori</p> <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 15 | H. X. 4a | <p>(Kebijakan) itu masih dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya pegangan yang kuat untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan TNI ikut menjaga keselamatan bangsa dan negara. (Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, 04/10/2010, hal 4)</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat harapan yang ditandai dengan kata mudah-mudahan.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|
| | | Konteks Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan TNI untuk menangani teror dan kerusuhan. | | |
| 16 | P. X. 4a | Jika teror masih sebatas kejahatan luar biasa atau <i>extra ordinary crime</i> , itu masih jadi domain polisi. Tetapi, jika teror itu sudah sampai menyerang polisi dan menjadi peperangan bersenjata, itu domain TNI. TNI tidak boleh diam. (Mantan Asisten Kepala Sosial Politik TNI Mayor Jenderal (Purn) Suwarno Adiwijoyo, 04/10/2010, hal 4) Konteks Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan TNI untuk menangani teror dan kerusuhan. | instrumental (memerintah) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 17 | P. X. 5a | Yang jelas, jika dibandingkan dengan Mei-Juni lalu, yang Juli-Agustus lalu 50 persen lebih diantaranya lebih bagus dari sebelumnya. Kalau sebelumnya merah , sekarang tidak . Memang, masih ada yang merah . Tapi saya tidak boleh menyebut. (Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, 05/10/2010, hal 3) Konteks Kinerja menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai lebih baik dibanding periode sebelumnya. | representasional (melaporkan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika, kalau . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak, tidak boleh . Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif merah yang artinya kinerja yang kurang baik. |
| 18 | P. X. 5b | Saya juga lihat Menko Polhukam terus bekerja dengan gigih untuk itu. Teruskan keterpaduan upayanya, sinkronisasi, koordinasi yang sifatnya horizontal.(Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono,05/10/2010, hal4) | representasional (mengetahui) instrumental (memerintah) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Menko Polhukam . Diksi ditandai dengan |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|
| | | <p>Konteks Dengan bantuan TNI dan intelijen, kepolisian diharapkan dapat melanjutkan upaya penanganan terorisme secara tepat.</p> | | <p>penggunaan kata konotatif horizontal yang artinya semua pihak harus bekerja sama dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |
| 19 | P. X. 5c | <p>Pemilu akan kacau karena tidak akan bisa lepas dari tarik-menarik kepentingan parpol. (Peneliti IPC, Erik Kurniawan, 05/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Keterlambatan pembentukan KPU berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu 2014.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif tarik-menarik kepentingan parpol.</p> |
| 20 | P. X. 6a | <p>Perlu meningkatkan kualitas anggota Dewan agar tahu apa yang dimaksud aspirasi dan kepentingan rakyat. Anggota dewan seharusnya menampung aspirasi, membuat legislasi, dan mengawasi. (Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris, 06/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Anggota DPR dinilai tidak mengetahui tugas pokok legislatif dalam membuat undang-undang.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut anggota Dewan.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata agar.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|
| 21 | P. X. 6b | <p>Yang menjadi selama ini adalah demokrasi biaya tinggi. Ada kleptokrasi dan bagaimana mencuri dengan aman. (Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno, 06/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Anggota DPR dinilai tidak mengetahui tugas pokok legislatif dalam membuat undang-undang.</p> | personal (mengkritik) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif demokrasi biaya tinggi.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 22 | P. X. 6c | <p>Minta uang mudik, proposal proyek, hingga bantuan berobat. Kalau tidak diberi, kata-kata yang disampaikan makin pedas. Anggota Dewan kalau ke daerah pemilihan seperti dianggap sinterklas. (Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Ida Fauziah, 06/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Sikap masyarakat yang gemar meminta materi tidak terlepas dari perilaku politik uang yang dilakukan elite politik dalam pemilihan umum.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti dianggap sinterklas. Sinterklas adalah tokoh Natal yang suka memberi hadiah kepada anak-anak.</p> |
| 23 | P. X. 7a | <p>Sekarang sudah mulai beredar isu ada gerakan anggota DPRD akan memasang tarif Rp 1,25 miliar sampai Rp 1,5 miliar per anggota. Kalau yang dibutuhkan 30 Suara, uangnya bisa sampai Rp 45 miliar. (Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD, Farouk Muhammad, 07/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Farouk Muhammad tidak sependapat dengan wacana pemilihan gubernur</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|
| | | oleh DPRD karena dinilai sarat praktik politik uang. | | |
| 24 | P. X. 7b | <p>Menteri mengurus kebijakan. Jika semua urusan teknis (diurus), ngapain ada pejabat eselon satu? Urusan teknis itu urusan direktorat. (Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, 07/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Bachtiar Chamsyah menuding keterlibatan Amrun Daulay terkait kasus penggelembungan proyek pengadaan sapi impor untuk kalangan miskin.</p> | <p>heuristik</p> <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Menteri.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung</p> |
| 25 | P. X. 7c | <p>Ya, lihat saja wajah saya makin cerah. Jika tak bersalah, tidak makan uang, kalau kebijakan salah, itulah risiko menteri. Kalau dari sisi saya sebagai menteri hanya urus kebijakan. (Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, 07/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Bachtiar Chamsyah menuding keterlibatan Amrun Daulay terkait kasus penggelembungan proyek pengadaan sapi impor untuk kalangan miskin.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika, kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif tidak makan uang yang artinya tidak korupsi.</p> |
| 26 | P. X. 8a | <p>Tiba-tiba ada pemberitahuan di media, dikatakan biaya pakaian Presiden itu mencapai Rp 893 juta per tahun. Satu rupiah pun tidak ada biaya untuk dipakai saya. Sejak pertama menjadi Presiden RI tahun 2004, tidak pernah ada selebar pakaian pun menggunakan uang negara. Jelas, faktanya ada. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal2)</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> <p>personal (kecewa)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa litotes yang ditandai dengan ungkapan satu rupiah pun tidak ada dan tidak pernah ada selebar pakaian pun yang artinya tidak menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|
| | | Konteks Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. | | Penggunaan bentuk tuturan langsung |
| 27 | P. X. 8b | Ada juga yang lebih mencengangkan ditulis, biaya furnitur untuk perabotan Presiden sebanyak Rp 42 miliar. Saya cek kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan . Ada apa? Ternyata, ada pemeliharaan perabotan dan penggantian yang rusak. Akan tetapi, bukan untuk rumah saya, melainkan untuk kantor-kantor di lingkungan ini (Istana Kepresidenan), yang jumlahnya tahun kemarin sebanyak Rp 149 juta dan bukan Rp 42 miliar. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 2) Konteks Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. | representasional (melaporkan) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Presiden, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Penggunaan tuturan tidak langsung. Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata bukan . Penggunaan tuturan tidak langsung |
| 28 | P. X. 8c | Ketika Yusril Ihza Mahendra masih menjabat Mensesneg, namanya diubah menjadi Rumah Tangga Kepresidenan. Namun, sebenarnya Sekretariat Presiden, kantor ini, lembaga ini. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 2) Konteks Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. | representasional (mengingatkan) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Yusril Ihza Mahendra . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 29 | H. X. 8a | Tentang pendanaan akan masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional, yang akan | regulatori representasional (mempertimbang) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |

| | | | | |
|----|-----------------|--|-----------------------------------|--|
| | | dibahas tim teknis. (Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, 08/10/2010,hal 2) | kan kepastian) | |
| 30 | H. X. 8b | Tujuannya, industri pertahanan harus dapat menciptakan pergerakan dalam ekonomi nasional . (Wakil Menhan Sjafrei Sjamsoeddin, 08/10/2010, hal 2) Konteks Komite Kebijakan Industri Pertahanan membentuk strategi besar industri pertahanan yang seharusnya bisa menggerakkan ekonomi nasional. | instrumental (menuntut) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif ekonomi nasional . |
| 31 | H. X. 8c | Kalau mau membangun pertahanan maritim, tambah armada laut dan udaranya, bukan menambah personel. (Pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, 08/10/2010, hal 2) Konteks Pembangunan Maritim kian terpuruk. | representasional mengidentifikasi | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau . Penggunaan tuturan langsung. |
| 32 | H. X. 8d | KPK jangan hanya menangani perkara kecil. Bagaimana perkembangan kasus Bank Century? (Ahmad Kurdi dari F-PPP, 08/10/2010, hal 3) Konteks Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kasus Bank Century dalam rapat DPR-KPK. | heuristik personal (kecewa) | Penggunaan tuturan tidak langsung Penyebutan subyek langsung KPK |
| 33 | H. X. 8e | Saya dengar itu terkait kasus Bank Century. Apakah hasilnya? Apakah KPK serius mengungkap kasus ini? Atau KPK hanya menangani kasus mantan menteri seperti terkait sarung dan sapi yang angkanya kecil ? (Topane Gayus Lumbuun dari F-PDIP, 08/10/2010, hal 3) Konteks Anggota Komisi III DPR | heuristik | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut KPK . Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti terkait sarung dan sapi yang angkanya |

| | | | | |
|----|-----------------|--|-----------------------------------|---|
| | | mempertanyakan kasus Bank Century dalam rapat DPR-KPK. | | kecil. |
| 34 | P. X. 8d | <p>Hari-hari terakhir ini ada semacam pergerakan di Den Haag yang mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia, bahkan meminta pengadilan menangkap Presiden RI saat berkunjung ke Belanda. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudoyono mendadak menunda kunjungan kenegaraannya ke Belanda terkait info <i>Kort Geding</i>.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan hari-hari terakhir ini ada semacam pergerakan di Den Haag Haag yang artinya ada rencana kelompok Republik Maluku Selatan yang menggugat pemerintahan Indonesia dengan tuduhan pelanggaran HAM.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata bermakna denotatif.</p> |
| 35 | P. X. 8e | <p>Meskipun ada saran Presiden tetap meneruskan kunjungan, situasi ini benar-benar sulit bisa dipahami. Kondisi ini juga tidak mengenakan Presiden, yang jika berkunjung saat itu pengadilannya tengah berlangsung. (Jubir Presiden RI Julian Aldrin, 08/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudoyono mendadak menunda kunjungan kenegaraannya ke Belanda terkait info <i>Kort Geding</i>.</p> | representasional (melaporkan) | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> |
| 36 | H. X. 8f | <p>Adalah tidak adil jika dua orang itu belum kena PAW. Ini membuat mereka, diduga, tetap menerima gaji dan fasilitas sebagai anggota DPR, padahal sudah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif karena ada di penjara. (Anggota</p> | personal (kecewa) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|
| | | <p>Koalisi Fahmi Badoh, 08/10/2010,hal 4)</p> <p>Konteks Koalisi Penegak Citra DPR mendesak BK DPR untuk menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan tindak korupsi.</p> | | <p>kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan tuturan tidak langsung.</p> <p>Penggunaan diksi</p> |
| 37 | P. X. 8f | <p>Padahal, saya memilih Jasin saat pemilihan Ketua KPK dibandingkan Waluyo.(Komisi III DPR, Panda Nababan, 08/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Panda Nababan menuding M. Yasin memiliki sentimen pribadi terkait penanganan perkara suap cek perjalanan yang melibatkan dirinya.</p> | representasional (melaporkan) | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Jasin.</p> <p>Penggunaan tuturan langsung</p> |
| 38 | P. X. 8g | <p>Hanya dengan mengambil posisi seperti ini, Golkar akan tampil ke depan dalam setiap momentum penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara riil, terutama kehidupan politik. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 08/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Partai Golkar memosisikan sebagai partai tengah dan moderat.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti ini, Golkar akan tampil ke depan dalam setiap momentum penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang artinya Partai Golkar terus memosisikan dirinya sebagai partai tengah dan moderat.</p> |
| 39 | P. X. 8h | <p>Golkar ingin menjadi partai politik yang selalu paralel dengan aspirasi rakyat. Golkar tidak akan malu-malu mendukung pemerintah. Namun, jika pemerintah menjauhi suara rakyat,</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif selalu paralel yang artinya Partai Golkar tidak hanya</p> |

| | | | | |
|----|-----------|--|---|--|
| | | <p>Partai Golkar juga tidak akan segan-segan mengkritik pemerintah. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 08/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Partai Golkar memposisikan sebagai partai tengah dan moderat.</p> | | <p>membuka diri terhadap elemen masyarakat majemuk, namun bagi semua elemen masyarakat.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung</p> |
| 40 | H. X. 12a | <p>Presiden tidak boleh masuk ke wilayah hukum. (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, 12/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Pemerintah tidak dapat mengintervensi proses hukum perkara Bibit-Chandra.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 41 | H. X. 12b | <p>Analisis kami, dua kejadian besar dalam kasus ini, mafia pajak dan mafia peradilan, belum tuntas. (Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, 12/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Kasus Gayus Tambunan belum terungkap tuntas.</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan mafia pajak dan mafia peradilan yang artinya penjahat pajak dan penjahat hukum.</p> |
| 42 | H. X. 12c | <p>Kalau menurut penilaian Satgas belum tuntas, tuntaskanlah. (Hakim Albertina, 12/10/2010, hal 2)</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| | | Konteks Kasus Gayus Tambunan belum terungkap tuntas. | | kalau. Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 43 | H. X. 12d | Yang penting, ke depan pimpinan DPR sebagai juru bicara parlemen dapat bertindak dan bersikap sesuai asas kepatutan dan kelaziman. (Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, 12/10/2010, hal 4) Konteks Pimpinan DPR siap berdialog dengan anggota Komisi III DPR yang memprotes pertemuan pimpinan DPR dengan calon Kepala Kepolisian Negara RI Timur Pradopo. | instrumental (menyarankan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 44 | H. X. 12e | Selama ini saya sudah melakukan yang terbaik dan bekerja keras. (Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, 12/10/2010, hal 5) Konteks Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menganggap ada kekeliruan penilaian terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. | representasional (melaporkan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 45 | P. X. 12a | Kalau pakaian dinasnya digunakan untuk menteri, mengapa nomenklaturnya pakaian dinas presiden? Lalu anggaran pidato presiden, itu membuat kami bertanya masak pidato dibayar? (Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo, 12/10/2010, hal 5) Konteks Komisi II DPR mempertanyakan anggaran kebutuhan dan kegiatan presiden yang dialokasikan dalam APBN. | representasional (memikirkan sesuatu) heuristik | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau. Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk. Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung. |
| 46 | P. X. 12b | Mengapa anggaran pencetakan naskah tidak disebut langsung? Kemudian | representasional (memikirkan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat |

| | | | | |
|----|------------------|--|--|---|
| | | <p>anggaran pelatihan penyusunan naskah pidato, kenapa tidak masuk ke anggaran diklat saja? (Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo, 12/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Komisi II DPR mempertanyakan anggaran kebutuhan dan kegiatan presiden yang dialokasikan dalam APBN.</p> | <p>sesuatu)</p> <p>heuristik</p> | <p>kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 47 | H. X. 13a | <p>Dari hasil pembicaraan, kami menomorsatukan perkara Bibit-Chandra harus berjalan sesuai proses hukum. Kita harus selamatkan negara hukum. (Anies Baswedan, 13/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Kejaksaan Agung harus segera sikapi kasus Bibit- Chandra.</p> | <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 48 | P. X. 13a | <p>Jadi, kalau ada yang punya niat sekarang ini akan menggantikan Presiden Yudhoyono, ya keliru sebab nanti pada pemilu tahun 2014 yang akan memilih presiden. Siapa pun boleh menggantikan dengan bertarung secara demokratis. (Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, 13/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Hatta Rajasa mengangkat isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata sebab.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan bertarung secara demokratis yang artinya semua elemen masyarakat harus menyampaikan aspirasinya terkait pemerintahan SBY dengan cara-cara yang bijaksana mengingat pemerintahannya yang masih empat tahun lagi.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|---|
| 49 | H. X. 13b | <p>Saat menyampaikan aspirasi, tetaplah menjadi contoh. Aspirasi apapun di dalam demokrasi ini dibenarkan dan dilayakkan serta sering menjadi bagian dari solusi. Asalkan hal itu sepanjang dengan koridor konstitusi dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku serta aturan main dan etika. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 13/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak keluarga besar Pepabri memberikan contoh yang baik dalam menyampaikan aspirasi.</p> | instrumental (menyarankan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 50 | H. X. 13c | <p>Bagaimana Polri akan menghargai HAM jika pimpinan Polri dinilai atau diduga tidak menjalani penegakan HAM. (Nur Kholis, 13/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Agenda penegakan HAM di kalangan Polri sangat penting.</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 51 | P. X. 13b | <p>Jangan anggap <i>reshuffle</i> momok. Itu biasa dalam politik, tak perlu berlebihan. Tidak ada kaitannya dengan stabilitas. (Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, 13/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Perombakan kabinet merupakan hal biasa.</p> | representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu) | <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan kata momok.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 52 | P. X. 14a | <p>Seharusnya pemerintah tidak perlu over-reaktif terhadap perkembangan sosial yang ada. Isu penggulingan dari Menko Perekonomian itu seperti orang mimpi di siang bolong. (Wakil Ketua</p> | instrumental (menyarankan) personal (mengkritik) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya . |

| | | | | |
|----|------------------|---|-----------------------|--|
| | | DPR Pramono Anung, 14/10/2010, hal 4) Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak risau dengan informasi adanya gerakan yang akan menggulingkannya pada usia setahun pemerintahannya. | | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti orang mimpi di siang bolong . |
| 53 | P. X. 15a | Semua sudah selesai sebelum uji kelayakan dan kepatutan. Saya jamin, Pak Timur pasti menjadi Kepala Polri. Kalau Setgab (Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sudah sepakat, apa yang dapat kami lakukan kecuali menerimanya? (Anonim (Anggota Komisi III), 15/10/2010, hal 3) Konteks Komisaris Jenderal Timur Pradopo merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden untuk menduduki jabatan Kepala Polri. | personal (mengeluh) | Penyebutan subjek langsung Pak Timur . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata pasti . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung. |
| 54 | P. X. 15b | Ini menunjukkan, akhirnya Presiden Yudhoyono bisa menyelesaikan semuanya dan DPR terlihat tidak lebih seperti stempel . (Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 15/10/2010, hal 3) Konteks Komisaris Jenderal Timur Pradopo merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden untuk menduduki jabatan Kepala Polri. | personal (mengkritik) | Penyebutan subjek langsung Presiden Yudhoyono . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti stempel . |

| | | | | |
|----|------------------|--|--------------------------------------|---|
| 55 | P. X. 15c | <p>Kinerja pertahanan tidak usah hanya dilihat tahun ini. Sejak lima tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kemhan sudah bisa meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan TNI, kebijakan pertahanan, dan industri pertahanan. (Wakil Menteri Pertahanan Sjarie Sjamsoeddin, 15/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Kementerian Pertahanan telah memenuhi target sejak program 100 hari.</p> | representasional (melaporkan) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 56 | P. X. 16a | <p>Dengan sosialisasi sejak dini, masyarakat akan lebih tahu karakter dan kapasitas setiap calon. Dengan demikian, masyarakat tidak akan membeli kucing dalam karung. (Pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, 16/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Partai Golkar siap menyosialisasikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan membeli kucing dalam karung yang artinya tokoh yang akan maju sebagai bakal presiden pada Pemilu 2014 harus diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah memilih calon Presiden dalam Pemilu 2014.</p> |
| 57 | P. X. 16b | <p>Belum ada gebrakan pemikiran atau prestasi yang dibuat Aburizal yang melekat di masyarakat. Masyarakat masih lebih banyak melihatnya hanya penguasa yang punya modal kuat. (Pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, 16/10/2010, hal 2)</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|---|
| | | Konteks Popularitas Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden 2014 masih kalah dari calon lain. | | |
| 58 | P. X. 16c | Siapa pun yang punya bukti akan saya biyai naik pesawat terbang ke Jakarta untuk menyampaikan laporan kepada saya. Siapa yang menyerahkan (uang) dan siapa yang menerima. Kalaupun harus menginap di Jakarta, saya akan biyai hotelnya asalkan ada nama jelas yang bisa dilaporkan. (Ketua MK Mahfud MD, 16/10/2010, hal 3) Konteks Mahkamah Konstitusi dilanda desas-desus dugaan praktik politik uang untuk kepentingan memenangkan perkara. | instrumental (menantang) | Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalaupun . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif . |
| 59 | P. X. 16d | Harapan saya , tentu aksi itu akan jadi penanganan Polri yang baik pada akhir masa jabatan saya. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,16/10/2010, hal4) Konteks Kapolri berharap aksi unjuk rasa pada 20 Oktober mendatang berlangsung damai dan tanpa anarki. | instrumental (menyarankan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat harapanl yang ditandai dengan kata harapan saya . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif . |
| 60 | P. X. 18a | Partai Demokrat berpandangan, jika ada pikiran, gagasan,dan gerakan yang ingin mengganti atau menggulingkan pemerintah yang sah di tengah jalan , maka bukan saja membelakangi aspirasi rakyat yang tercermin dari hasil pemilihan umum, melainkan juga nyata-nyata pelanggaran terhadap konstitusi. (Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 18/10/2010, hal 2) Konteks Pidato Anas Urbaningrum pada acara peringatan ulang tahun ke-9 Partai Demokrat terkait usaha penggulingan pemerintahan SBY. | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika . Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan menggulingkan pemerintah yang sah di tengah jalan yang artinya mengganti pemerintahan yang sah. |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|--|
| 61 | H. X. 18a | <p>Kita hadapi intelijen yang friksional, yang tengah mengalami transisi. Kegagapan intelijen sangat tampak dalam kasus Munir. Kalau intelijen solid, kasus Munir tidak akan terkuak. (Pengamat Pertahanan dari UI Andi Widjajanto, 18/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Intelijen Indonesia dinilai masih mencari bentuk jati dirinya.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif .</p> |
| 62 | H. X. 18b | <p>Bagi demokrasi Indonesia, itu kabar baik. Bagi intelijen, itu kabar buruk. Sejak tahun 1998, intelijen pun mencari bentuk. (Pengamat Pertahanan dari UI Andi Widjajanto, 18/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Intelijen Indonesia dinilai masih mencari bentuk jati dirinya.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif bentuk.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 63 | P. X. 18b | <p>Kalau wilayah taktis, kita harus lebih rileks sedikit, pandai membaca arah angin, mendesak jika diperlukan, merangkul dan memberikan ruang gerak jika memang kondisinya menghendaki. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 18/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pidato Aburizal Bakrie saat membuka Rapat Pimpinan Nasional I Partai Golkar terkait eksistensi Partai Golkar dalam koalisi partai pendukung pemerintahan.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau, jika.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotasi rileks yang artinya bersenang-senang.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan pandai membaca arah angin yang artinya dapat menentukan strategi.</p> |
| 64 | P. X. 18c | <p>Apabila menang, berarti kita berada di tempat yang terang dan apabila kalah, berarti kita berada di tempat yang gelap. Apabila kita berada di tempat yang terang, pasti semua akan</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan apabila menang, berarti kita</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|---|
| | | <p>kelihatan dan banyak yang mendekat karena ingin mendapatkan pencerahan. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 18/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Logika Aburizal Bakrie terhadap kemenangan.</p> | | <p>berada di tempat yang terang dan apabila kalah, berarti kita berada di tempat yang gelap yang artinya kemenangan politik menjadi kebutuhan, tuntutan, bahkan sebuah keniscayaan.</p> |
| 65 | H. X. 18c | <p>Kami mau menjual kasus penculikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus beli dan menuntaskannya karena selama ini dia hanya janji-janji. (Tuti Koto, 18/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Para keluarga korban HAM menggelar pasar lupa sebagai cerminan kritik terhadap pemerintah terkait kasus HAM.</p> | <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif menjual kasus.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>Penggunaan diksi beliau untuk mengganti dia.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> |
| 66 | P. X. 19a | <p>Proses pemilu yang mahal itu kemudian merembet pada perekrutan pimpinan lembaga tinggi negara yang juga ikut mahal. (Wakil Ketua DPR Pramono Anung, 19/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Mahalnya biaya seleksi pejabat publik.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif mahal yang artinya biaya proses perekrutan anggota perlemen dan pimpinan sejumlah lembaga tinggi negara melalui pemilu.</p> |
| 67 | H. X. 19a | <p><i>Mutual awareness</i> pula yang mempersatukan kebersamaan domestik maupun negara sahabat bahu-membahu memberantas tindakan-tindakan terorisme karena tidak sesuai asas kemanusiaan. (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, 19/10/2010, hal 4)</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif .</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|------------------------------|---|
| | | Konteks Terorisme merupakan ancaman berbahaya terhadap kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan internasional. | | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 68 | P. X. 19b | Instruksi presiden sudah jelas, nah ini kenapa menteri tidak bisa laksanakan untuk anggaran 2011. (Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, 19/10/2010, hal 5) Konteks Pemerintah hanya mampu memenuhi Rp 2 triliun dari kekurangan Rp 11 triliun pada 2011 untuk sektor pertahanan. | personal (mengkritik) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak bisa . Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 69 | P. X. 20a | Keputusan BK sangat mengecewakan. Ini erosi kredibilitas . Sebenarnya yang membuat kredibilitas turun itu anggota DPR sendiri. (Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 20/10/2010, hal 2) Konteks Turunnya kredibilitas anggota parlemen terkait kenekatan kunjungan kerja ke luar negeri. | personal (kecewa) | Penggunaan bentuk tuturan langsung. Diksi ditandai dengan penggunaan kata kajian erosi kredibilitas yang artinya penyusutan kepercayaan . |
| 70 | P. X. 20b | Presiden harus jujur dan serius dengan komitmen politiknya atas reforma agraria. Jangan hanya berwacana . (Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Usep Setiawan, 20/10/2010, hal3) Konteks Pemerintah harus konsisten dengan program reforma agrarian. | instrumental (menuntut) | Penyebutan subjek langsung Presiden . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif berwacana yang artinya pemerintah harus konsisten dengan program reforma agraria. |
| 71 | P. X. 20c | Partai Golkar meminta agar kita semua menghormati periode pemerintahan | instrumental (memerintah) | Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|--|
| | | <p>yang lima tahun sekali. Jangan sampai menjatuhkan presiden. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 20/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Aburizal Bakrie menolak gagasan menghentikan pemerintahan SBY di tengah jalan.</p> | | <p>dengan kata agar. Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif menjatuhkan mengganti pemerintahan yang sah..</p> |
| 72 | H. X. 20a | <p>Inilah proses hukum tercepat dengan hukuman terlama dalam sejarah kasus pencucian uang di Indonesia yang diduga kuat untuk membungkam Vincent yang menjadi whistleblower (penyingkap aib) kasus Asian Agri. (Direktur Pelaksana Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Dony Ardianto, 20/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Sejumlah tokoh politik meminta grasi untuk Vincentius Amin Suyantu terkait kasus Asian Agri.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa paradoks yang ditandai dengan ungkapan inilah proses hukum tercepat dengan hukuman terlama.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |
| 73 | H. X. 20b | <p>Mana undang-undang kita yang bisa mencegah teroris sebelum beraksi? Tidak ada UU yang memungkinkan aparat proaktif, tidak menunggu bom meledak. (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai, 20/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia belum sepenuhnya mendapat dukungan secara politis.</p> | <p>personal (kecewa)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 74 | P. X. 21a | <p>Jika pimpinan DPR ingin membersihkan DPR dan mencegah adanya pemborosan anggaran di lembaganya, mereka harus mulai dengan membersihkan mafia proyek di DPR. (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 21/10/2010, hal 2)</p> | <p>representasional (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Konteks Praktik mafia proyek di lingkungan DPR.</p> | | <p>keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif membersihkan.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan membersihkan mafia proyek yang artinya menindak tegas (hukum) orang-orang yang korupsi anggaran negara.</p> |
| 75 | P. X. 21b | <p>Mafia proyek membuat masalah, seperti penggelembungan harga dan proyek yang tidak transparan, hampir selalu menyertai pelaksanaan proyek di DPR. (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 21/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Praktik mafia proyek di lingkungan DPR.</p> | <p>personal (kecewa)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti penggelembungan harga dan proyek yang tidak transparan.</p> |
| 76 | P. X. 21c | <p>Seharusnya pimpinan mendengar gejolak publik yang menolak kunjungan ke luar negeri. Mereka punya kewenangan untuk membatalkan. (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan T. Gayus Lumbuun, 21/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks DPR diminta menghentikan rencana kunjungan kerja ke luar negeri.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang ditandai dengan ungkapan gejolak publik yang menolak kunjungan ke luar negeri.</p> |

| | | | | |
|----|-----------|---|-------------------------------|--|
| | | | | Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . |
| 77 | P. X. 21d | <p>Waduh saya bisa melayang ke atap nih. Tetapi, memang saya jarang difoto. Kalau saya banyak difoto dan dipajang, nanti seperti beliau. (Edhie Baskoro Yudhoyono, 21/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Wawancara dengan Edhie Baskoro Yudhoyono.</p> | representasional (menjawab) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan bisa melayang ke atap untuk menyatakan perasaan malu saat dipuji.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti beliau yang artinya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> |
| 78 | P. X. 21e | <p>Di kalangan kaum pemikir dikenal ungkapan: to rule is easy, to govern is difficult. Berkuasa memang mudah, tetapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukan pekerjaan gampang. Dibutuhkan visi, dedikasi, dan keberanian untuk bertindak manakala diperlukan. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 21/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Hari Ulang Tahun Golkar Ke-46 terkait pemimpin baik.</p> | representasional (melaporkan) | Penggunaan gaya bahasa peribahasa yang ditandai dengan ungkapan to rule is easy, to govern is difficult yang artinya berkuasa memang mudah, tetapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukan pekerjaan yang mudah. |
| 79 | P. X. 21f | Tetapi, kita jangan pernah lupa bahwa semua itu hanyalah kerlap-kerlip lampu kapal yang datang dan pergi. (Ketua Umum Partai Golkar | instrumental (menyarankan) | Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan kerlap- |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|---|
| | | <p>Aburizal Bakrie, 21/10/2010, hal 3) Konteks Pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada resepsi Hari Ulang Tahun Golkar Ke-46 terkait kompetisi antarpolisi yang identik dengan politik kepentingan, perebutan pengaruh, citra, dan posisi pribadi politisi.</p> | | <p>kerlip lampu kapal yang datang dan pergi yang artinya politik kepentingan, kompetisi partai, perebutan pengaruh, citra, dan posisi pribadi sebagai sesuatu yang niscaya di demokrasi.</p> |
| 80 | H. X. 21a | <p>Polri justru mengalami krisis kepercayaan karena tak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan belum mampu menegakkan hukum secara maksimal. (Ketua Fraksi PDI-P DPR Tjahjo Kumolo, 21/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II pada tahun pertama kurang maksimal.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 81 | H. X. 21b | <p>Kami sudah menyampaikan sejumlah nama lain yang dicurigai kepada polisi, tetapi mereka sepertinya tidak serius menangani perkara ini. Namun, kami akan tagih terus hal ini. (Koordinator LBH Jakarta Nurcholis, 21/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama S. Langkun belum tuntas</p> | <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 82 | P. X. 22a | <p>Sering kali kalau di kita, kebijakan sudah cukup baik. Hitung-hitungannya cukup baik, landasan juga cukup kuat. Falsafahnya juga sangat mendalam mendukung. Namun, ternyata itu di atas kertas. Pelaksanaannya di lapangan belok ke sana-sini. (Wakil Presiden Boediono, 22/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Wapres Boediono memuji pemerintahan China.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan di atas kertas, belok ke sana-sini</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|-------------------------------|--|
| 83 | P. X. 22b | Ke mana peran negara dalam hilangnya pluralisme ini? (Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, 22/10/2010, hal 4) Konteks Negara harus mengelola pluralisme yang ada di Indonesia. | heuristik | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 84 | P. X. 22c | Ini karena lemahnya kepemimpinan dan pudarnya Pancasila. (Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, 22/10/2010, hal 4) Konteks Negara harus mengelola pluralisme yang ada di Indonesia. | representasional (melaporkan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 85 | P. X. 23a | Dengan melihat hal-hal tersebut, gagasan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional pun bisa mencederai hati nurani rakyat . Gagasan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional sebaiknya ditolak. (Direktur Public Affairs LSI Burhanuddin Muhtadi, 23/10/2010, hal 2) Konteks Survei Lembaga Survei Indonesia terkait warisan politik Soeharto. | representasional (menolak) | Penyebutan subjek langsung Soeharto . Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang ditandai dengan ungkapan mencederai hati nurani rakyat . Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 86 | H. X. 23a | Harapan kami bisa meningkatkan hubungan kelembagaan, misalnya dalam koordinasi dan supervisi. Kita berkoordinasi dalam menyukseskan pemberantasan korupsi. (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Jasin, 23/10/2010, hal 3) Konteks KPK harapkan kerja sama dengan Polri terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. | instrumental (menyarankan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 87 | H. X. 23b | Kalau aparat memperlakukan orang Papua seperti itu, artinya bangsa | personal (kecewa) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|--|
| | | <p>Indonesia tidak mengakui bahwa kami bagian dari Indonesia. (Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Theo Hese gem, 23/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pemerintah mengakui adanya tindakan-tindakan oknum prajurit TNI yang berlebihan terhadap kelompok yang dicurigai sering melakukan gangguan keamanan di Papua.</p> | | <p>kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penyebutan subjek langsung orang Papua.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 88 | H. X. 23c | <p>Saya tidak akan pernah melindungi siapa pun, tetapi saya juga tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Semuanya akan berdasarkan fakta hukum. Jika bersalah, akan dihukum sesuai bobot kesalahannya. (Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, 23/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono tidak melindungi jaksa Cyrus Sinaga terkait dugaan pembocoran atau penggandaan salinan rencana tuntutan atas Gayus Tambunan.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 89 | P. X. 25a | <p>Jika pimpinan atau anggota DPR masih punya niat menghargai masukan dan kegelisahan masyarakat, mereka seharusnya mengusulkan moratorium studi banding ke luar negeri, setidaknya pada semester 1-2011. (Aktivis Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, 25/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Kunjungan delapan anggota BK DPR ke Yunani tidak bermanfaat tetapi tidak bisa dicegah karena sifat kepemimpinan Ketua BK DPR yang kolektif kolegial.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|--|
| 90 | H. X. 25a | <p>Kami (DPD Partai Demokrat DIY) sangat mendukung RUUK DIY yang mengatur penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur-wakil gubernur. (Ketua DPD Partai Demokrat DIY GBPH Prabukusumo, 25/10/2010, hal2)</p> <p>Konteks RUU Keistimewaan DIY</p> | <p>representasional (menyetujui)</p> <p>regulatori</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 91 | P. X. 25b | <p>Pernyataan Presiden bahwa para menteri jangan terpengaruh oleh isu perombakan kabinet sama artinya dengan mengembangkan persoalan. (Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, 25/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera memastikan ada tidaknya perombakan kabinet.</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif mengembangkan.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> |
| 92 | H. X. 26a | <p>Saya sebagai Kepala Polri ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang belum tercapai. (Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso, 26/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Pihak Kepolisian Negara RI mengakui masih ada kelemahan dalam melayani masyarakat.</p> | <p>personal (memohon maaf)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 93 | H. X. 26b | <p>Saya diperiksa untuk masalah Pak Wandoyo. Ya sebagai saksi, namanya juga atasan jadi saksi bawahan. (Mantan Menteri Kehutanan MS. Kaban, 26/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks KPK memeriksa M. S. Kaban terkait kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan tahun 2007.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Pak Wandoyo.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|---|
| 94 | H. X. 27a | <p>Kami setuju ada evaluasi terhadap studi banding yang dilakukan DPR. Namun, dibutuhkan payung hukum untuk melakukannya, seperti untuk mengukur penting-tidaknya sebuah studi banding. Jika ukuran itu ada, kami punya panduan untuk menerima atau menolak rencana studi banding. (Ketua DPR Marzuki Alie, 27/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks DPR melakukan evaluasi studi banding.</p> | <p>representasional (menyetujui)</p> <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan analogi payung yang artinya alat untuk melindungi.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika</p> |
| 95 | P. X. 27a | <p>Sekarang ini banyak orang yang seperti Presiden berbicara mengenai <i>reshuffle</i>. Kalau Pak Heru, kan, Staf Khusus Presiden. Mungkin saja tahu. Kalau saya, kan, anggota kabinetnya Presiden. Jadi, tidak tahu apa-apa. (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, 27/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menentukan sendiri waktu dan lokasi pengumuman perombakan kabinet.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Pak Heru.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 96 | H. X. 27b | <p>Memasuki tahun keenam pemerintahan Yudhoyono atau tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, Setara Institute mencatat kinerja penegakan HAM justru semakin menurun. (Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace Hendarji, 27/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Kinerja pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia dinilai masih rendah.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Yudhoyono.</p> |

| | | | | |
|-----|------------------|---|--|---|
| 97 | H. X. 28a | <p>MPR menunggu saja tentang perubahan kelima UUD 1945. Ini terserah parpol di DPR. (Ketua MPR Taufiq Kiemas, 28/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Pemikiran dan keinginan mengamandemen UUD 1945 tidak pernah hilang.</p> | representasional (melaporkan) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 98 | P. X. 29a | <p>Oleh karena itu, jagalah dan rawatlah negeri yang menakjubkan ini agar jangan sampai tercerai-berai justru di tangan generasi muda yang mengambil alih tongkat kepemimpinan generasi tua seperti kami ini. (Wapres Boediono, 29/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pidato Wapres Boediono dalam acara peringatan ke-82 Sumpah Pemuda terkait keutuhan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata agar.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan jangan sampai tercerai-berai justru di tangan generasi muda yang mengambil alih tongkat kepemimpinan generasi tua.</p> |
| 99 | P. X. 29b | <p>Kita (tinggal di) negara di jalur gempa, kalau ada tsunami seperti itu, kalau tinggal di pulau (seperti Mentawai), itu peringatan dini selama dua jam, (penduduknya) sempat enggak keluar? (Ketua DPR Marzuki Alie, 29/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Ketua DPR dinilai tidak bertanggung jawab terkait empati kepada korban bencana tsunami.</p> | representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 100 | P. X. 29c | <p>Orang itu tak bisa merasakan penderitaan rakyat. Dia itu mengerti atau tidak, sih? Indonesia ini negara kepulauan. (Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, 29/10/2010, hal 5)</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak, tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|
| | | <p>Konteks Ketua DPR dinilai tidak bertanggung jawab terkait empati kepada korban bencana tsunami.</p> | | |
| 101 | H. X. 30a | <p>Mudah-mudahan apapun hasil tim itu adalah dalam rangka menjaga citra Mahkamah Konstitusi. (Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, 30/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pembentukan tim investigasi untuk menjaga citra MK terkait kasus mafia kasus.</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat harapan yang ditandai dengan kata mudah-mudahan . |
| 102 | P. X. 30a | <p>Waktu saya tinjau Papua, ternyata mereka bandingkan diri mereka dengan sinetron-sinetron. Dia kira semua orang Jakarta seperti itu. (Letjen (Purn) TB Silalahi, 30/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, serta arus globalisasi menjadi tantangan dalam mewujudkan moral dan karakter bangsa.</p> | representasional (melaporkan) | Penggunaan analogi ditandai dengan kata-kata sinetron-sinetron . |

KOMPAS
November 2010

| No. | Kode | Tuturan | Fungsi Bahasa | Penanda Kesantunan |
|-----|-----------|---|---|--|
| 1 | P. XI. 1a | Ini adalah waktu yang baik bagi kami untuk menyampaikan ketetapan DPD Golkar Bali mencalonkan Bapak Aburizal sebagai calon presiden.(Sudikerta Ketua DPD Golkar Bali, 01/11/2010, hal 2) Konteks Partai Golkar Bali mantap mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. | representasional (melaporkan) | Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . Penyebutan subjek langsung Bapak Aburizal Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 2 | P. XI. 1b | Saya sangat setuju dilakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri oleh DPR. (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, 01/11/2010/hal 2) Konteks Usulan DPR melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja ke luar negeri mendapatkan dukungan sejumlah pihak. | representasional (menyetujui) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 3 | P. XI. 1c | Tahun 2014, Partai Gerindra akan raih mandat . (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, 01/11/2010, hal 3) Konteks Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yakin partainya akan menang pada Pemilu 2014. | representasional (mempertimbangkan kepastian) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif raih mandat yang artinya kemenangan. |
| 4 | H. XI. 2a | Pemerintah pamong biasanya bertujuan baik. Kalau itu dijalankan, tentu akan berhasil penanganan pengungsi. Jadi apa pun itu (perintah), saya mohon | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| | | <p>dipatuhi. Meski sekarang sudah menurun erupsinya, kita harus tetap waspada bilamana letusan itu terjadi lagi. Sebab, bisa saja (erupsi) terjadi lagi. (Wakil Presiden Boediono, 02/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Pidato Wapres Boediono saat mengunjungi lokasi pengungsi korban erupsi Gunung Merapi.</p> | | <p>kalau. Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata sebab.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 5 | P. XI. 2a | <p>Bagi kami masalah siapa membentuk (konfederasi) siapa, hingga menjelang 2014 masih amat cair. Siapa tahu Gerindra dan PAN kelak juga jadi konfederasi? Yang penting bagi kami, gagasan konfederasi ini mulai diterima. (Ketua PAN Bima A.S., 02/11/2010,hal 3)</p> <p>Konteks Ide Partai Gerindra membentuk konfederasi dengan enam partai politik lain disambut positif.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif cair yang artinya belum jelas.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 6 | H. XI. 2b | <p>Ya, jelas. Karena memang tidak ada putusan hukum yang menyatakan keduanya bersalah.(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, 02/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Pemilihan opsi <i>deponeering</i>, pimpinan KPK tidak bersalah terkait kasus Bibit-Chandra.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak ada.</p> |
| 7 | H. XI. 3a | <p>Ini tugas berat untuk meningkatkan integritas sehingga tidak ada lagi nantinya petugas yang menerima gratifikasi dan layanannya akan menjadi lebih baik. (Wakil Ketua KPK M. Jasin, 03/11/2010, hal 2)</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan kata sehingga.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|--|---|
| | | <p>Konteks KPK meminta ada perbaikan. survei layanan publik untuk cegah korupsi.</p> | | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 8 | H. XI. 3b | <p>Kalau tim investigasi menemukan bahwa ada hakim terlibat mafia kasus, tetapi dia kemudian ingkar dan tidak bersedia dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, saya yang mundur. Artinya saya telah gagal memimpin. (Ketua MK Mahfud M.D., 03/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Ketua MK Mahfud M.D. siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK jika ada hakim konstitusi yang terindikasi terlibat mafia kasus.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif mundur yang artinya mengaku kalah.</p> <p>Penggunaan bentuk turunan langsung.</p> |
| 9 | P. XI. 3a | <p>Kami akan ”jewer” anggota yang tetap ikut ke luar negeri. (Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso, 03/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso akan memberikan peringatan kepada anggota DPR dari Partai Golkar yang mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif jewer yang artinya peringatan.</p> |
| 10 | H. XI. 4a | <p>Itu yang sedang dicari. Nunun memang penting untuk mengetahui siapa pemberi cek perjalanan. (Juru Bicara</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Nunun.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | <p>KPK Johan Budi, 04/11/2011, hal 2)</p> <p>Konteks Nunun mangkir untuk ketiga kalinya dari panggilan KPK terkait kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom.</p> | | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 11 | H. XI. 4b | <p>Mungkin. Itu yang saya bilang. Tetapi, kalau dia tidak menjadi pihak, itu lain lagi soalnya. Tetapi, dia itu, kan, menjadi salah satu pihak, bisa saja ada kaitannya dengan perkara yang dia tangani. (Hakim konstitusi Akil Mochtar, 04/11/2011, hal 4)</p> <p>Konteks Hakim Konstitusi ragukan obyektivitas Refly Harun.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> |
| 12 | P. XI. 4a | <p>Kita memiliki sejumlah lembaga seperti Taruna Nusantara, Sampoerna Foundation, dan lain-lain. Kebanyakan lulusan mereka tidak terjun dalam organisasi politik dan menyiapkan diri sebagai pemimpin. (Konsultan Lepas Sidik Ilmawan, 04/11/2011, hal 5)</p> <p>Konteks Pentingnya pendidikan warga negara.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif terjun yang artinya berpartisipasi.</p> |
| 13 | P. XI. 5a | <p>DPR sengaja bermain-main dengan satu permasalahan dengan membuka peluang anggota parpol menjadi anggota KPU, Badan dan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan. (Peneliti Divisi Politik Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Veri Juniadi, 05/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Revisi paket UU Politik diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011.</p> | personal (mengkritik) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif bermain-main yang artinya ketidakseriusan.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|---|----------------------------|--|
| 14 | P. XI. 5b | <p><i>Wah niki</i> (ini) <i>eco</i> (enak), tetapi (nasinya) <i>kirang</i> (kurang)...” (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.</p> | interaksional | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 15 | P. XI. 5c | <p>Buat pengungsi (nasinya) kurang, tetapi kalau buat Presiden, ya sudah cukup. (Ny. Ani Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.</p> | interaksional | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 16 | P. XI. 6a | <p>Edhi itu malahan termasuk tua, bukan muda. Seharusnya malah yang menjadi Panglima Kostrad itu angkatan 1981 atau 1982. (Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta, 06/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pramono Edhie Wibowo pantas menjadi Panglima Komando Cadangan Strategi TNI AD.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penyebutan subjek langsung Edhi.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> |
| 17 | P. XI. 6b | <p>Tingkah pimpinan DPR, ketua fraksi, dan anggota DPR umumnya relatif sama, yaitu boros, malas, dan suka jalan-jalan menggunakan uang rakyat. (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 06/11/2010, hal 4)</p> | personal (mengkritik) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penyebutan subjek langsung pimpinan DPR, ketua fraksi, dan anggota DPR.</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | Konteks Studi Banding ke luar negeri oleh anggota DPR merupakan persoalan pikir dan hati nurani mereka. | | |
| 18 | P. XI. 6c | Rasanya sulit untuk menemukan cara membangun komitmen anggota DPR untuk lebih peduli kepada rakyat. Mereka seperti membiarkan korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia. (Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 06/11/2010, hal 4) Konteks Studi Banding ke luar negeri oleh anggota DPR merupakan persoalan pikir dan hati nurani mereka. | personal (kecewa) | Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti membiarkan korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia yang artinya tidak memiliki kepedulian kepada penderitaan rakyat korban bencana alam . |
| 19 | H. XI. 8a | Cara kerja Kejaksaan Agung yang amburadul seperti ini membuat orang bertanya-tanya, benarkah hukum ingin ditegakkan atau sekadar melaksanakan sebuah agenda politik? Kalau perkara ini dilimpahkan ke pengadilan, akan saya hadapi dengan ilmu, keberanian, dan ketegaran sikap. (Yusril Ihza Mahendra, 08/11/2010, hal 4) Konteks Yusril Ihza Mahendra mengkritik cara kerja Kejaksaan Agung terkait kasus Sisminbakum. | personal (kecewa) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung. |
| 20 | H. XI. 8b | Kasus Gayus, misalnya, siapa yang tahu kalau tidak dibongkar. (Kastorius Sinaga, 08/11/2010, hal 4) Konteks Kinerja aparat hukum dalam kasus pemberantasan korupsi dinilai semakin buruk. | representasional mengidentifikasi | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau . Penggunaan keterangan |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|--|
| | | | | modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 21 | P. XI. 9a | Hati saya berbunga-bunga. Inilah masa depan Indonesia. (Waki Presiden RI Boediono, 09/11/2010, hal 2) Konteks Pidato Wapres Boediono saat melepas 51 sarjana yang tergabung dalam Program Indonesia Mengajar untuk ditempatkan setahun di sekolah dasar di desa terpencil. | personal (memuji) | Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan hati saya berbunga-bunga yang artinya perasaan bahagia. |
| 22 | P. XI. 9b | Saya melihat muka Presiden langsung menjadi batu. Presiden langsung membalikkan badan menuju pesawat, meninggalkan wartawan CNN yang bengong karena wawancaranya gagal total. (Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, 09/11/2010, hal 2) Konteks Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke wilayah musibah tsunami di Aceh pada Desember 2004. | representasional (melaporkan) | Penyebutan subjek langsung Presiden. Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan muka Presiden langsung menjadi batu. Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena. |
| 23 | P. XI. 9c | Di sini hujan, tetapi udaranya panas sekali. Aneh, kan. (Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono, 09/11/2010, hal 2) Konteks Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pengungsi dan wilayah letusan Gunung Merapi. | personal (mengkritik) | Penggunaan gaya bahasa paradoks yang ditandai dengan ungkapan di sini hujan, tetapi udaranya panas sekali. |
| 24 | P. XI. 9d | Jika partai dapat membuktikan dirinya serius bekerja untuk rakyat dan relatif bersih , mereka tidak perlu takut ditinggalkan pemiliknya. Partai yang memiliki jenjang karier jelas dan | representasional (mempertimbangkan kepastian) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika. |

| | | | | |
|----|------------|--|-------------------------------|---|
| | | <p>terbuka juga akan lebih solid. (Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, 09/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Konflik internal parpol menguat terkait penggabungan parpol untuk menghadapi Pemilu 2014.</p> | | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif bersih yang artinya bebas dari tindak pidana.</p> |
| 25 | H. XI. 10a | <p>Kami tidak diterima staf Kemko Polhukam untuk audiensi. Padahal, beberapa saat lalu Menko Polhukam sudah menerima kami dengan baik. Kami menentang rencana pemberian gelar kepahlawanan kepada mantan Presiden Soeharto karena banyak pelanggaran HAM yang ditinggalkan. (Haris Azhar, Koordinator Kontras dan Gabungan LSM, 10/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Aktivis HAM menentang nominasi Soeharto sebagai pahlawan nasional.</p> | representasional (menolak) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Menko Polhukam dan mantan Presiden Soeharto.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 26 | H. XI.10b | <p>Soeharto tidak memiliki kriteria keteladanan dan banyak menumpahkan darah sejak awal kepemimpinan hingga akhir. Dia juga tidak bisa dikatakan berjasa karena pembangunan fisik yang dijalankan merupakan lahan subur bagi korupsi. (Ny. Sumarsih, Keluarga</p> | representasional (menolak) | <p>Penyebutan subjek langsung Soeharto.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|
| | | <p>Korban Pelanggaran HAM, 10/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Aktivis HAM menentang nominasi Soeharto sebagai pahlawan nasional.</p> | | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> |
| 27 | H. XI. 10c | <p>Kita tantang ketegasan Kapolri untuk memberantas korupsi dengan menindak semua pihak yang terlibat. (Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis, 10/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Sembilan Polisi dibebastugaskan terkait dugaan keberadaan Gayus di Bali.</p> | <p>instrumental (menantang)</p> | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 28 | P. XI. 11a | <p>Kami ini korban stigma. Ketika mencoba transparan dan akuntabel, malah tidak jadi pergi. Padahal, acara itu merupakan program kerja sama Pemerintah Belanda dan BAKN, serta semuanya dibiayai Pemerintah Belanda. (Eva Kusuma Sundari, Anggota BAKN dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), 11/11/2010,hal 2)</p> <p>Konteks BAKN DPR batal studi banding ke Belanda.</p> | <p>personal (kecewa)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> |
| 29 | P. XI. 11b | <p>Pengalaman BAKN, potensi peyalahgunaan keuangan negara ada di semua level. Belanda punya pengalaman dan sistem yang bagus dalam mendorong akuntabilitas keuangan negara. Sayang, BAKN tidak dapat pergi ke Belanda untuk mempelajarinya, padahal itu dibiayai Pemerintah Belanda. Uang yang seharusnya dipakai BAKN untuk ke Belanda juga tidak dapat dialihkan untuk membantu korban bencana karena uang itu milik Pemerintah Belanda.(Ketua BAKN Ahmad</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |

| | | | | |
|----|------------|--|---------------------------|--|
| | | <p>Muzani, 11/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks BAKN DPR batal studi banding ke Belanda.</p> | | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif</p> |
| 30 | P. XI. 11c | <p>Daerah perbatasan tak boleh menjadi dapur atau bagian belakang rumah, tetapi harus menjadi beranda depan yang mencerminkan wajah yang elok. BNPP mempunyai beban kerja yang berat, yaitu mengoordinasi semua pihak terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (Mendagri Gamawan Fauzi, 11/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun desain besar, rencana induk, dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak</p> <p>Penggunaan bentuk analogi dapur yang artinya bagian belakang rumah dan beranda depan yang artinya bagian depan rumah</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata metafora wajah yang elok yang artinya tempat yang indah.</p> |
| 31 | H. XI. 12a | <p>Tim silakan bekerja. Kami tidak akan mengganggu. Mau diam-diam atau terang benderang silakan. (Ketua MK Mahfud M.D., 12/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks MK tidak akan mengganggu kerja tim investigasi internal.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif diam-diam yang artinya merahasiakan pergerakan tim investigasi internal MK selama memeriksa saksi-saksi dan terang benderang yang</p> |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---|
| | | | | artinya pemeriksaan secara terbuka.. |
| 32 | H. XI.12b | <p>Desa-desa kembali menguning seperti dulu. (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan, 12/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Partai Golkar fokus menggarap pemilih di desa.</p> | representasional mengidentifikasi | Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan desa-desa kembali menguning seperti dulu |
| 33 | P. XI. 12a | <p>Jilbab Bu Khofifah sudah kuning. (Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, 12/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Kehadiran Ketua DPP Nasdem Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran Modal Bergulir bagi Penduduk Desa di Surabaya.</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif kuning.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 34 | P. XI. 12b | <p>Golkar seperti ingin mengimbangi sejumlah partai lain yang merekrut purnawirawan jenderal untuk memperkuat organisasi. (Koordinator Sukarelawan Indonesia Dhimas Oky Nugroho, 12/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Partai Golkar merekrut purnawirawan jenderal.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan Golkar seperti ingin mengimbangi sejumlah partai lain yang merekrut purnawirawan jenderal.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |
| 35 | H. XI.12c | <p>Tidak perlu menyediakan amplop, apalagi bagi media-media besar. Saya justru sering diberi amplop oleh stasiun-stasiun televisi kalau datang menjadi pembicara. (Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, 12/11/2010, hal 4)</p> | representasional (menolak) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang</p> |

| | | | | |
|----|------------|--|---|--|
| | | <p>Konteks Penghargaan atas liputan wartawan di lingkungan kepolisian jangan diwujudkan dengan pemberian amplop.</p> | | <p>ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif amplop yang artinya uang.</p> |
| 36 | P. XI. 12c | <p>Bagaimana mungkin anggota parpol sebagai pemain sekaligus wasit dalam pemilu? Itulah yang tidak bisa kami kompromikan. (Anggota Komisi II DPR F-PD Ignatius Mulyono, 12/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Fraksi Partai Demokrat DPR tidak bersedia kompromi terkait pelibatan partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> <p>representasional (menolak)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan anggota parpol sebagai pemain sekaligus wasit yang artinya anggota KPU dan Bawaslu harus bebas dari keanggotaan parpol, minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 37 | P. XI. 13a | <p>Setelah tidak ada GBHN, kita seperti kehilangan arah. (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, 13/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Distorsi terhadap cita-cita nasional.</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti kehilangan arah.</p> |
| 38 | P. XI. 15a | <p>Rakyat ini sebenarnya lebih diketahui tokoh agama. Kalau mereka tak diajak komunikasi, tanda sudah lampu kuning. (Ketua yayasan Solusi Bangsa Sutrisno Bachir, 15/11/2010, hal 3)</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>Konteks Pemerintah dan masyarakat harus bersama mencegah kehancuran Indonesia.</p> | | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan tanda sudah lampu kuning</p> |
| 39 | H. XI.15a | <p>Kemarin sudah ada surat perintah dari kementerian terkait supaya diturunkan prioritasnya. Hal semacam ini memang ada. Banyak juga RUU yang cuma judul-judulan. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Wicipto, 15/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pemerintah perketat syarat untuk masuk Program Legislasi Nasional.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata supaya.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif judul-judulan yang artinya tidak ada realisasinya.</p> |
| 40 | P. XI. 16a | <p>Obama pemimpin bersahaja, jauh dari kesan angkuh dan congkak. Jauh dari persepsi kita tentang Amerika Serikat (AS) yang arogan. Latar belakang Obama dari keluarga sederhana. Dia menjadi spirit bagi politisi. (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, 16/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Kekaguman kepada Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama.</p> | personal (memuji) | <p>Penyebutan subjek langsung Obama.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 41 | P. XI. 16b | <p>Waduh, aku <i>lali</i> (lupa), karena saya sudah kadung seperti penggemar jumpa dengan idola. (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, 16/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Kekaguman kepada Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama.</p> | personal (memuji) | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti penggemar jumpa dengan idola.</p> |

| | | | | |
|----|------------|--|--|--|
| 42 | H. XI.16a | <p>Seharusnya parlemen dinilai dari fungsi pengawasnya, bukan berapa produk undang-undang yang dihasilkan. Yang penting adalah kualitas undang-undang dan berapa lama undang-undang itu bisa dipakai. (Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin, 16/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Berbagai peraturan terkait pemilu diusulkan dibuat dalam satu kodifikasi hukum.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya. Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 43 | H. XI. 18a | <p>Saya semula yakin Bang Buyung yang akan mundur. Dia pernah mundur saat mendampingi Rudy Ramli dan TNI sesuai keyakinannya sebagai advokat. Namun, kali ini saya keliru. Padahal, tak ada alasan untuk tak mundur karena ada ketidakpercayaan. (Advokat M. Lutfi, 18/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Adnan Buyung Nasution tidak jadi mengundurkan diri sebagai pembela Gayus Tambunan.</p> | personal (kecewa) | <p>Penyebutan subjek langsung Bang Buyung.</p> <p>Penggunaan diksi sebaiknya mengganti kata dia dengan kata beliau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |
| 44 | H. XI.18b | <p>Untuk menyusun kodifikasi hukum pemilu tidaklah mudah. Selain membutuhkan waktu yang lama, juga memerlukan keseriusan, konsentrasi, dan konsistensi yang penuh, baik DPR maupun pemerintah. (Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo, 18/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Kodifikasi hukum pemilu baru dapat dilakukan setelah Pemilu 2014.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidaklah.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|--|--|---|
| 45 | H. XI. 18c | <p>Di sisi lain, perbaikan peraturan pemilu diperlukan segera dan cepat. Perubahan paket undang-undang politik harus dilakukan segera dan cepat agar mampu mengejar persiapan pelaksanaan Pemilu 2014. Kami telah sepakat selambat-lambatnya 2,5 tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2014. (Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo, 18/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Kodifikasi hukum pemilu baru dapat dilakukan setelah Pemilu 2014.</p> | representasional (melaporkan, menyetujui) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata agar.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 46 | H. XI.18d | <p>Tolong dilaporkan kepada saya yang menjadi perhatian publik sekarang ini perihal Saudara Gayus Tambunan dan perihal vonis Saudara Misbakhun. Tolong dijelaskan apa yang terjadi. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 18/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Vonis M. Misbakhum dan kasus Gayus Tambunan dibahas di kabinet.</p> | instrumental (memerintah) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 47 | H. XI. 18e | <p>Presiden tidak akan mencampuri proses penegakan hukum, tetapi hal ini sudah menjadi perhatian publik, mencederai rasa keadilan yang harus jadi perhatian kita sekalian. (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, 18/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Vonis M. Misbakhum dan kasus Gayus Tambunan dibahas di kabinet.</p> | representasional (melaporkan) instrumental (memerintah) | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan , mencederai rasa keadilan yang</p> |

| | | | | |
|----|------------|--|----------------------------|---|
| | | | | artinya bertentangan dengan nilai keadilan. |
| 48 | P. XI. 19a | <p>Badan Kehormatan (BK) DPR seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga citra DPR. Namun, ironisnya, BK DPR juga melakukan hal yang dikritik masyarakat, yaitu dengan agenda yang tidak jelas selama dua hari. (Sebastian Salang dari Koalisi Penegak Citra DPR, 19/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks BK DPR harus secepatnya memeriksa delapan anggotanya yang melakukan kunjungan kerja ke Yunani.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penyebutan subjek langsung Badan Kehormatan (BK) DPR.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan benteng terakhir dalam menjaga citra DPR.</p> |
| 49 | H. XI. 19a | <p>Presiden semestinya tak berkomentar sebab kasus ini masih ditingkat banding. Pernyataan Presiden itu jelas intervensi. (Luhut Simanjuntak, 19/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Presiden SBY dinilai melakukan intervensi dalam penanganan kasus M. Misbakhum.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata semestinya.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata sebab.</p> <p>Diksi ditandai dengan kata denotatif.</p> |

| | | | | |
|----|------------|---|--|--|
| 50 | P. XI. 20a | <p>Presiden itu harus sudah dimulai lebih awal dari penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, pembahasan revisi UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik lebih cepat lebih baik. Kalau tidak, nanti jadwalnya terganggu. Kalau tahun 2013 tahapan pemilu sudah dimulai, satu tahun sebelumnya perundang-undangan sudah selesai. Kita berharap paling lambat tahun 2012 sudah selesai, termasuk untuk nomor induk kependudukan sudah tidak ada masalah. (Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, 20/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Revisi paket undang-undang politik bisa diselesaikan pada tahun 2012.</p> | <p>regulatori</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 51 | H. XI.22a | <p>Mungkin tidak untuk sekarang. Hakim-hakim sekarang masih baik-baik. Tetapi tidak tahun 10 tahun ke depan. Makanya, saya usul, itu perlu dipikirkan lagi sekarang. (Ketua MK Mahfud M.D., 22/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Ketua MK Mahfud M.D. menilai MK perlu mendapatkan pengawasan dari lembaga eksternal.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kemungkinan yang ditandai dengan kata mungkin.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> |
| 52 | H. XI.22b | <p>Campur tangan presiden sangat penting karena kasus Gayus banyak dimensi politiknya. Jaksa Agung dan Kepala Polri bisa dikeroyok partai politik,</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> <p>representasional</p> | <p>Penggunaan keterangan sebab ditandai dengan kata karena.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|--|--------------------------------|--|
| | | DPR, dan penguasa-penguasa hitam pengemplang pajak yang ingin menyelamatkan diri. (Ketua MK Mahfud M.D., 22/11/2010, hal 2) Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memandu langsung pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. | (mempertimbangkan kemungkinan) | Penyebutan subjek langsung Jaksa Agung dan Kepala Polri . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan penguasa-penguasa hitam pengemplang pajak yang ingin menyelamatkan diri. |
| 53 | H. XI. 22c | Misalnya Presiden mengultimatum jaksa, kasus ini harus selesai dalam jangka waktu satu minggu atau Jaksa Agung dipecat. (Anggota DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faizal, 22/11/2010, hal 2) Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memandu langsung pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. | instrumental (menyarankan) | Penyebutan subjek langsung Presiden . Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 54 | H. XI.22d | Alangkah baiknya penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawandi Syamsuddin, 22/11/2010, hal 2) Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memandu langsung pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. | instrumental (menyarankan) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 55 | H. XI.23a | Saya bicara kepada Ketua DPR, selesaikan masalah ini, atau kita ribut. (Salim Mengga dari F-PD, 23/11/2010, hal 3) | instrumental (menantang) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |

| | | | | |
|----|------------|---|---|--|
| | | <p>Konteks Delapan anggota BK DPR merasa tidak melanggar apa pun saat melakukan kunjungan kerja ke Yunani.</p> | | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 56 | H. XI.23b | <p>Kalau saya pernah desersi dari tugas dengan memakai uang negara di DPR, saya siap mundur tak hanya dari BK, tetapi juga dari DPR. (Ketua BK DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun, 23/11/2010, hal3)</p> <p>Konteks Delapan anggota BK DPR merasa tidak melanggar apa pun saat melakukan kunjungan kerja ke Yunani.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> |
| 57 | H. XI. 23c | <p>Kita serahkan ke polisi supaya menjadi pembelajaran bagi jaksa untuk tidak lagi memalsukan, memeras, atau menggelapkan barang bukti. Kami serahkan ke polisi supaya penanganannya lebih <i>fair</i>. (JAM Pengawasan Marwan Effendi, 23/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Jaksa yang diindikasikan melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum.</p> | <p>instrumental (memerintah)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata supaya, untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 58 | P. XI. 24a | <p>BK harus dapat segera bekerja, tidak malah terlibat perseteruan. (Wakil Ketua DPR Pramono Anung, 24/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pimpinan DPR akan bersikap tegas terhadap konflik di BK DPR.</p> | <p>instrumental (memerintah)</p> <p>personal (mengkritik, kecewa)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|----|------------|---|--|--|
| 59 | H. XI. 25a | <p>KPK masih terkesan tebang pilih. Ketika menyangkut istana, KPK seperti tidak punya nyali. (Syarifudin Sudding dari Fraksi Partai Hanura, 25/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Syarifudin Sudding mengkritik kinerja KPK.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penyebutan subjek langsung KPK.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif tebang pilih.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti tidak punya nyali.</p> |
| 60 | H. XI.25b | <p>Kami belum menemukan ada niat jahat dalam kasus Bank Century. Keputusan <i>bail out</i> harus ada niat jahatnya. Dalam kasus Bank Century, lebih banyak ditemukan dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang bukan wewenang KPK. (M. Jasin, 25/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks KPK belum menemukan dugaan korupsi dalam kasus Bank Century.</p> | representasional (melaporkan) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 61 | P. XI. 25a | <p>Taruhannya sangat besar jika kita gagal menjalankan reformasi birokrasi yang baik. Sebab, reformasi birokrasi sekarang ini adalah bagian dari reformasi besar yang dilakukan bangsa Indonesia sejak 1998, yaitu reformasi di berbagai bidang. (Wakil Presiden RI Boediono, 25/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Pidato Wapres Boediono saat Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Negara terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 62 | H. XI. 25c | <p>Dulu bebas, sekarang terkontrol. Ditambah lagi sekarang semua informasi terbuka dan transparan. Jadi, ruang gerak agak sempit sehingga banyak terungkap. (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|
| | | <p>Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan, 25/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Ruang gerak koruptor semakin sempit.</p> | | dengan sehingga . |
| 63 | P. XI. 25b | <p>Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat., PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing. (Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, 25/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Adanya risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.</p> | instrumental (menantang) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> |
| 64 | P. XI. 25c | <p>Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai. (Ketua Umum DPP Partai PDI-P Megawati, 25/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> | representasional (menjawab) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kemungkinan yang ditandai dengan kata mungkin.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> |
| 65 | P. XI. 25d | <p>Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang. (Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, 25/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> | <p>representasional (menjawab)</p> <p>personal (mengucapkan selamat)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Ibu Megawati.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|---|
| 66 | H. XI. 26a | <p>Saya menilai tugas yang seharusnya bisa diselesaikan segera, saya harapkan bisa dituntaskan pada waktunya. Misalnya, saya meminta supaya dipersiapkan rancangan instruksi presiden tentang penghematan biaya di APBN dan APBD, seperti yang saya minta waktu sidang kabinet di Bogor tanggal 21 Oktober lalu. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan supaya.</p> <p>Penggunaan tuturan tidak langsung.</p> |
| 67 | H. XI.26b | <p>Tolong ini segera diselesaikan oleh menteri dan pejabat terkait lainnya. (Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono, 26/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.</p> | instrumental (memerintah) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. |
| 68 | H. XI. 26c | <p>Tidak harus semuanya oleh Presiden diresponsnya. Mari jalankan sistem dan ambil tanggung jawab yang sesuai dengan peranan dan tanggung jawab. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> |
| 69 | P. XI. 26a | <p>Jika saya ditarik sebagai Ketua BK DPR, saya yakin itu kebijakan terbaik. Untuk menegakkan kehormatan</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang |

| | | | | |
|----|------------|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>anggota DPR tidak hanya bisa dilakukan di BK, tetapi juga di alat kelengkapan lainnya. Saya sudah berusaha sesuai kemampuan saya. (Ketua BK DPR T. Gayus Lumbuun, 26/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Konflik BK DPR terkait kasus kunjungan kerja beberapa anggotanya ke Yunani.</p> | | <p>ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> |
| 70 | P. XI. 26b | <p>Tidak banyak kritik dan tidak banyak yang perlu diubah dalam konstitusi kita. Seperti yang pernah disampaikan Bung Hatta, kita mendayung di antara dua karang, yaitu kapitalisme dan sosialis. (Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, 26/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Indonesia tidak perlu menjadi negara ekstrem, baik agama maupun sekuler.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti yang pernah disampaikan Bung Hatta, kita mendayung di antara dua karang, yaitu kapitalisme dan sosialis.</p> |
| 71 | P. XI. 27a | <p>Urusan <i>reshuffle</i> kabinet itu hak prerogatif Presiden. Kami tidak akan mencampuri ranah itu. Kalau dianggap perlu <i>reshuffle</i>, lakukan secepatnya sehingga menteri yang sekarang tidak terombang-ambing dalam mengambil kebijakan. Silakan saja bagaimana Presiden menilai kinerjanya masing-masing, kami tidak ikut campur. Tetapi, lebih baik jika Presiden lebih tegas. (Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, 27/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tegas memutuskan perombakan kabinet.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau, jika.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan sehingga.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif terombang-</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|--|--|---|
| | | | | ambing yang artinya bingung. |
| 72 | P. XI. 27b | <p>Presiden jangan mau tersandera oleh Setgab (Sekretaris Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono). (Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, 27/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tegas memutuskan perombakan kabinet.</p> | instrumental (menyarankan) | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif tersandera.</p> |
| 73 | H. XI.27a | <p>Pada prinsipnya, siapa pun yang memakai uang negara harus mempertanggungjawabkan walaupun itu uang satu sen. (Mendagri Gamawan Fauzi, 27/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pertanggungjawaban keuangan parpol harus mengikuti standar akuntansi yang diterapkan pemerintah.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa litotes yang ditandai dengan ungkapan mempertanggungjawabkan walaupun itu uang satu sen</p> |
| 74 | H. XI.27b | <p>Saya berharap 18 Desember nanti sudah ketok palu. (Mendagri Gamawan Fauzi, 27/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pertanggungjawaban keuangan parpol harus mengikuti standar akuntansi yang diterapkan pemerintah.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif ketok palu yang artinya keputusan yang sah. |
| 75 | P. XI. 27c | <p>Karena hanya punya 26 kursi , saat itu Gerindra dianggap tidak mendapat jatah di BK DPR. Demikian pula dengan Hanura yang mendapat 17 kursi. Padahal, Pasal 80 Tata Tertib DPR menyatakan keanggotaan BK DPR terdiri dari fraksi-fraksi di DPR. (Wakil</p> | <p>personal (mengkritik)</p> <p>regulatori</p> | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|
| | | <p>Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, 27/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Fraksi Partai Gerindra dan Hanura menuntut jatah kursi di BK DPR.</p> | | <p>dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif kursi yang artinya jabatan atau kekuasaan.</p> |
| 76 | P. XI. 27d | <p>Bagaimana kami bisa terikat dengan BK DPR jika tidak tahu proses yang ada di badan itu karena tidak punya wakil? (Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura, 27/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Fraksi Partai Gerindra dan Hanura menuntut jatah kursi di BK DPR.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |
| 77 | P. XI. 27e | <p>Saya sungguh berharap sebenarnya Saudara Dr. Bambang Widjojanto berkenan atau bersedia untuk memimpin Komisi Kejaksaan. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 27/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Bambang Widjojanto menolak posisi Ketua Komisi Kejaksaan.</p> | <p>instrumental (memohon)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Dr. Bambang Widjojanto.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 78 | P. XI. 27f | <p>Elite belum menghendaki figur yang keras seperti Bambang Widjojanto. Pilihan atas Busyro tidaklah buruk, namun ia harus mampu menjawab harapan masyarakat agar KPK mengambil alih kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi. (Sekretaris Jenderal Transparency International</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan figur yang keras seperti Bambang Widjojanto.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>Indonesia Teten Masduki, 27/11/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Bambang Widjojanto menolak posisi Ketua Komisi Kejaksaan.</p> | | <p>Penyebutan subjek langsung Busyro.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidaklah.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan agar.</p> |
| 79 | P. XI. 29a | <p>Saya berharap semua fraksi di DPR bersedia dan tidak perlu malu mengganti anggotanya di BK DPR. Hanya dengan cara ini BK dapat bebas dari konflik dan memulai langkah baru. Jika hanya sebagian anggota yang diganti, potensi konflik masih ada. (Ray Rangkuti dari Lingkaran Madani Indonesia, 29/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Keanggotaan dan komposisi di BK DPR harus dirombak total.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 80 | P. XI. 29b | <p>Sayang, Presiden kurang percaya diri dan memilih selalu mengakomodasi kepentingan politik. Ini bukan sistemnya yang salah. Sistem kita sudah benar. Sistem Presidensial kita sudah kuat. (Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, 29/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Tradisi pemerintah membiarkan beberapa jabatan publik kosong harus segera diakhiri.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|----|------------|--|--|---|
| 81 | P. XI. 29c | <p>Sistem <i>warning</i>-nya tak nyala di Presiden. Semua seperti terlupa. Selain itu, kita juga pernah menyaksikan batalnya pelantikan wakil menteri. Sekretariat Negara bermasalah dalam hal administrasi. (Zaenal Arifin Mochtar, 29/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Tradisi pemerintah membiarkan beberapa jabatan publik kosong harus segera diakhiri.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan semua seperti terlupa.</p> |
| 82 | P. XI. 30a | <p>Kalau parpol menyatu, bentuk dan formatnya belum ketemu. Sebenarnya saya mengundang semua parpol yang tidak masuk parlemen untuk berdiskusi mengenai hal ini. Menyatukan parpol tidak mudah, semua ingin menjadi kepala meskipun itu kepala cacing. (Ketua Umum PKPI Sutiyo, 30/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) dinaikkan sampai 5 persen.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan bentuk analogi kepala cacing yang artinya partai kecil harus solid.</p> |
| 83 | P. XI. 30b | <p>Di negara mana pun peningkatan kesejahteraan rakyat tidak bisa dipenuhi secara tiba-tiba. Tidak ada resep ajaib. Tidak ada jalan pintas. Semua dilakukan secara bertahap. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 30/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam.</p> | representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan tidak ada resep ajaib.</p> |

KOMPAS
Desember 2010

| No. | Kode | Tuturan | Fungsi Bahasa | Penanda Kesantunan |
|-----|-------------------|---|---|--|
| 1 | P. XII. 1a | Kami ingin klarifikasi kepada pimpinan DPR bagaimana nasib keputusan rapim DPR itu? (Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo, 01/12/2010, hal 2) Konteks Konflik internal di BK DPR. | instrumental (menuntut) heuristik | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 2 | P. XII. 1b | Langkah enam fraksi itu tidak hanya memperburuk citra DPR tetapi juga menimbulkan pertanyaan, apakah perombakan itu semata karena adanya konflik internal atau ada pengaduan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan delapan anggota BK ketika ke Yunani, Oktober lalu? (Ray Rangkuti, 01/12/2010, hal 2) Konteks Konflik internal di BK DPR. | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 3 | H. XII. 1a | Pesan Presiden itu saya pegang teguh. Kejaksaan jangan jadi alat politik. (Jaksa Agung Basrief Arief, 01/12/2010, hal 3) Konteks Basrief Arief bukanlah alat politik parpol. | instrumental (memerintah) | Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan Kejaksaan jangan jadi alat politik . Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 4 | P. XII. 1c | Oleh karena itu, demokrasi harus dikawal dengan bersama-sama | representasional mengidentifikasi | Penggunaan keterangan sebab yang ditandai |

| | | | | |
|---|------------|--|---|--|
| | | <p>dikembangkan dengan berjalannya pemerintahan yang efektif. Tanpa pemerintahan yang efektif, tidak akan ada hasil nyata dari proses bernegara kita. (Wapres Boediono, 01/12/2010,hal 3)</p> <p>Konteks Pidato Wapres Boediono saat menghadiri penganugerahan Habibie Award 2010 terkait konsolidasi demokrasi.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>dengan karena.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata -kata denotatif.</p> |
| 5 | P. XII. 2a | <p>Mari kita perbaiki terus-menerus manakala kita tahu ada kelemahan dari regulasi. Mari kita lakukan pemantauan dan pengawasan yang efektif, termasuk metodologi <i>whistle blower</i> (penyingkap aib). (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 02/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif.</p> | <p>instrumental (mengajak)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat ajakan yang ditandai dengan kata mari.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif..</p> |
| 6 | P. XII. 2b | <p>Saya masih melihat penyakit <i>mark up</i>, (penggelembungan anggaran) masih ada. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 02/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif.</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> <p>instrumental (memerintah)</p> | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|---|------------|--|---|---|
| 7 | P. XII. 2c | <p>Bayangkan kalau kita sudah menghunos pedang lawan korupsi, tiba-tiba penegak hukum yang harusnya berdiri paling depan memberantas korupsi juga terlibat kejahatan ini. Kalau ingin menyapu lantai yang kotor, mari kita pastikan sapu kita bersih terlebih dahulu. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 02/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pemangku kepentingan memastikan sistem regulasi dan pengawasan dalam kerangka pemberantasan korupsi berjalan efektif.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> <p>instrumental (memerintah)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harusnya.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan menghunos pedang lawan korupsi, tiba-tiba penegak hukum yang harusnya berdiri paling depan memberantas korupsi juga terlibat kejahatan ini. Kalau ingin menyapu lantai yang kotor, mari kita pastikan sapu kita bersih terlebih dahulu</p> |
| 8 | H. XII. 2a | <p>Empat ratus perkara dalam dua bulan? Itu sinting. Tapi saya menyimak saja jawaban itu. Dua puluhan tahun menjadi hakim, mungkin tiga-empat perkara per hari. Tapi sebulan 100 perkara itu <i>gimana</i> bacanya? (Ketua Komisi DPR Benny K Harman, 02/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Seleksi pimpinan Komisi Yudisial (Abbas Said dan Hasanuddin tidak otomatis lolos dari seleksi karena unsur hakim di jajaran KY tak mutlak).</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> | <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|
| 9 | P. XII. 2d | <p>Semua pasti ingin menang dan tidak ada yang mau kalah sehingga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang kuat. (Mantan Anggota KPU, Valina S.S., 02/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Pengaturan konfederasi partai politik harus dimasukkan ke dalam undang-undang pemilu.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan sehingga.</p> |
| 10 | P. XII. 3a | <p>Presiden harus menegaskan kepemimpinannya dan tegas untuk ‘menjinakkan’ mitra koalisi. (Peneliti Senior Centre for Studies J. Kristiadi, 03/12/2010, hal2)</p> <p>Konteks Koalisi parpol pendukung pemerintahan dinilai rapuh.</p> | <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif menjinakkan yang artinya mampu membuat percaya mitra koalisi.</p> |
| 11 | P. XII. 3b | <p>Secara prinsip, kami tidak meminta kocok ulang anggota BK DPR karena itu wewenang penuh fraksi. Namun, jika keputusan Rapim DPR tidak dilaksanakan, kami menilai rapim itu bukan forum terhormat. DPR menjadi terhormat karena anggota DPR menghormati keputusannya. (Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, 03/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Konflik internal di BK DPR.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> |
| 12 | H. XII. 3a | <p>Akar berbagai persoalan itu adalah adanya perubahan yang berlangsung</p> | <p>representasional (mempertimbangkan)</p> | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|
| | | <p>cepat dan berdampak panjang, tetapi belum ada upaya serius untuk memperbaiki itu. Hal ini karena pada saat yang sama kepemimpinan politik kita pada berbagai level sibuk dengan persoalan politik, pemilu, pilkada, maupun upaya menggalang koalisi yang hingga sekarang belum tercipta dengan baik. (Ketua Presidium ICMI Prof Dr Azyumardi Azra, 03/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Keprihatinan akan realitas peradapan masyarakat madani.</p> | <p>kan kelogisan sesuatu)</p> | <p>dengan untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif.</p> |
| 13 | P. XII. 3c | <p>Dasar yang paling penting saja kita tidak punya, yaitu kepercayaan kepada pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Akan mulai dari mana, dasarnya saja tak ada. (Anggota Komisi II DPR Agus Purnomo, 03/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Penerapan <i>electronic voting</i> membutuhkan kepercayaan kepada pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak, tak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 14 | P. XII. 4a | <p>Saya dengan Pak Sultan tidak ada apa-apa, diadu-adu. Saya menghormati Pak Sultan dan beliau menghormati saya. Tetapi, menjadi berita terus. Sabar, Pak Sultan. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 04/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait RUU tentang Keistimewaan DIY.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Pak Sultan.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Tuturan tidak langsung</p> |
| 15 | H. XII. 4a | <p>Boleh saja putusan dijadikan pintu masuk. Artinya, ada kecurigaan. Tetapi, tidak boleh karena sebuah</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|
| | | <p>putusan, KY mengatakan hakim bersalah. Yang harus dicari, pernah tidak hakim bertemu (pihak) atau terima suap. (Ketua MA Harifin A. Tumpa, 04/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks MA menginginkan KY tidak lagi memeriksa putusan hakim dan mengadili hakim karena putusan yang dibuatnya.</p> | | <p>ungkapan boleh saja putusan dijadikan pintu masuk.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> |
| 16 | H. XII. 6a | <p>Kami membantah tuduhan sebagai alat politik untuk menjatuhkan partai politik tertentu, orkestraktor di balik kasus Gayus, termasuk mengiringnya kepada keterlibatan beberapa perusahaan milik Group Bakrie. (Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, 06/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Satgas mendesak kasus Gayus dituntaskan Dalam koridor hukum.</p> | representasional (menolak) | <p>Penggunaan analogi orkestraktor yang artinya pemain atau orang yang bertanggung jawab.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 17 | P. XII. 6a | <p>Kekuasaan besar itu menawarkan banyak godaan. Seorang politisi mendadak kaya raya, tetapi kemudian masuk penjara karena kasus Korupsi. Jadi, harus kuat iman. (Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Drajad Wibowo, 06/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Peran parpol sangat penting untuk memilih kader berkualitas.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|
| 18 | P. XII. 6b | <p>Mereka tidak berpedoman pada perilaku yang terhormat. Korupsi yang dilakukan politisi bukan karena mereka kurang uang, tetapi karena ketamakan. Ini, kan soal etika, mengapa sudah punya uang masih perlu uang lebih banyak lagi. (Peneliti Senior Formappi Tommy Legowo, 06/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Peran parpol sangat penting untuk memilih kader berkualitas.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif.</p> |
| 19 | H. XII. 8a | <p>Evaluasi saja, kenapa enggak kalau memang kerjanya tidak maksimal. (Praktisi Hukum, Bambang Widjojanto, 08/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Evaluasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 20 | H. XII. 8b | <p>Amat tak elok dan akan menimbulkan berbagai macam persepsi jika, dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY, Sultan HB X serta pemerintah daerah Yogyakarta tidak diajak bicara. (Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, 08/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak, tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> |
| 21 | P. XII. 9a | <p>Satu lagi yang penting, mempunyai <i>leadership</i> (kepemimpinan) yang bagus. Saya kira kepemimpinan Pak Nazar (mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin) memberi</p> | personal (memuji) | <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan sehingga.</p> <p>Penggunaan keterangan</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|
| | | <p>nilai dalam Pemilu 2004 sehingga hasilnya relatif baik meski tidak ada pemilu yang sempurna. (Mantan anggota KPU, Valina Singka Subekti, 09/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks KPU membutuhkan anggota-anggota professional terkait pemilu.</p> | | <p>modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung</p> |
| 22 | P. XII. 9b | <p>Bagaimana Setgab mau efektif jika politik saling sandera juga melibatkan tokoh-tokoh kunci. Jika gajah sudah saling bertarung, ya, sudah kelinci minggir saja. (Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, 09/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Praktik politik saling sandera (kasus Bank Century dan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan) mendominasi dinamika politik 2010.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif tokoh-tokoh kunci yang artinya orang-orang yang berkuasa.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan jika gajah sudah saling bertarung, ya, sudah kelinci minggir saja.</p> |
| 23 | P. XII. 9c | <p>Saya senang pernyataan Presiden Yudhoyono di acara Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu bahwa mereka harus siap menjadi oposisi jika kalah di Pemilu 2014. Sikap itu membuat pemilu masih ada artinya. (Ketua PDI-P Maruarar Sirait, 09/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks PDI-P konsisten dengan keputusan kongres dan keinginan arus bawah partai.</p> | <p>personal (memuji)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden Yudhoyono</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|
| | | | | Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung. |
| 24 | H. XII. 10a | <p>Namun, kami akhirnya berhasil menyakinkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie agar tetap memilih opsi menyelesaikan skandal Bank Century. (Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, 10/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Refleksi 2010 diwarnai perjuangan untuk membongkar kasus Bank Century.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung Aburizal Bakrie.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan agar.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif.</p> |
| 25 | P. XII. 10a | <p>Pemilihan langsung adalah mimpi dari semua pendukung demokrasi. Namun, kita mendapati bahwa biaya untuk itu ternyata mahal. Entah itu biaya politik, biaya ekonomi, ataupun biaya sosial. (Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, 10/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Refleksi 2010 diwarnai kemelut pemilihan langsung kepala daerah.</p> | representasional (mengetahui) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan pemilihan langsung adalah mimpi dari semua pendukung demokrasi.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 26 | P. XII. 10b | <p>Saya memperjuangkan penetapan karena saya membela harga diri dan martabat Bapak Hamengku Buwono IX. (GBPH Prabu Kusumo, 10/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Isu keistimewaan DIY semakin mengerucut karena penetapan kini cenderung menjadi harga mati untuk mempertahankan identitas keyogyaan yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penyebutan subjek langsung Bapak Hamengku Buwono IX.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|---|---|--|
| <p>27</p> | <p>P. XII. 10c</p> | <p>Saya melihat sekarang sikap masyarakat makin mengkristal ke arah penetapan. Kalau referensi umum, sejarah, budaya, dan hukum, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menolak. Karena itu, sebaiknya dengan melihat hal itu, Sultan HB X memimpin untuk menyatakan penetapan ke pemerintah pusat. Sultan tak usah ragu-ragu karena rakyat sudah bulat mendukung. (Koordinator Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta Kiai Abdul Muhaimin, 10/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Isu keistimewaan DIY semakin mengerucut karena penetapan kini cenderung menjadi harga mati untuk mempertahankan identitas keyogyaan yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif kristal dan bulat yang artinya serentak menyetujui</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak, tak.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Sultan HB X.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung</p> |
| <p>28</p> | <p>P. XII. 10d</p> | <p>Sultan atau raja itu harus mempunyai kekuasaan, jangan hanya simbol atau dipisahkan dengan gubernur sebagai penguasa. Sejarah di Yogyakarta telah membuktikan, bersatunya kekuasaan gubenur dan sultan membuat pemerintahan berjalan efektif. (Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta Sunyoto, 10/12/2010, hal5)</p> <p>Konteks Isu keistimewaan DIY semakin mengerucut.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata konotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |

| | | | | |
|----|-------------|---|--|--|
| 29 | P. XII. 10e | <p>Dari sekitar 40 kerajaan di Nusantara, kini tinggal satu, keraton Yogyakarta, yang bisa bertahan hidup karena mempunyai kekuasaan yang kongkret. Coba kalau hanya simbol, pasti akan segera musnah seperti keraton lainnya. (Koordinator Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta Kiai Abdul Muhaimin, 10/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Isu keistimewaan DIY semakin mengerucut.</p> | representasional (mempertimbang kan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata -kata konotatif.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata pasti.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan coba kalau hanya simbol, pasti akan segera musnah seperti keraton lainnya.</p> |
| 30 | P. XII. 11a | <p>Sekarang suara rakyat dapat dibeli dengan uang. Kedaulatan rakyat sudah berubah menjadi kedaulatan uang. (Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPP Chozin Chumaidy, 11/12/2010, hal2)</p> <p>Konteks Pilkada langsung mencederai nilai-nilai demokratis.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan sekarang suara rakyat dapat dibeli dengan uang dan kedaulatan rakyat sudah berubah menjadi kedaulatan uang.</p> |
| 31 | H. XII. 11a | <p>Dulu kita berjuang untuk mendapatkan hak politik. Sekarang, dari segi hukum konstitusi, kita telah punya perangkat aturan. Sekarang berbalik. Dulu pemerintah melanggar HAM karena hak politik. Sekarang</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| | | <p>pengguna hak politik justru melanggar hak orang lain, menggunakan organisasi politik untuk melanggar HAM, hak sipil, dan politik. (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 11/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. dalam acara penyerahan Yap Thiam Hien Award 2010 terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.</p> | | <p>dengan karena.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> |
| 32 | H. XII. 11b | <p>Dalam konteks ini, hanya ada dua kemungkinan. Mereka yang masuk penjara atau saya yang masuk penjara. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa saya terima suap, saya bersedia masuk penjara. Kalau sebaliknya, yang menuduh ini harus siap menerima resiko itu. Memang hukum begitu. (Hakim Konstitusi Akil Mochtar, 11/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Investigasi kasus suap MK.</p> | <p>instrumental (menantang)</p> <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 33 | H. XII. 11c | <p>Kalau Pak Mahfud, saya yakin bersih. (Refly Harun, 11/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Investigasi kasus suap MK.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Pak Mahfud.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif bersih</p> |
| 34 | H. XII. 11d | <p>Saya bilang sama Akil, delapan hakim ini tercemar. Cuma satu yang bersih. Sisanya, delapan orang itu setan sehingga yang satu malaikat.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> <p>personal</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Akil.</p> <p>Diksi ditandai dengan</p> |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | <p>Kan sama begitu kan? Tidak bersih itu kan kotor. Kotor itu setan. Saya merasa sakit, terhina. (Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, 11/12/2010, hal 3) Konteks Investigasi kasus suap MK.</p> | <p>(mengkritik)</p> | <p>penggunaan kata konotatif tercemar, kotor yang artinya terlibat kasus suap dan bersih yang artinya tidak terlibat kasus suap.</p> <p>Penggunaan analogi setan yang artinya orang yang terlibat kasus suap dan malaikat yang artinya orang yang tidak terlibat kasus suap.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan sehingga.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan saya merasa sakit, terhina.</p> |
| <p>35</p> | <p>H. XII. 11e</p> | <p>Tetapi, kalau mereka berpikir seperti itu, itu namanya silogisme yang tidak bertanggung jawab. Hanya untuk membalikkan opini publik yang kampungan. (Refly Harun, 11/12/2010, hal 3) Konteks Investigasi kasus suap MK.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|
| | | | | Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif kampungan . |
| 36 | H. XII. 13a | <p>Agar koruptor takut kepada rakyat, rakyat harus mampu dan berani melawan korupsi. (Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Teten Masduki, 13/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pelaku korupsi harus dibuat takut kepada rakyat.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan agar.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 37 | H. XII. 13b | <p>Anggaran untuk pendidikan saat ini sudah cukup besar. Namun, penyelewengannya diduga juga cukup banyak karena pengelolaan anggaran di sebagian sekolah cenderung masih tertutup. (Illian Deta dari ICW,13/12/2010, hal4)</p> <p>Konteks Pemuda menjadi perintis budaya antikorupsi.</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif tertutup yang artinya tidak ada pertanggungjawaban yang jelas kepada semua pihak.</p> |
| 38 | P. XII. 14a | <p>Pemilihan gubernur sekarang ada yang (berpendapat) apakah tidak cukup dipilih secara langsung. Silakan. Ini negara, negara kita, ini bangsa, bangsa kita. Semua pemikiran terbuka, jangan menghakimi, ini salah, ini benar. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 14/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak merujuk kembali pada konstitusi.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> <p>personal (memberi nasihat)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|---|---|--|
| 39 | H. XII. 15a | <p>Buruh tak menginginkan UU Ketenagakerjaan diubah. Mereka hanya ingin sistem pengawasan terhadap perusahaan diperketat. (Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka,15/12/2010,hal2)</p> <p>Konteks DPR targetkan selesaikan 70 RUU Tahun 2011</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 40 | P. XII. 15a | <p>Belum ada penelitian ilmiah yang bisa memastikan, biaya pemilihan gubernur oleh DPRD lebih efisien daripada pilkada langsung. Tak ada yang menjamin ongkos politik “tidak resmi” untuk “membeli perahu” partai di DPRD lebih sedikit ketimbang penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat. (Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini,15/12/2010,hal2)</p> <p>Konteks Usulan pemilihan umum kepala daerah oleh DPRD dinilai mengingkari semangat demokrasi.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata kajian efisien yang artinya tepat waktu.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan tak ada yang menjamin ongkos politik “tidak resmi” untuk “membeli perahu”.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> |
| 41 | P. XII. 15b | <p>Ide pemerintah itu berpotensi memenggal demokratisasi yang belum tuntas, dan sebaliknya mengembalikan sistem menjadi elitis. (Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo, 15/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Usulan pemilihan umum kepala daerah oleh DPRD dinilai mengingkari semangat demokrasi.</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan memenggal demokratisasi yang belum tuntas.</p> |

| | | | | |
|----|-------------|---|--|--|
| 42 | P. XII. 15c | <p>Mudah-mudahan tidak seperti mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang dulu datang berjanji tiga bulan akan membangun Pulau Sebatik tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. (Tokoh Pulau Sebatik, Haji Muhammad Ali Karim, 15/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Perlunya pendekatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> <p>instrumental (memesan)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpaman yang ditandai dengan ungkapan mudah-mudahan tidak seperti mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang dulu datang berjanji tiga bulan akan membangun Pulau Sebatik tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat harapan yang ditandai dengan kata mudah-mudahan.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 43 | H. XII. 16a | <p>Jika baru pada tahun 2011 Busyro mulai dapat bekerja, berarti dia hanya dapat beberapa bulan bekerja karena pada akhir 2011 harus mengakhiri jabatannya. Jika keadaannya demikian, apakah tidak sebaiknya jika dahulu pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar itu diseleksi bersama-sama dengan seleksi untuk mencari empat pengganti pimpinan KPK lainnya? (Gayus Lumbuun, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P,</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> |

| | | | | |
|----|-------------|---|-----------------------------------|--|
| | | 16/12/2010, hal 2) Konteks Pemerintah kurang serius mengoptimalkan KPK. | | Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena . Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk . Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung. |
| 44 | H. XII. 16b | Ibaratnya, ketika proses Pansus Bank Century berlangsung, yang ditawarkan adalah tiket perjalanan Jakarta-Surabaya. Namun, pada 3 Maret 2010, DPR memutuskan hanya membeli tiket Jakarta-Semarang. Saat ini, untuk membeli tiket Semarang-Surabaya sudah sulit. (Mantan Anggota Pansus Bank Century Romahurmuziy, 16/12/2010, hal 3) Konteks Sejumlah anggota Tim Pengawas DPR mulai putus asa terkait proses hukum penuntasan kasus Bank Century. | personal (mengkritik) | Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan ibaratnya, ketika proses Pansus Bank Century berlangsung, yang ditawarkan adalah tiket perjalanan Jakarta-Surabaya. Namun, pada 3 Maret 2010, DPR memutuskan hanya membeli tiket Jakarta-Semarang. Saat ini, untuk membeli tiket Semarang-Surabaya sudah sulit |
| 45 | P. XII. 16a | Proses demokrasi tidak berjalan. Ada pembajakan demokrasi di tingkat lokal. Pemilih seharusnya berdiri bebas dan sejajar . Akan tetapi, intervensi berupa intimidasi dari aparat birokrasi dan praktik politik uang membuat pemilih menjadi tidak lagi berdiri bebas. (Veri Junaidi dari Divisi Politik dan Hukum Konsorsium Reformasi mHukum Nasional, 16/12/2010, hal 4) | representasional mengidentifikasi | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan Pemilih seharusnya berdiri bebas dan sejajar . |

| | | | | |
|----|--------------------|---|---|---|
| | | <p>Konteks Banyaknya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu kepala daerah langsung di berbagai daerah sepanjang tahun 2010.</p> | | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 46 | P. XII. 16b | <p>Namun, Demokrat dan Golkar amat sadar, tidak menguntungkan jika sekarang mereka sudah bertabrakan. Tidak ada jaminan, siapa yang akan menang jika sekarang sudah diadu secara terbuka, bahkan mungkin keduanya akan hancur dan yang menikmati manfaatnya justru pihak ketiga. (Yunarto Wijaya, Pengamat Politik dari Charta Politika, 16/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Koalisi partai politik pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono tetap solid.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> |
| 47 | H. XII. 17a | <p>Kalau, misalnya, ada anggota yang menolak, ya <i>out</i>, keluar dari partai. (Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja'far, 17/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Revisi UU Parpol Pasal 32 mewajibkan partai memiliki mahkamah yang bertugas menyelesaikan konflik internal.</p> | <p>instrumental (memerintah)</p> <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 48 | H. XII. 17b | <p>Ini forum demokratis. Alangkah tidak adilnya, mereka boleh bicara, tetapi saya tidak boleh menanggapi. Kalau saya tidak boleh menyampaikan itu artinya ada diskriminasi. (Mendagri Gamawan Fauzi, 17/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks RUU Keistimewaan DIY panaskan sidang paripurna.</p> | <p>personal (kecewa)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|
| | | | | Penggunaan bentuk tuturan langsung. |
| 49 | H. XII. 17c | <p>Banyak yang menyalahkan pemerintah. Padahal, menjelaskan saja belum. Presiden tak pernah menyalahkan siapa pun. Kami menghargai pendapat mereka. Seharusnya kami juga dihargai. (Mendagri Gamawan Fauzi, 17/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks RUU Keistimewaan DIY panaskan sidang paripurna.</p> | <p>personal (kecewa)</p> <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> |
| 50 | P. XII. 17a | <p>Saya berharap, tahun depan Fraksi Partai Golkar di DPR kan menjadi ujung tombak untuk mengembalikan politik ke fitrahnya. Saya berharap, pada tahun 2011, panggung politik Indonesia berisikan pertanyaan tajam serta perdebatan seru tentang hal-hal yang mendasar bagi kemajuan Indonesia. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 17/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebut tahun 2010 sebagai tahun yang berisikan banyak politik intrik.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan Partai Golkar di DPR kan menjadi ujung tombak.</p> |
| 51 | P. XII. 18a | <p>Golkar akan mengajak melakukan politik sehat. (Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, 18/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Partai Golkar akan memelopori melakukan politik bersih.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif sehat.</p> |
| 52 | H. XII. 18a | <p>Saya justru minta supaya jangan (ikut) sidang. Tapi Pak Mahfud bilang</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|--|
| | | <p>jangan, ikut saja. (Kemarin sidang pembacaan putusan sengketa pilkada-Red). Ada SMS Pak Mahfud kepada saya. Saya sudah katakan, malu, Pak. Saya membaca, memeriksa (perkara), saya merasa kotor. Orang pasti berpikir, kenapa kok dia memeriksa, kotor itu. (Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, 18/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Konstitusi Arsyad Sanusi tidak bisa tidur terkait investigasi MK.</p> | | <p>dengan supaya.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif kotor yang artinya bersalah.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan Saya membaca, memeriksa (perkara), saya merasa kotor.</p> |
| 53 | P. XII. 18b | <p>Mari kita sehatkan politik Indonesia. Dan, jika ingin kembali pada warna politik 2011 yang sehat dan segar, hindari politik undrek-undrek (binatang yang mengorek-ngorek tanah). (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 18/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Penyelenggaraan pemerintah yang baik membutuhkan syarat dinamika politik yang sehat dan produktif.</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat ajakan yang ditandai dengan kata mari.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif warna, sehat, segar.</p> <p>Penggunaan bentuk analogi undrek-undrek (binatang yang mengorek-ngorek tanah).</p> |
| 54 | H. XII. 18b | <p>Secara fisik kita merupakan masyarakat modern. Tetapi di balik itu masih sangat purba. Sekitar 230 juta penduduk Indonesia hanya mendapat bagian 5 persen pendapatan nasional bruto. Mereka tidak mengetahui hidup ini untuk apa. Sedangkan 40 orang terkaya di Indonesia menguasai 60 persen</p> | <p>personal (mengkritik)</p> <p>representasional mengidentifikasi</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa paradoks yang ditandai dengan ungkapan secara fisik kita merupakan masyarakat modern. Tetapi di balik itu masih sangat purba.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | <p>pendapatan nasional bruto. Mereka sama para elite menggunakan akses dan kekuasaan atas perekonomian untuk memuaskan nafsu purba mengumbar hidup yang hedonis dan tidak memedulikan kesejahteraan rakyat. (Budayaan Radhar Panca Dahana, 18/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Penafsiran sejarah secara tepat dapat membebaskan bangsa Indonesia dari tradisi kekerasan.</p> | | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan memuaskan nafsu purba mengumbar hidup yang hedonis</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif.</p> |
| 55 | H. XII. 18c | <p>Jika terjadi seperti itu, kan kesia-siaan. Karena itu, harus bijak menyikapi gejolak rakyat DIY. Tak perlu malu mengakui aspirasi rakyat. (Praktisi Hukum Achiel Suyanto, 18/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks Pemerintah pusat dan DPR harus memerhatikan aspirasi warga Yogyakarta.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang ditandai dengan ungkapan gejolak rakyat DIY.</p> |
| 56 | H. XII. 19a | <p>Wasit terbaik memang di KPK sehingga semua (yang terkait kasus itu) harus diungkap di KPK. Tim</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan bentuk analogi wasit terbaik.</p> |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|---|
| | | <p>mendorong KPK agar bekerja sebaik-baiknya. (Mantan Ketua Tim Investigasi Internal MK Refly Harun, 19/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks Refly Harun siap diperiksa KPK terkait kasus mafia hukum.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan sehingga.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan agar.</p> |
| 57 | H. XII. 20a | <p>Sekarang bola sudah ada di DPR. Ini kesempatan DPR untuk membahas dengan pikiran yang jernih. (Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 20/12/2010, hal 3)</p> <p>Konteks Konsep gubernur utama dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta harus sesuai UUD 1945.</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan bentuk analogi bola yang artinya pembahasan RUU Keistimewaan DIY.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan membahas dengan pikiran yang jernih.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> |
| 58 | P. XII. 21a | <p>Yang terjadi justru oligarki serta pembangunan dinasti. Wilayah politik menjadi arena pertarungan kekuasaan lewat politik uang dan mengandalkan citra politik tanpa substansi sehingga kesadaran politik masyarakat ditentukan kemasan dan fatamorgana politik. (Ketua Presidium ISKA Muliawan Margadana, 21/12/2010, hal5)</p> <p>Konteks Indonesia tengah mengalami pendangkalan arti demokrasi.</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan wilayah politik menjadi arena pertarungan kekuasaan lewat politik uang.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif kemasan dan fatamorgana politik.</p> <p>Penggunaan keterangan</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|---|---|---|
| | | | | akibat yang ditandai dengan sehingga . |
| 59 | P. XII. 22a | <p>Saya sering bicara dengan anggota Setgab dari PKS, PAN, dan PKB. Kami ini ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Jika dibutuhkan, kami diajak bicara; jika kita tidak dibutuhkan, kami ditinggalkan. (Sekretaris Fraksi PP Romahurmuziy, 22/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan gaya bahasa peribahasa yang ditandai dengan ungkapan habis manis sepah dibuang yang artinya dibuang atau diabaikan setelah tidak dipakai lagi..</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 60 | P. XII. 22b | <p>Setgab ibarat kawin kontrak partai-partai yang bisa berakhir karena ada kepentingan berbeda. (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, 22/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab.</p> | representasional mengidentifikasi | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan setgab ibarat kawin kontrak partai-partai yang bisa berakhir.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena</p> |
| 61 | P. XII. 22c | <p>Intinya, ini memang cara mereka untuk membunuh parpol kecil. (Sekjek Partai Persatuan Daerah Ratna Ester L Tobing, 22/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Parpol Kecil siapkan uji materi ke MK terkait revisi UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.</p> | representasional (mempertimbangkan kepastian) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan untuk.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan cara mereka untuk membunuh parpol kecil.</p> |

| | | | | |
|----|-------------|--|---|---|
| 62 | H. XII. 23a | <p>Karena dalam kasus Sisminbakum tidak ada unsur kerugian negara dan tidak ada sifat melawan hukum, semua orang, baik yang masih dalam proses hukum dalam kasus itu semestinya dibebaskan dan atau dihentikan. (Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, 23/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Romli Atmasasmita diputus lepas dari semua tuntutan hukum oleh MA terkait kasus Sisminbakum.</p> | <p>representasional (melaporkan)</p> <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata semestinya.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> |
| 63 | H. XII. 23b | <p>Jika kita jernih melihat, roh Satgas itu sebagai penguat upaya pemberantasan korupsi. (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko S ,23/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Penguatan upaya pemberantasan mafia hukum penting untuk menyinergikan lembaga penegak hukum.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan jika kita jernih melihat, roh Satgas itu sebagai penguat upaya pemberantasan korupsi.</p> |
| 64 | H. XII. 24a | <p>MK harus melindungi Dirwan supaya bisa menangkap tikus yang ditunjuk Dirwan.(Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zaenal Arifin Mochtar, 24/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Mahkamah Konstitusi melindungi Dirwan Mahmud terkait dugaan praktik suap di MK</p> | <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan supaya.</p> <p>Penggunaan bentuk analogi tikus yang artinya orang yang terlibat.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|
| 65 | H. XII. 24b | <p>Satu tahun keberadaan Satgas perlu dievaluasi. Independensinya patut dipertanyakan. Dalam kasus cicak dan buaya yang memojokkan Wakil Ketua KPK Bibit-Chandra Satgas nyaris tak memberikan perhatian. (anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, 24/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Golkar pertanyakan independensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan kasus cicak dan buaya yang memojokkan Wakil Ketua KPK Bibit-Chandra.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tak.</p> |
| 66 | P. XII. 27a | <p>Standarnya naik jadi 5 persen. Lebih bagus kalau lebih dari itu, misalnya 7 persen. (Ketua Tim Kajian RUU Politik dari Fraksi Partai Golkar DPR Ibnu Munzir, 27/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Kajian RUU paket politik terkait ambang batas perlemen minimal 5 persen.</p> | representasional (menyetujui) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> |
| 67 | H. XII. 28a | <p>Sistem hukum kita dengan jelas menyatakan saksi yang juga pelaku kejahatan tidak dapat dilepaskan dari proses hukum. MK dalam posisi harus melaporkan adanya tindak pidana sebab jika tidak dilaporkan, justru MK melanggar hukum. (Ketua MK Mahfud M.D., 28/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks KPK memeriksa Refly Harun terkait dugaan praktik pemerasan dan penyuapan di tubuh MK.</p> | representasional (mempertimbangkan kelogisan sesuatu) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan sebab.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| 68 | H. XII. 30a | <p>Jika ada yang menginginkan pemilihan, silakan keluar dari DIY. (Ketua Paguyuban Slemania Supriyoko, 30/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Penetapan keistimewaan DIY adalah harga mati.</p> | instrumental (menantang) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> |
| 69 | H. XII. 30b | <p>Yang 720 pasal itu bisa dijadikan tiga buku, misalnya, buku ke-1 sampai ke-3. Misalnya buku ke-1 berisi 100 pasal itu dibahas dulu. Dan biarkan berlalu dulu. Setelah itu baru buku ke-2 dan selanjutnya. (Hakim Konstitusi Akil Mochtar, 30/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Pemerintah mengajukan perubahan KUHP.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tidak langsung.</p> |
| 70 | H. XII. 31a | <p>Lalu apa alasan yuridis Kejaksaan Agung tidak menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh anggota DPR di atas sebagai tersangka? (Yusril Ihza Mahendra, 31/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks Yusril Ihza menantang Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Sisminbakum.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh anggota DPR.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KEABSAHAN HASIL ANALISIS DATA

| No. | Kode | Tuturan | Fungsi Bahasa | Penanda Kesantunan | Keterangan |
|-----|----------|--|--|---|--------------|
| 1. | P. X. 1c | <p>DPR jangan mau <i>defait accompli</i> dengan satu calon yang diajukan Presiden. Dengan hanya satu nama calon yang diajukan, DPR menjadi tukang stempel atas calon yang diajukan Presiden. (Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, 01/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks tuturan Sebastian Salang menganjurkan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, DPR sebaiknya menolak jika Presiden hanya mengajukan satu nama calon.</p> | instrumental (menuntut) | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata bermakna denotatif.</p> <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan kata tukang stempel. <i>Tukang stempel</i> adalah orang yang pekejaannya membuat cap (dalam hal ini rakyat dapat memberikan masukan kepada DPR untuk menilai kinerja dan rekam jejak calon Kepala Polri, mengingat DPR adalah lembaga aspirasi rakyat, bukan lembaga yang langsung menyetujui perintah pemerintah tanpa mendengar aspirasi rakyat).</p> | Tidak Setuju |
| 2. | P. X. 1e | <p>Siapa pun yang menjadi menteri keuangan pasti akan dibandingkan dengan Sri Mulyani. (Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, 01/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks tuturan Integritas Sri Mulyani memberikan</p> | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Sri Mulyani.</p> <p>Penggunaan analogi yang ditandai dengan sebutan Sri Mulyani yang diartikan</p> | Setuju |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|--------|
| | | standar minimal bagi posisi menteri keuangan. | | orang yang membela publik dari politik koruptif kekuasaan. Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata pasti . | |
| 3. | H. X. 2a | Perubahan UU harus dilakukan. Dalam UU disebutkan setiap orang berhak mendapatkan remisi. Jika tidak demikian, lalu disebut saja setiap orang berhak mendapatkan remisi kecuali teroris dan koruptor. (Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., 02/10/2010, hal 2) Konteks tuturan Revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinilai akan memudahkan penerapan aturan dalam kasus terorisme dan korupsi di Indonesia. | regulatori instrumental (menyarankan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata harus dan tidak . Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika . | Setuju |
| 4. | P. X. 2c | Bantahan Gamawan dan keterlambatan Kejagung mengumumkan status tersangka pejabat Kemdagri ini menimbulkan tanda tanya . Kejagung juga baru umumkan setelah ditanya wartawan. Kami curiga kasus ini akan dihentikan secara diam-diam. | representasional (mempertimbangkan kemungkinan) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Gamawan . Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif tanda tanya yang artinya pertanyaan | Setuju |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|--------|
| | | <p>(Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sumaryanto, 02/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks tuturan Mendagri tidak bisa mengingkari fakta ada anggota staf jajarannya yang menjadi tersangka kasus korupsi</p> | | <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> | |
| 5. | H. X. 2d | <p>Presiden SBY sangat relevan didengar keterangannya karena beliau hadir dalam rapat-rapat pada masa kabinet Presiden Gus Dur. SBY mengetahui proses Sisminbakum. (Yusril Ihza Mahendra, 02/10/2010, hal 4)</p> <p>Konteks tuturan Yusril Ihza Mahendra mengajukan saksi-saksi meringankan terkait kasus Sisminbakum</p> | <p>instrumental (menyarankan)</p> <p>representasional (melaporkan)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Presiden SBY dan Presiden Gus Dur.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif</p> | Setuju |
| 6. | H. X. 4a | <p>(Kebijakan) itu masih dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya pegangan yang kuat untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan TNI ikut menjaga keselamatan bangsa dan negara. (Panglima TNI Laksamana Agus</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> <p>instrumental (menyarankan)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat harapan yang ditandai dengan kata mudah-mudahan.</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> | Setuju |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|--------|
| | | Suhartono, 04/10/2010, hal 4) Konteks tuturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan TNI untuk menangani teror dan kerusuhan. | | | |
| 7. | P. X. 5b | Saya juga lihat Menko Polhukam terus bekerja dengan gigih untuk itu. Teruskan keterpaduan upayanya, sinkronisasi, koordinasi yang sifatnya horizontal.(Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, 05/10/2010, hal 4) Konteks tuturan Dengan bantuan TNI dan intelijen, kepolisian diharapkan dapat melanjutkan upaya penanganan terorisme secara tepat. | representasional (mengetahui) instrumental (memerintah) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut Menko Polhukam . Diksi ditandai dengan penggunaan kata konotatif horizontal yang artinya semua pihak harus bekerja sama dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia. Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . | Setuju |
| 8. | P. X. 6a | Perlu meningkatkan kualitas anggota Dewan agar tahu apa yang dimaksud aspirasi dan kepentingan rakyat. Anggota dewan seharusnya menampung aspirasi , membuat legislasi , dan mengawasi. (Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin | instrumental (menyarankan) | Penyebutan subjek langsung yang ditandai dengan menyebut anggota Dewan . Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif | Setuju |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|--|--------|
| | | <p>Haris, 06/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks tuturan Anggota DPR dinilai tidak mengetahui tugas pokok legislatif dalam membuat undang-undang.</p> | | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata agar.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya.</p> | |
| 9. | P. X. 6c | <p>Minta uang mudik, proposal proyek, hingga bantuan berobat.</p> <p>Kalau tidak diberi, kata-kata yang disampaikan makin pedas. Anggota Dewan kalau ke daerah pemilihan seperti dianggap sinterklas. (Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Ida Fauziah, 06/10/2010, hal 2)</p> <p>Konteks tuturan Sikap masyarakat yang gemar meminta materi tidak terlepas dari perilaku politik uang yang dilakukan elite politik dalam pemilihan umum.</p> | <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti dianggap sinterklas. Sinterklas adalah tokoh Natal yang suka memberi hadiah kepada anak-anak.</p> | Setuju |
| 10. | P. X. 8a | <p>Tiba-tiba ada pemberitahuan di media, dikatakan biaya pakaian Presiden itu mencapai Rp 893 juta per tahun. Satu rupiah pun tidak ada biaya untuk dipakai saya.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> <p>personal</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa litotes yang ditandai dengan ungkapan satu rupiah pun tidak ada dan tidak pernah ada selembar pakaian pun.</p> | Setuju |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|--|--------|
| | | <p>Sejak pertama menjadi Presiden RI tahun 2004, tidak pernah ada selembur pakaian pun menggunakan uang negara. Jelas, faktanya ada. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal2)</p> <p>Konteks tuturan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menepis tuduhan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.</p> | (kecewa) | Penggunaan bentuk tuturan langsung | |
| 11. | H. X. 8d | <p>KPK jangan hanya menangani perkara kecil. Bagaimana perkembangan kasus Bank Century? (Ahmad Kurdi dari F-PPP, 08/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks tuturan Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kasus Bank Century dalam rapat DPR-KPK.</p> | <p>heuristik</p> <p>personal (kecewa)</p> | <p>Penggunaan tuturan tidak langsung</p> <p>Penyebutan subyek langsung KPK</p> | Setuju |
| 12. | P. X. 8d | <p>Hari-hari terakhir ini ada semacam pergerakan di Den Haag yang mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia, bahkan meminta pengadilan menangkap Presiden RI saat berkunjung ke</p> | <p>representasional mengidentifikasi</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang ditandai dengan ungkapan hari-hari terakhir ini ada semacam pergerakan di Den Haag yang artinya ada rencana kelompok Republik Maluku</p> | Setuju |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|-------------------------------|---|--------|
| | | Belanda. (Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 08/10/2010, hal 3) Konteks tuturan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mendadak menunda kunjungan kenegaraannya ke Belanda terkait info <i>Kort Geding</i> . | | Selatan yang menggugat pemerintahan Indonesia dengan tuduhan pelanggaran HAM. Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata bermakna denotatif. | |
| 13. | P. X. 16a | Dengan sosialisasi sejak dini, masyarakat akan lebih tahu karakter dan kapasitas setiap calon. Dengan demikian, masyarakat tidak akan membeli kucing dalam karung . (Pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, 16/10/2010, hal 2) Konteks tuturan Partai Golkar siap menyosialisasikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014. | instrumental (menyarankan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak . Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan membeli kucing dalam karung yang artinya tokoh yang akan maju sebagai bakal presiden pada Pemilu 2014 harus diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah memilih calon Presiden dalam Pemilu 2014. | Setuju |
| 14. | P. X. 21c | Seharusnya pimpinan mendengar gejolak publik yang menolak kunjungan ke luar negeri . Mereka punya kewenangan untuk membatalkan. (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia | instrumental (menyarankan) | Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata seharusnya . Penggunaan gaya bahasa | Setuju |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|-------------------------------|--|--------|
| | | Perjuangan T. Gayus Lumbuun, 21/10/2010, hal 2) Konteks tuturan DPR diminta menghentikan rencana kunjungan kerja ke luar negeri. | | personifikasi yang ditandai dengan ungkapan gejolak publik yang menolak kunjungan ke luar negeri . Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk . | |
| 15. | P. X. 21d | Waduh saya bisa melayang ke atap nih. Tetapi, memang saya jarang difoto. Kalau saya banyak difoto dan dipajang, nanti seperti beliau . (Edhie Baskoro Yudhoyono, 21/10/2010, hal 2) Konteks tuturan Wawancara dengan Edhie Baskoro Yudhoyono. | representasional (menjawab) | Penggunaan gaya bahasa metafora yang ditandai dengan ungkapan bisa melayang ke atap untuk menyatakan perasaan malu saat dipuji. Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti beliau yang artinya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau . | Setuju |
| 16. | P. X. 21e | Di kalangan kaum pemikir dikenal ungkapan: to rule is easy, to govern is difficult . Berkuasa memang | representasional (melaporkan) | Penggunaan gaya bahasa peribahasa yang ditandai dengan ungkapan to rule is | Setuju |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|--------|
| | | <p>mudah, tetapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukan pekerjaan gampang. Dibutuhkan visi, dedikasi, dan keberanian untuk bertindak manakala diperlukan. (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, 21/10/2010, hal 3)</p> <p>Konteks tuturan Pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada resepsi Hari Ulang Tahun Golkar Ke-46 terkait pemimpin yang baik.</p> | | <p><i>easy, to govern is difficult</i> yang artinya berkuasa memang mudah, tetapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukan pekerjaan yang mudah.</p> | |
| 17. | H. X. 26a | <p>Saya sebagai Kepala Polri ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang belum tercapai. (Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso, 26/10/2010, hal 5)</p> <p>Konteks tuturan Pihak Kepolisian Negara RI mengakui masih ada kelemahan dalam melayani masyarakat.</p> | <p>personal (memohon maaf)</p> | <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> | Setuju |
| 18. | H. XI. 3a | <p>Ini tugas berat untuk meningkatkan integritas sehingga tidak ada lagi nantinya petugas yang menerima gratifikasi dan layanannya akan menjadi lebih baik. (Wakil Ketua KPK M. Jasin, 03/11/2010, hal 2)</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kemungkinan)</p> | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penggunaan keterangan akibat yang ditandai dengan kata sehingga.</p> | Setuju |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|-------------------|--|--------|
| | | <p>Konteks tuturan KPK meminta ada perbaikan. survei layanan publik untuk cegah korupsi.</p> | | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> | |
| 19. | P. XI. 5c | <p>Buat pengungsi (nasinya) kurang, tetapi kalau buat Presiden, ya sudah cukup. (Ny. Ani Bambang Yudhoyono, 05/11/2010, hal 5)</p> <p>Konteks tuturan Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono di dapur umum barak pengungsian dan menikmati nasi bungkus bersama pengungsi korban bencana erupsi merapi.</p> | interaksional | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata kalau.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> | Setuju |
| 20. | P. XI. 6c | <p>Rasanya sulit untuk menemukan cara membangun komitmen anggota DPR untuk lebih peduli kepada rakyat. Mereka seperti membiarkan korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia. (Sebastian</p> | personal (kecewa) | <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan seperti membiarkan korban</p> | Setuju |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|-----------------------|--|--------|
| | | Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 06/11/2010, hal 4) Konteks tuturan Studi Banding ke luar negeri oleh anggota DPR merupakan persoalan pikir dan hati nurani mereka. | | bencana alam di Wasior, Mentawai, dan letusan Gunung Merapi meninggal dunia yang artinya tidak memiliki kepedulian kepada penderitaan rakyat korban bencana alam. | |
| 21. | H. XI. 8a | Cara kerja Kejaksaan Agung yang amburadul seperti ini membuat orang bertanya-tanya, benarkah hukum ingin ditegakkan atau sekadar melaksanakan sebuah agenda politik? Kalaupun perkara ini dilimpahkan ke pengadilan, akan saya hadapi dengan ilmu, keberanian, dan ketegaran sikap. (Yusril Ihza Mahendra, 08/11/2010, hal 4) Konteks tuturan Yusril Ihza Mahendra mengkritik cara kerja Kejaksaan Agung terkait kasus Sisminbakum. | personal (kecewa) | Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif. Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung. | Setuju |
| 22. | P. XI. 9c | Di sini hujan, tetapi udaranya panas sekali. Aneh, kan. (Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono, 09/11/2010, hal 2) | personal (mengkritik) | Penggunaan gaya bahasa paradoks yang ditandai dengan ungkapan di sini hujan, tetapi udaranya panas sekali. | Setuju |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---|-------------------------------|---|--------|
| | | <p>Konteks tuturan Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pengungsi dan wilayah letusan Gunung Merapi.</p> | | | |
| 23. | H. XI.10a | <p>Kami tidak diterima staf Kemko Polhukam untuk audiensi. Padahal, beberapa saat lalu Menko Polhukam sudah menerima kami dengan baik. Kami menentang rencana pemberian gelar kepahlawanan kepada mantan Presiden Soeharto karena banyak pelanggaran HAM yang ditinggalkan. (Haris Azhar, Koordinator Kontras dan Gabungan LSM, 10/11/2010, hal 2)</p> <p>Konteks tuturan Aktivis HAM menentang nominasi Soeharto sebagai pahlawan nasional.</p> | representasional (menolak) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan tujuan yang ditandai dengan kata untuk.</p> <p>Penyebutan subjek langsung Menko Polhukam dan mantan Presiden Soeharto.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan kata karena.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> | Setuju |
| 24. | H. XI. 12a | <p>Tim silakan bekerja. Kami tidak akan mengganggu. Mau diam-diam atau terang benderang silakan. (Ketua MK Mahfud M.D., 12/11/2010, hal 3)</p> | instrumental (memerintah) | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata</p> | Setuju |


| | | | | | |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | <p>Konteks tuturan MK tidak akan mengganggu kerja tim investigasi internal.</p> | | <p>konotatif diam-diam yang artinya merahasiakan pergerakan tim investigasi internal MK selama memeriksa saksi-saksi dan terang benderang yang artinya pemeriksaan secara terbuka.</p> | |
| 25. | P. XI. 16a | <p>Obama pemimpin bersahaja, jauh dari kesan angkuh dan congkak. Jauh dari persepsi kita tentang Amerika Serikat (AS) yang arogan. Latar belakang Obama dari keluarga sederhana. Dia menjadi spirit bagi politisi. (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, 16/11/2010, hal 3)</p> <p>Konteks tuturan Kekaguman kepada Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama.</p> | <p>personal (memuji)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Obama.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> | <p>Setuju</p> |
| 26. | H. XI.26c | <p>Tidak harus semuanya oleh Presiden diresponsnya. Mari jalankan sistem dan ambil tanggung jawab yang sesuai dengan peranan dan tanggung jawab. (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 26/11/2010, hal 2)</p> | <p>instrumental (memerintah)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan</p> | <p>Tidak Setuju → ajakan</p> |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|--------------|
| | | <p>Konteks tuturan Sejumlah tugas yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada sejumlah menteri belum diselesaikan pada waktunya.</p> | | <p>yang ditandai dengan kata harus. Penyebutan subjek langsung Presiden.</p> | |
| 27. | P. XII. 4a | <p>Saya dengan Pak Sultan tidak ada apa-apa, diadu-adu. Saya menghormati Pak Sultan dan beliau menghormati saya. Tetapi, menjadi berita terus. Sabar, Pak Sultan. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 04/12/2010, hal 2)</p> <p>Konteks tuturan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait RUU tentang Keistimewaan DIY.</p> | <p>representasional (mempertimbangkan kepastian)</p> <p>personal (mengkritik)</p> | <p>Penyebutan subjek langsung Pak Sultan.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan tidak langsung.</p> | Tidak Setuju |
| 28. | P.XII.15c | <p>Mudah-mudahan tidak seperti mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang dulu datang berjanji tiga bulan akan membangun Pulau Sebatik tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. (Tokoh Pulau Sebatik, Haji Muhammad Ali Karim, 15/12/2010, hal 3)</p> | <p>personal (mengkritik)</p> <p>instrumental (memesan)</p> | <p>Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang ditandai dengan ungkapan mudah-mudahan tidak seperti mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang dulu datang berjanji tiga bulan akan membangun Pulau Sebatik tetapi sampai sekarang</p> | Setuju |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|---|---------------------|
| | | <p>Konteks tuturan Perlunya pendekatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.</p> | | <p>tidak ada realisasinya.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat harapan yang ditandai dengan kata mudah-mudahan.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> <p>Diksi ditandai dengan penggunaan kata-kata denotatif.</p> <p>Penggunaan bentuk tuturan langsung.</p> | |
| 29. | H. XII. 18c | <p>Jika terjadi seperti itu, kan kesediaan. Karena itu, harus bijak menyikapi gejolak rakyat DIY. Tak perlu malu mengakui aspirasi rakyat. (Praktisi Hukum Achiel Suyanto, 18/12/2010, hal 5)</p> <p>Konteks tuturan Pemerintah pusat dan DPR harus memerhatikan aspirasi warga Yogyakarta.</p> | <p>instrumental (menuntut)</p> | <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat keharusan yang ditandai dengan kata harus.</p> <p>Penggunaan keterangan sebab yang ditandai dengan karena.</p> | <p>Tidak Setuju</p> |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|--------------------------|--|--------|
| | | | | Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang ditandai dengan ungkapan gejolak rakyat DIY. | |
| 30. | P. XII. 22a | <p>Saya sering bicara dengan anggota Setgab dari PKS, PAN, dan PKB. Kami ini ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Jika dibutuhkan, kami diajak bicara; jika kita tidak dibutuhkan, kami ditinggalkan. (Sekretaris Fraksi PP Romahurmuziy, 22/12/2010, hal 4)</p> <p>Konteks tuturan Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab.</p> | personal (mengkritik) | <p>Penggunaan gaya bahasa peribahasa yang ditandai dengan ungkapan habis manis sepah dibuang yang artinya dibuang atau diabaikan setelah tidak dipakai lagi.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kondisional yang ditandai dengan kata jika.</p> <p>Penggunaan keterangan modalitas tingkat kepastian yang ditandai dengan kata tidak.</p> | Setuju |

Yogyakarta, 3 April 2012
 Trianggulator



Dr. R. Kunjana Rahardi, M. Hum.